

Halaman ini  
tidak diperjual-belikan.

**Dr. MUNJIN, M.Pd.I.**

**PENGEMBANGAN  
MADRASAH  
BERBASIS MODAL SOSIAL**



**PENGEMBANGAN  
MADRASAH  
BERBASIS MODAL SOSIAL**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002  
tentang Hak Cipta**

**Lingkup Cipta**

**Pasal 2**

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

**Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Buku ini tidak diperjual-belikan.**

**SPESIFIKASI CETAK BUKU**

**Pengembangan Madrasah**

**Berbasis Modal Sosial**

Karya : Dr. Munjin, M.Pd.I.

Ukuran : 16 x 24 cm

Jenis Kertas Cover : Ivory 230 gram

Jenis Kertas Isi : Book Paper 57 gram

Cetak Cover : Full Color

Cetak Isi : Hitam Putih

Laminasi Cover : Doff

Jilid Buku : Soft Cover

Kemasan : Plastik Shrink

Jumlah Halaman: 154 + viii

Oplah : 325 exp

Dr. MUNJIN, M.Pd.I.

**PENGEMBANGAN  
MADRASAH  
BERBASIS MODAL SOSIAL**

**PENGEMBANGAN MADRASAH BERBASIS MODAL SOSIAL**

Penulis: Dr. Munjin, M.Pd.I.

*All rights reserved*

Hak cipta dilindungi Undang-undang, dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama, Desember 2017

ISBN : 978-602-50771-3-5

Editor : Arif Hidayat

Desain Cover : Rolas E nem

Tata Letak : Anas Abdurahman

**Penerbit STAIN Press**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Jl. A. Yani No. 40-A, Purwokerto

Telp. (0281) 635 624, Fax. (0281) 628 250

E-mail: support@stainpress.com

stainpress2003@gmail.com

Website: <http://www.stainpress.com>

[www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KdT)

**PENGEMBANGAN MADRASAH BERBASIS MODAL SOSIAL**

Penulis: Dr. Munjin, M.Pd.I.

Cet.1 – Penerbit STAIN Press, Purwokerto, Desember 2017

Editor : Arif Hidayat

154 halaman + viii ; 16 x 24 cm

ISBN : 978-602-50771-3-5

I. Pendidikan I. Judul

II. Munjin

# PENGANTAR PENULIS



Pengembangan madrasah seharusnya tidak hanya tergantung pada modal finansial yang meliputi fasilitas sarana prasarana saja. Ada variabel lain yang mempunyai andil lebih penting, yaitu modal sosial. Jika dua variabel tersebut digunakan secara maksimal, madrasah akan bisa berkembang dengan pesat, apa lagi jika madrasah tersebut secara geneologis mempunyai basis massa yang besar.

Modal sosial yang merupakan faktor utama perkembangan komunitas, baik lokal maupun nasional, dalam hal ini, patut pula dicermati. Meski partisipasi institusi formal mengalami penurunan, namun upaya untuk meningkatkan demokratisasi kaitannya dengan hubungan dan *trust*, baik dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat sangatlah penting. Kaitan dengan hal ini, faktor yang tidak kalah urgen adalah sikap terbuka terhadap perkembangan dan kecenderungan pada inovasi baru. Sikap terbuka terhadap perubahan politik dan kemasyarakatan ini merupakan unsur utama kemajuan dan stabilitas demokrasi.

Pada sisi itu, ditemukan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dan *trust*. Orang akan lebih percaya kepada orang lain yang tingkat pendidikannya sama atau lebih tinggi, bahkan disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, akan semakin tinggi pula *trust*-nya kepada orang lain. Perlu diketahui bahwa *trust* merupakan variabel penting untuk mengukur modal sosial.

Konsep yang digunakan dalam buku ini tidak bisa dilepaskan dari usaha untuk mendeskripsikan tentang modal sosial sebagai strategi pengembangan madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas Purbalingga. Modal sosial sebagai strategi pengembangan madrasah tersebut adalah suatu konteks yang sifatnya alamiah, yaitu suatu konteks kebulatan menyeluruh yang tidak bisa dipahami dengan membuat isolasi

atau eliminasi sehingga terlepas dari konteksnya. Pendekatan kualitatif-idiografik dipandang cocok karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah bahwa modal sosial menjadi sebuah strategi pengembangan madrasah dengan kekhasannya.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai bahan pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga, mengidentifikasi dan mengembangkan modal sosial yang telah dibangun di Madrasah Ibtidaiyah. Selain itu, semoga kehadiran buku ini bermanfaat untuk menambah hazanah riset ilmiah tentang modal sosial di madrasah, utamanya Madrasah Ibtidaiyah. Penulis sampaikan penghargaan setinggi-tingginya untuk semua pihak, teriring do'a semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap dengan penuh keyakinan, semoga buku ini membawa manfaat. Kepada Allah jualah semua bermuara, dan Dialah sebaik-baik tempat bermuara.

# DAFTAR ISI



<b>PENGANTAR PENULIS.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>MADRASAH DAN MODAL SOSIAL.....</b>	<b>11</b>
A. Madrasah .....	11
B. Modal Sosial .....	18
<b>PENGEMBANGAN MADRASAH MELALUI MODAL SOSIAL JARINGAN .....</b>	<b>57</b>
A. Strategi Membangun Jaringan Melalui Jalur Internal .....	59
B. Membangun Jaringan Eksternal.....	87
<b>PENGEMBANGAN MI ISTIQOMAH SAMBAS MELALUI MODAL SOSIAL KEPERCAYAAN.....</b>	<b>97</b>
A. <i>"Trust Building"</i> .....	98
B. Membangun Kepercayaan Filosofis.....	101
C. Membangun Kepercayaan Praktis.....	104
D. Membangun Kepercayaan Institusional.....	116
<b>PENGEMBANGAN MI ISTIQOMAH SAMBAS MELALUI MODAL SOSIAL NORMA.....</b>	<b>125</b>
A. Norma Kelembagaan .....	126
B. Norma Sosial .....	133

DAFTAR PUSTAKA.....	145
BIODATA PENULIS.....	153

\*\*\*\*

# 1

## PENGANTAR



Membincangkan modal sosial, ada beberapa ahli ilmu sosial yang memiliki penjelasan menarik, di antaranya adalah John Field, yang mengatakan bahwa studi tentang modal sosial dapat dimulai dari pemikiran Pierre Bourdieu, James Coleman dan Robert Putnam.<sup>1</sup> Pemikiran Bourdieu dipublikasikan untuk pertamakalinya pada tahun 1973. Ia mempopulerkan tiga bentuk modal yaitu modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial.<sup>2</sup> Selanjutnya, Coleman memadukan teori dalam ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi untuk menjelaskan modal sosial. Ia mengatakan modal sosial adalah sesuatu yang dapat memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat miskin dan pinggiran.<sup>3</sup>

Studi tentang modal sosial semakin populer setelah Putnam meneliti tentang tradisi politik di Italia, dan menerapkannya pada studi hubungan sosial di Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan dari tahun 1960 sampai 1990-an memperlihatkan bahwa orang Amerika secara perlahan telah memilih menarik diri dari kehidupan kewargaan.<sup>4</sup> Kemudian modal sosial berkembang sebagai teori kontemporer setelah Putnam menjelaskan tentang sumber modal sosial yang dibangun dari tiga struktur

- 
1. John Field, *Social Capital And Lifelong Learning* (Bristol, UK: The Policy Press University of Bristol, 2005), 19.
  2. Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital", dalam J. Richardson J (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (Westport, CT: Greenwood Press, 1986). Max Stephenson dan Alnoor Ebrahim, "Trust, Social Capital, and Organizational Effectiveness", *Makalah pada Master of Public and International Affairs* (The Virginia Polytechnic Institute and State University, 2004), 5.
  3. J.S. Coleman, *Social Capital in the Creation of Human Capital* (Cambridge Mass: Harvard University Press, 1999), 29.
  4. John Field, *Modal Sosial*, terj. Nurhadi, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), 6.

yaitu jaringan, kepercayaan, serta norma.<sup>5</sup> Ketiga struktur modal sosial tersebut, dalam perkembangannya sering digunakan sebagai alat analisis dan pendekatan dalam riset untuk berbagai problem sosial. Bank Dunia misalnya, untuk menganalisis problem kemiskinan, pembangunan, serta perkembangan ekonomi, guna menyesuaikan dengan program-program tersebut, menggunakan teori modal sosial.

Pada tahun 2012, *World Bank Institute* melalui Nora Dudwick, dkk. menjelaskan tentang metode analisis modal sosial dalam berbagai konteks dengan menggunakan penelitian model kualitatif.<sup>6</sup> Dudwick, dkk. Memberikan enam dimensi sebagai alat analisis dalam penelitian modal sosial yang bersifat kualitatif:

Dimensi 1: *Groups and networks* (Grup dan Jaringan)

Dimensi 2: *Trust and solidarity* (Kepercayaan dan Solidaritas)

Dimensi 3: *Collective action and cooperation* (Aksi Kolektif dan Kerja sama)

Dimensi 4: *Information and communication* (Informasi dan Komunikasi)

Dimensi 5: *Social cohesion and inclusion* (Kohesi Sosial dan Inklusi)

Dimensi 6: *Empowerment and political action* (Pemberdayaan dan Tindakan Politik).<sup>7</sup>

Kemudian Cristian Grootaert dan Thierry van Bastelaer (ed.) yang mempublikasikan berbagai metode riset dengan kerangka modal sosial dalam *Understanding and Measuring Social Capital*.<sup>8</sup>

Adapun buku ini akan mengkaji tentang sumber modal sosial dalam pendidikan madrasah yang difatarbelakangi oleh anomali yang terjadi, baik dalam skala global maupun nasional. Dalam skala global, penulis merujuk pada Paulo Freire (cendekiawan Katolik Brazil yang terkenal dengan paradigma pendidikan pembebasan), yang menjelaskan tentang dampak industri terhadap pendidikan. Secara faktual, industri telah

5 Ketiga aspek tersebut akan dijelaskan secara detail pada pembahasan selanjutnya dalam buku ini.

6 Nora Dudwick, Kathleen Kuehnast, Veronica Nyhan Jones, dan Michael Woolcock, *Analyzing Social Capital In Context: A Guide to Using Qualitative Methods and Data*. [Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, 2006]. Tulisan dapat diakses di situs: [[http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/Analyzing\\_Social\\_Capital\\_in\\_Context-.pdf](http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/Analyzing_Social_Capital_in_Context-.pdf)]

7 *Ibid.*

8 Cristian Grootaert dan Thierry van Bastelaer (ed.), *Understanding and Measuring Social Capital* [Washington, USA: The World Bank, 2012].

berhasil meningkatkan standar hidup, tetapi ia juga telah menempatkan manusia pada posisi tercabut dari akar kemanusiaannya. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menempatkan manusia pada posisi sentral dalam setiap perubahan yang terjadi dan mampu pula mengarahkan serta mengendalikan perubahan tersebut.<sup>9</sup>

Bahaya pencerabutan eksistensi yang dikemukakan oleh Freire itu merupakan indikasi pelemahan aspek fundamental dalam modal sosial yaitu manusia. Pada saat fungsi kemanusiaan kemudian tidak lagi sentral berarti sumber utama modal sosial dapat dikatakan telah memudar. Karena manusia di dalam modal sosial merupakan aktor perekat (kohesi) yang menciptakan tiga komponen sumber modal sosial (jaringan, kepercayaan dan norma).

Dalam skala nasional, pasca krisis moneter 1997 yang berdampak pada krisis multidimensi telah menciptakan berbagai krisis yang juga mengarah pada pencerabutan aspek-aspek kemanusiaan. Tragedi kerusuhan 1998<sup>10</sup> dan berbagai krisis sosial serta melenturnya rasa toleransi antar-etnis merupakan bukti bahwa krisis kepercayaan antara komponen sosial benar-benar terjadi.

Kondisi seperti ini bila dibiarkan akan berakibat terjadinya konflik horizontal yang mengerikan. Upaya untuk mengembalikan krisis kepercayaan tersebut, menurut Syaukani, hanya melalui pendidikan yang baik dan berkualitas. Pendidikan seperti ini adalah prasyarat mutlak untuk mengembalikan kondisi Indonesia menjadi seperti yang diidealkan.<sup>11</sup> Pada sisi lain, krisis ekonomi yang telah meruntuhkan pemerintahan Orde Baru dan berganti era reformasi yang telah melahirkan berbagai regulasi pendidikan yang sering berubah-ubah dan terkadang menimbulkan banyak persoalan, seperti UN (Ujian Nasional) yang sering menuai kontroversi di setiap penyelenggaraannya, serta kebijakan kurikulum yang terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan "proyek".<sup>12</sup>

9 Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, terj. Alois A. Nugroho (Jakarta: Gramedia, 1984), 34.

10 Krisis 1998 merupakan kekerasan yang dipicu oleh penembakan misterius yang menimbulkan 4 (empat) korban jiwa yaitu: Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie pada demonstrasi 12 Mei 1998 di kampus Tri Sakti Jakarta. Kemudian berbagai fasilitas perkantoran, dan toko-toko dibakar oleh massa, bahkan terjadi pula tindakan anarkisme dengan latar etnis. Lihat Bacharuddin Jusuf Habibie, *Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi* (Jakarta: THC Mandiri, 2006), 12-14.

11 Syaukani, *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 12-13.

12 Menurut penulis, kata proyek di sini terasa tendesius namun fakta Kurikulum 2013 yang gagal

Model Ujian Nasional dengan hanya mengujikan beberapa mata pelajaran berimplikasi pada terjadinya dilema bagi penyelenggara pendidikan, antara meneguhkan idealisme atau bersikap pragmatis dalam menentukan pertimbangan penguasaan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, afektif, dan psikomotorik. Banyak tujuan yang dikejar oleh pendidik dan peserta didik pada penguasaan kompetensi pada wilayah kognitif, terutama untuk mata pelajaran yang diujikan.<sup>13</sup> Sehingga, pendidikan hanya melahirkan manusia pintar namun banyak yang tidak memiliki karakter yang berbudi luhur dan memahami perilaku etis.

Secara politis, pemerintah telah melakukan tiga langkah untuk memperbaiki mutu pendidikan. Perbaikan sarana prasarana, fisik dan non fisik, perbaikan finansial, serta perbaikan sumber daya manusia (guru, kepala sekolah, dan masyarakat).<sup>14</sup> Namun perbaikan-perbaikan tersebut, termasuk sistem dan regulasi pendidikan nasional, masih dianggap belum memenuhi amanat UUD 45 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,<sup>15</sup> di mana pendidikan sebagai media menciptakan manusia paripurna yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Soyomukti mensinyalir bahwa masih terdapat lembaga pendidikan yang secara tidak langsung menciptakan reproduksi kelas sosial, yaitu pendidikan elit dan nonelit atau pendidikan negeri-swasta, yang keduanya memunculkan imajinasi kelas di masyarakat. Kelas sosial yang elit selalu dianggap mudah untuk mendapatkan segala kebutuhan operasional pendidikannya. Sementara kelas pendidikan nonelit selalu dianggap kelas pinggiran yang sulit untuk memenuhi kebutuhan mendasar pendidikannya (*food, shelter, clothes*).<sup>16</sup> Jika dianalisis, maka berbagai persoalan pendidikan tersebut tidak lain merupakan dampak dari interpretasi “modal” yang ditanamkan dalam lembaga pendidikan

---

dilaksanakan merupakan bukti awal desain kurikulum yang tidak didasarkan pada riset akademik dan riset sosial sebagai kebutuhan nasional tidak hanya lembaga pendidikan tapi masyarakat.

13 Mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional, untuk tingkat SMA sebanyak 6 mapel, SMP sebanyak 4 dan SD sebanyak 3 mapel.

14 Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 76.

15 Sebagai indikatornya adalah tentang pemerataan pendidikan yang seharusnya membuka seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, masih timpang. Demikian juga masih tingginya angka putus sekolah yang pada tahun 2015-2016 mencapai angka 946.013. (Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2016).

16 Nurani Soyomukti, *Pendidikan Berspektif Globalisasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), 65.

yang tidak komprehensif antara modal dalam arti ekonomi, dengan modal dalam arti “nilai” dalam pandangan lembaga pendidikan dan penggunaannya (*use*).

Berbagai peningkatan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagian besar hanya terjadi pada sekolah-sekolah negeri. Pemenuhan kebutuhan sekolah negeri tidak terbatas pada sumber daya manusia, melainkan juga seluruh kebutuhan yang terkait dengan fasilitas yang memadai. Kondisi demikian sangat mudah menciptakan kepercayaan masyarakat (modal sosial) untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.<sup>17</sup>

Berbeda dengan di sekolah negeri, kepercayaan masyarakat yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur tidak mudah diciptakan pada sekolah atau madrasah swasta. Syafaruddin mengatakan bahwa kelancaran pelaksanaan pendidikan di madrasah sangat tergantung pada manajemen madrasah yang menjadi tanggung-jawab kepala madrasah bekerja sama dengan semua personil serta kelompok terkait (*stakeholders*) dalam memajukan madrasah sehingga benar-benar pendidikannya berbasis masyarakat.<sup>18</sup>

Sebagaimana Freire, madrasah sebagai lembaga pendidikan juga sebagai lembaga pembebasan masyarakat dari kebodohan dalam arti dunia dan akhirat.<sup>19</sup> Oleh karenanya, dalam madrasah terdapat materi pendidikan berimbang antara materi umum dan materi agama yang sangat berperan dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan beragama. Apalagi, madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan jumlahnya sangat besar. Data dari Direktorat Pendidikan Madrasah Pendis menunjukkan bahwa statistik jumlah madrasah Ibtidaiyah pada tahun 2012-2013 adalah:

---

17 Sekolah-sekolah negeri pada saat penerimaan siswa baru selalu dibanjiri oleh calon siswa baru. Hal ini terjadi karena pola pikir masyarakat yang masih mengidolakan sekolah negeri daripada swasta. Suyanto dan M5 Abbas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 94.

18 Sayafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 209.

19 Baca tulisan Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan", dalam Ahmad Syafi'i Ma'arif, dkk., *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 21-22.

Tabel 1.1.  
Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Berdasarkan Akreditasi

Tahun	Jumlah	Terakreditasi			Tidak Terakreditasi
		A	B	C	
2012-2013	22.253	2.175	16.229	2.811	2.724

Sumber: Emis-Pendis *(online)*, Direktorat Pendidikan Madrasah, 2014

Sedangkan jumlah madrasah di Kabupaten Purbalingga sebanyak 180. Madrasah tersebut berada di bawah ormas keagamaan, Kemenag dan yayasan keluarga. Dari seratus delapan puluh madrasah 75 % sudah terakreditasi B. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut.

Tabel 1.2.  
Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Purbalingga  
Berdasar Akreditasinya Tahun 2015

Nama MI	Jumlah	Nilai Akreditasi			Belum Terakreditasi
		A	B	C	
Ma'arif	96	6	79	2	9
Muhammadiyah	74	10	52	3	9
MIN	3	2	1	-	-
Lainnya	7	1	4	1	1
Jumlah	180	19	136	6	19

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari jumlah 22.253, hanya 2.724 yang tidak atau belum terakreditasi. Sedangkan pada tabel 1.2 memperlihatkan kondisi yang lebih baik, karena hanya 14 persen madrasah yang masih terakreditasi C dan belum terakreditasi. Kondisi ini tidak harus diartikan bahwa madrasah sudah berada dalam posisi ideal. Dari aspek penyelenggaraan pendidikan, masih banyak madrasah yang masih memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur kurang berkualitas, bantuan pemerintah yang sangat minim, serta minat masyarakat yang lebih memilih sekolah umum dan negeri dibanding madrasah.

Di luar kondisi madrasah yang masih jauh dari ideal di atas, terdapat beberapa madrasah yang mampu menunjukkan daya saingnya dengan sekolah-sekolah nonmadrasah, bahkan yang negeri. Madrasah-madrasah ini banyak diminati oleh masyarakat, memiliki tenaga pendidik yang kompeten, serta mendapat banyak prestasi. Madrasah tersebut dapat

mengelola sumber sosial dengan baik, dan dapat menciptakan nilai yang mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, menjaga jaringan dengan berbagai pihak, dan sebagainya. Madrasah swasta dengan kondisi tidak banyak mendapat bantuan dari pemerintah dan tenaga pendidiknya bukan pegawai negeri sipil (PNS), tetapi dapat menciptakan kemajuan dan kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi indikasi bahwa madrasah tersebut dapat menciptakan dan membangun modal sosial.

Zubaidi melihat bahwa urgensi penelitian madrasah dari sisi modal sosial dapat menjawab setidaknya tiga persoalan, yaitu:

*Pertama*, *human capital* dan *financial capital* yang selama ini dimiliki, tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dirujuk pada hasil laporan *Human Resources Index* yang menyebutkan bahwa indeks pendidikan di Indonesia menurun dari 109 ke 112 (pada tahun 2003).<sup>20</sup> Bahkan pada tahun 2010, peringkat itu turun kembali menjadi 124. Penurunan ini diakibatkan oleh minimal 2 faktor; kebijakan dan minim menefadani negara yang sukses di bidang ini.<sup>21</sup>

Menurut penulis, jika penelitian tersebut diteruskan sampai pada konteks pembangunan manusia yang berkelanjutan, maka *trend* penurunan indeks pendidikan di Indonesia masih terjadi hingga tahun 2013. Berdasarkan data UNDP (*United Nations Development Programme*), pada tahun 2013, *Human Development Index* (HDI) Indonesia masih termasuk kategori level menengah (*medium human development*) pada urutan 108 dari 187 negara. Indonesia masih di bawah Palestina (107), Mongolia (103), dan Maladewa (102), dan jauh dari Malaysia (62), bahkan dari negara konflik Libia (52). Dari beberapa aspek tersebut menunjukkan sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia masih belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>22</sup> Padahal, prestasi peningkatan dan pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh prestasi pendidikan suatu negara.

*Kedua*, kemampuan negara untuk membantu melalui *financial* dan *human capital* semakin terbatas. Bantuan keuangan negara kepada insititusi

---

20 Zubaidi, *Strategi dan Program Pengembangan Madrasah dalam Era Otonomi Daerah*, [Semarang: Penelitian IAIN Walisongo, 2002], 43.

21 Raihan Iskandar, "Merosotnya Dunia Pendidikan" *Republika* [Jakarta: 11 Januari 2012] atau lihat [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

22 UNDP, "Table 2: Human Development Index trends, 1990-2013", 2014, [<http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1990-2013>], diakses tanggal 12 Agustus 2015.

pendidikan semakin dikurangi, dan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat untuk membantunya. Demikian juga kemampuan negara untuk membantu meningkatkan kualitas SDM juga semakin terbatas karena kemampuan keuangan yang terbatas pula. Untuk menggandeng pihak swasta terlibat di dalam pengeloaan madrasah juga tidak mudah. Sebab pihak swasta biasanya lebih mempertimbangkan aspek untung dan rugi, karenanya mereka lebih tertarik berinvestasi di dalam pengelolaan sekolah daripada madrasah. *Ketiga*, potensi *social capital* di madrasah sebagian besar belum diketofa dengan baik. Pengelola madrasah lebih mengutamakan *financial* dan *human capital* daripada *social capital*.<sup>23</sup>

Tidak sedikit para ahli pendidikan yang mengatakan bahwa faktor yang mepengaruhi keberhasilan pendidikan atau pengelolaan sekolah/madrasah terletak pada modal yang bersifat kasat mata (*tangible*), sumber daya manusia, sarana prasarana, kurikulum, guru, metode, biaya, dan lainnya.<sup>24</sup> Padahal ada faktor yang tidak kasat mata (*intangible*) seperti faktor alam dan sosial yang bisa jadi lebih ampuh dibanding faktor yang bersifat *tangible*. Faktor sosial yang kemudian lebih dikenal dengan modal sosial memang masih kurang menjadi perhatian serius dalam pengelolaan sekolah atau madrasah.

Di antara sedikit madrasah yang berhasil mengembangkan faktor sosial atau modal sosial sehingga tercipta sekolah yang mapan dan kemudian mampu memeliharanya dengan baik adalah Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas (MI Istiqomah Sambas), Purbalingga Jawa Tengah.<sup>25</sup> MI Istiqomah Sambas yang berdiri pada tahun 2000 dalam perkembangannya telah berhasil menciptakan prestasi akademik yang sangat bagus. Banyak prestasi yang telah diraih oleh Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas baik dalam skala regional ataupun nasional. Prestasi yang diraih oleh MI Istiqomah Sambas meliputi berbagai sumber daya yang dimiliki baik akademik maupun non-akademik, seperti prestasi siswa, guru teladan, sampai kelembagaan sebagai sekolah teladan. Secara kelembagaan, MI Istiqomah Sambas juga telah memperoleh sertifikat

---

23 Zubaidi, *Strategi dan Program*, 43.

24 Anonim, "Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Madrasah", *Majalah Abdimadrasah*, [www.abdimadrasah.com](http://www.abdimadrasah.com), 08 Agustus 2015.

25 Nama Sambas tidak terkait dengan nama lain yang serupa, seperti nama daerah Sambas di Kalimantan Barat, atau jasa Photocopy Sambas di Yogyakarta. Nama Sambas merupakan kependekan dari Suchari Adi Mulyono Banyumas Asli. Suchari Adi Mulyono merupakan penggagas dan sekaligus pendiri Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Purbalingga.

ISO 2000.<sup>26</sup> Ini berarti MI Istiqomah Sambas memiliki kemampuan manajerial berstandar internasional.<sup>27</sup>

\*\*\*\*

---

26 ISO (*International Organization for Standardization*) berdiri pada tahun 1947 merupakan badan penetap standar internasional yang terdiri wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara.

27 Observasi tanggal 13 Juni 2014.



## 2

# MADRASAH DAN MODAL SOSIAL



Madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang usianya sudah tidak bisa dianggap muda lagi ternyata dalam perkembangannya masih belum begitu memuaskan. Jumlah madrasah ibtidaiyah yang mencapai 24.560, yang terdiri atas 1.686 negeri dan 22.874 swasta, merupakan aset pendidikan yang tidak bisa dianggap remeh. Sayangnya, dari jumlah tersebut ternyata masih ada 2.811 madrasah dengan nilai akreditasi C dan bahkan sebanyak 2.724<sup>1</sup> belum terakreditasi. Fenomena ini merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa madrasah masih membutuhkan penanganan lebih serius.

Kondisi tersebut sudah barang tentu bukan merupakan sesuatu yang konstan, tanpa progres. Upaya untuk memajukan madrasah tidak henti-hentinya dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Namun, ikhtiar untuk memajukan madrasah tersebut sering kali melupakan faktor yang kurang diperhitungkan oleh masyarakat. Tampaknya, masyarakat lebih tertarik membahas fasilitas atau modal fisik (*tar.gible*), ketimbang faktor atau modal yang nonfisik, *intar.gible* untuk memajukan madrasah tersebut. Berikut ini akan dibahas madrasah dan modal nonfisik, yang dalam buku ini disebut sebagai modal sosial.

### A. MADRASAH

Kata *madrasah* merupakan bahasa Arab yang berasal dari akar kata *darasa*. Ia juga dapat diturunkan menjadi kata *midras* yang bermakna

1 Sumber: Data Pendis 2014.

buku yang dipelajari atau tempat belajar, dan kata *al-midrās* dapat diartikan sebagai rumah untuk mempelajari kitab Taurat.<sup>2</sup> Sedangkan, *madrasah* bermakna, secara harfiah, tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran.<sup>3</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Madrasah berarti Sekolah atau Perguruan yang biasanya berdasarkan pada agama Islam.<sup>4</sup>

Meskipun jika dilihat dari kegiatan belajar mengajarnya atau intrakurikuleranya, *madrasah* memang tidak jauh berbeda dengan sekolah, namun dalam konteks Indonesia, madrasah tidak seta merta dipahami begitu saja sebagai sekolah, melainkan mendapat label “sekolah agama”, yakni tempat anak-anak memperoleh pembelajaran hal-hal ilmu agama dan keagamaan, dalam hal ini agama Islam.<sup>5</sup> Memang dalam praktiknya, ada madrasah yang di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (*al-‘ulum al-dinīyah*), juga mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya, ada pula madrasah yang mengkhususkan diri daripada pelajaran ilmu-ilmu agama yang kemudian sering dinamakan *madrasah dinīyah*.

Realitas bahwa kata madrasah yang berasal dari bahasa Arab tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami *madrasah* sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu tempat untuk belajar agama atau tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan. Selanjutnya, George Makdisi mengemukakan bahwa terjemahan kata *madrasah* dapat disimpulkan dengan tiga perbedaan mendasar, yaitu: *Pertama*, kata universitas dalam pengertian paling awal, merujuk pada sebuah komunitas atau kelompok sarjana dan mahasiswa. *Kedua*, merujuk pada sebuah bangunan tempat kegiatan pendidikan setelah pendidikan dasar berlangsung. *Ketiga*, izin mengajar (ijazah *al-tadris*, *licentia docendi*) pada madrasah oleh *ya‘īsh* secara personal tanpa ada kaitannya dengan pemerintahan.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, hal yang masih berkaitan dengan penggunaan istilah *madrasah* yang merujuk pada lembaga pendidikan

2 Abu Luwis al-Yasū‘ī, *al-Murjūd fī al-Lughah wa al-Murjūd fī al-‘Alam* (Beirut: Dar al-Masyrik, tt.), 221.

3 Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam, Edisi Indonesia* (Surabaya: Risalah Gusti: 1996), 66.

4 Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 694.

5 H.A. Malik Fajar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: LP3NI, 1998), 111.

6 George Makdisi, *The Rise of College: Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), 19.

mempunyai beberapa pengertian, di antaranya adalah: aliran, mazhab, kelompok atau golongan filosof dan ahli fikir tertentu pada metode dan pemikiran yang sama. Munculnya pengertian ini seiring dengan perkembangan *madrasah* sebagai lembaga pendidikan yang di antaranya menjadi lembaga yang menganut dan mengembangkan pandangan atau aliran dan mazhab pemikiran.<sup>7</sup>

Secara historis, pertumbuhan madrasah dalam dunia Islam melewati tiga tahap, yaitu (1) Tahap Masjid, (2) Tahap Masjid *Khan*, dan (3) Tahap Madrasah. Tahap masjid berlangsung utamanya pada masa abad kedelapan dan sembilan. Masjid yang dimaksud adalah, dalam konteks ini, masjid yang selain digunakan sebagai tempat salat berjamaah juga digunakan sebagai majlis taklim. Tahap kedua adalah lembaga pendidikan *Khan*, yakni masjid yang dilengkapi dengan bangunan *Khan* (asrama atau pondokan yang menyatu dengan masjid). Ada perbedaan bila dibandingkan dengan masjid *Khan*, karena tersedianya pondok. Tahap ini mencapai puncak perkembangannya pada abad ke 10. Sedangkan tahap ketiga adalah madrasah yang khusus diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dan pada tahap ini telah berhasil mengintegrasikan dengan tahap pertama dan kedua dengan terus mengalami perubahan dan perkembangan.

Jika disimak perkembangan madrasah tersebut, ada dua faktor yang mempengaruhinya. Pertama, perhatian dan peran aktif penguasa yang memiliki andil cukup besar bagi perkembangan dan kemajuannya. Kedua, perhatian yang besar dari para dermawan, saudagar, ulama, dan elemen masyarakat lainnya. Tidak sedikit dari mereka yang mendirikan madrasah dengan model dan standar yang relatif sama dengan madrasah yang didirikan oleh para penguasa pada zamannya.

Sebagaimana dimaklumi, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berasal dari masjid dengan bentuk halaqah-halaqahnya. Ketika halaqah tersebut semakin banyak, maka menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang beribadah.<sup>8</sup> Karena semakin banyak orang Islam yang tertarik menuntut ilmu, sehingga membuat masjid penuh sesak untuk menampung murid-murid yang belajar, sehingga menjadi dorongan untuk membentuk lembaga pendidikan baru. Kemudian

7 Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos tt.) 117-1.

8 Ahmad Salabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, terjemahan oleh Mughtar Jahya dan Sanusi Latif (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 106

dibangunlah pemondokan yang menyatu dengan masjid atau *Khan*, di dalamnya ada kamar untuk guru dan murid dan juga aula besar.<sup>9</sup>

Seiring dengan waktu, perkembangan madrasah mencapai puncaknya pada masa *Nizamiyah* di Bagdad. Namun, sebelumnya telah berdiri empat madrasah besar di Nishapur, yakni madrasah Baihaqiyyah, madrasah Assa'diyah, madrasah Abu Sa'ad al-Astariyah, dan Madrasah yang didirikan oleh Abu Ishaq al-Isfarayani.<sup>10</sup> Pada masa itu, Nizamiyah merupakan lembaga pendidikan yang paling masyhur.

Nizamiyah juga dikenal sebagai lembaga yang pertama menerapkan sistem yang mendekati dengan sistem pendidikan yang dikenal sekarang ini. Kurikulum utama adalah al-Quran, sastra Arab dan berhitung, dengan menitikberatkan pada mazhab Syafi'i. Sistem pembelajarannya menggunakan klasikal, guru menjelaskan materi di depan kelas, sedangkan murid duduk di belakang, setelah itu dilakukan dialog. Madrasah Nizamiyah ini maju karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Di antara guru-guru masyhur yang mengajar di madrasah ini adalah; Syekh Abu Ishaq asy-Syirazi as-Sabbagh; Syekh Abu Nasr at-Tabari; Abu Muhammad sy-Syirazi; Abu Qasim al-Atawi; al-Tibrizi; al-Qazwini; al-Fairuzabadi; Imam al-Haramain Abdul Ma'ali al-Juwani; Imam al-Ghazali.<sup>11</sup>

Madrasah Nizamiyah mempunyai karakteristik tertentu, keterlibatan Imam Haramain di madrasah tersebut menandakan bahwa ajaran Ashariyah diajarkan. Selain itu, Imam al-Ghozali menekankan akan pentingnya kewajiban mencari ilmu. Hal ini dikarenakan beliau sedang mengajar di madrasah tersebut dan mengalamatkannya kepada para muridnya. Sedangkan ilmu-ilmu yang harus dipelajari adalah tauhid dan cabang-cabangnya, seperti *Ushul Fiqh*, ilmu al-Quran, Hadis Nabi, Akhlaq, dan nahwu, saraf, adab sebagai pelengkapannya.

Cabang ilmu yang dipelajari, dapat disimpulkan bahwa kurikulum madrasah Nizamiyah lebih memfokuskan pada bidang Fiqh. Pendidikan yang episentrumnya fiqh menjadi ciri khas dan menonjol pada pendidikan Sunni abad ke 11, dan hal ini berfangsung selama berabad-abad. Jadi tidaklah berlebihan, madrasah Nizamiyah benar-benar menjadi model pendidikan Islam pada masa klasik dan pertengahan, termasuk di Indonesia.

9 George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), 27-28

10 Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 25.

11 M. Faruqi, *The Development of the Institutions of Madrasa and the Nizamiyya at Bagdad*, *Islamic Studies*, (musim gugur, 1987), 67.

Membingcangkan madrasah di Indonesia, tidak bisa dilepas-pisahkan dengan pesantren sebagai cikal bakalnya. Dengan kata lain madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari pesantren. Nurkholis Majid menjelaskan bahwa lembaga pendidikan yang serupa pesantren sudah ada sejak pemerintahan Hindu-Budha, sehingga Islam tinggal melanjutkan lembaga yang sudah ada itu.<sup>12</sup> Sebagai konsekuensi logisnya, pesantren awalnya kental dengan muatan mistis dan pada gilirannya kemudian berubah menjadi tasawuf. Muatan tasawuf memang menjadi dominan pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia, karena hanya dengan pendekatan budayalah Islam di Indonesia menjadi mudah diterima dan dianut.

Kemudian, pada awal abad 20 M, lembaga pendidikan berangsur berkembang dengan pola pembelajaran ala *madrasa* yang dikemudian hari dikenal dengan istilah madrasah. Karena itu, sejak awal munculnya madrasah di Indonesia sudah mengadopsi sistem sekolah modern dengan ciri-ciri : digunakan sistem kelas, pengelompokan pelajaran, penggunaan bangku, dan dimasukkannya pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulumnya.<sup>13</sup>

Di sisi lain, Deliar Noor berpendapat bahwa pertumbuhan madrasah di Indonesia juga merupakan respon dan bagian dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang memiliki hubungan langsung dengan gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah. Pembaharuan tersebut direspon oleh organisasi keislaman yang ada di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera.<sup>14</sup>

Kebijakan pemerintah Belanda yang membuka Sekolah Dasar secara *massal* berdampak pada pesantren, surau, dan masjid. Ketiga lembaga ini seperti mendapat saingan berat dan nyata, apalagi pendidikan yang diadakan di Sekolah Dasar tidak sekedar memberikan keterampilan riil, tapi juga lapangan pekerjaan meski masih pada taraf rendah. Pada tahun 1914, Belanda mengubah dari semacam lembaga kursus menjadi sekolahan dan juga sekaligus membuka sekolah lanjutan, siswa yang sudah lulus dari HIS bisa melanjutkan ke MULO dan AMS. Sekolah inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya SD, SMP, dan SMA. Kondisi seperti ini juga ikut memperkuat kesadaran para pemimpin organisasi gerakan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jamiat Khaer, Persatuan Islam, al-

12 Nurkholis Majid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 3.

13 Hanun Asrorah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 193.

14 Lebih jelas mengenai asal usul gerakan pembaharuan Islam dan perkembangannya di Indonesia, lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1995).

Irsyad, al-Washilah, Perti, dan yang lain membentuk devisi yang khusus mengurus pendidikan Islam.<sup>15</sup>

Oleh karenanya, studi madrasah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pesantren. Perkembangan madrasah sangat meletak dengan keberadaan pondok pesantren. Madrasah merupakan perkembangan lanjut dari pesantren yang mempunyai unsur masjid, asrama, dan kelas belajar.

Jika merujuk pada teori Dhofier mengenai pesantren, dijelaskan bahwa pesantren memiliki beberapa elemen, yaitu: pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab klasik, santri dan kyai.<sup>16</sup> Memperkuat teori ini, Mastuhu menjelaskan bahwa sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama para pelakunya. Kerja sama antar-pelaku ini didasari, dijiwai, digerakkan, digairahkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh mereka. Unsur-unsur sistem pendidikan selain terdiri atas para pelaku yang merupakan unsur *organik*, juga terdiri dari unsur-unsur *anorganik*, seperti: dana, sarana dan alat-alat pendidikan lainnya. Hubungan antara nilai-nilai dan unsur-unsur dalam sistem pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>17</sup>

Secara historis, di Indonesia terdapat beberapa madrasah yang menjadi pelopor, baik di wilayah Jawa maupun Sumatera, yaitu Adabiyah School (1909) dan Diniyah School Labai al-Yunusiy (1915) di Sumatera Barat, Madrasah Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta, Madrasah Tsywiq Thulab di Jawa Tengah, Madrasah Jamiat Khaer di Jakarta dan Madrasah Mambaul Ulum di Surakarta.<sup>18</sup>

Setelah Indonesia merdeka, perkembangan madrasah tidak selalu berjalan baik. Perkembangannya senantiasa berkelindan dengan kondisi politik yang sedang berlangsung. Pada tahun 1972 muncul kebijakan yang kontroversial yaitu lahirnya Keppres No. 34/1972 tentang penyatuan pendidikan agama ke dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keppres ini kemudian menuai kritik tajam yang akhirnya diubah dengan

15 Haidar Putra Daulay, "Pesantren, Sekolah dan Madrasah (Tinjauan dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam)," *Disertasi* (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991), 226.

16 Zamakhsyari Dofier, *Traaisi Pesantren*, Cet. Ke-6 (Jakarta: LP3E5, 1994), 44-60.

17 Lihat Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Cet. Ke-1 (Jakarta: INIS, 1994).

18 Catatan penting adalah Madrasah Mambaul Ulum merupakan satu-satunya madrasah yang dibiayai oleh Kraton Surakarta. Ini bukti mendasar, sebelum kemerdekaan sudah ada madrasah yang dibiayai oleh pemerintah. Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah* (Jakarta: LP3E5, 1984), 53.

terbitnya Surat Keputusan Tiga Menteri. Isi pokok SKB Tiga Menteri tersebut adalah madrasah disejajarkan dengan sekolah umum. Namun komposisi kurikulum madrasah mempunyai perbandingan 70% materi umum, dan 30% materi agama.

Keberadaan UU. No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan ruang dan posisi lebih baik terhadap madrasah. Dalam UU. Sisdiknas tersebut, madrasah didefinisikan sebagai “sekolah umum berciri khas Islam”. Di sini, kedudukan dan posisi madrasah menjadi semakin kuat dan kokoh dari sisi legalitas dan pengakuan hukumnya. Tidak ada lagi dikotomi antara sekolah umum dan madrasah.

Dengan posisi madrasah yang semakin kuat dalam sistem pendidikan di Indonesia, maka madrasah dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsekuensinya, ia tidak dapat dilepaskan dari isu utama manajemen berbasis sekolah (*School Based Management*). Tuntutan ini tidak hanya ditujukan kepada pengelola madrasah, tetapi juga melibatkan seluruh stakeholder penyelenggara pendidikan (pemerintah dan masyarakat). Dalam konteks bahasa kekuasaan, harus ada harmoni antara pusat dan daerah. Penerjemahan “otonomisasi” harus selalu mengedepankan rasa keadilan, tanpa mengabaikan semangat untuk membangun kemandirian.<sup>19</sup>

Dalam konteks sebagai lembaga/ institusi nirlaba, madrasah tentu berbeda dengan lembaga nirlaba seperti perusahaan atau badan usaha. Jika untuk mengembangkan diri, lembaga-lembaga nirlaba ditopang oleh modal ekonomi berupa uang atau aset finansial, maka madrasah, untuk mengembangkan diri membutuhkan modal berupa aset sosial. Modal/ aset sosial ini bisa dalam bentuk jaringan, kepercayaan, maupun norma, yang jika dikelola secara maksimal, akan berdampak sangat baik bagi perkembangan dan kemajuan madrasah.

## B. MODAL SOSIAL

### 1. *Pengertian dan Perkembangan Modal Sosial*

Modal atau *capital* (Inggris) dalam beberapa pengertian lebih banyak mengandung arti modal dalam konteks ekonomi. Seperti istilah *capital gains* yang mempunyai makna perolehan modal. Penjualan aktiva dengan harga

---

19 Rodney T. Ogawa dan Paula A. White, “School Based Management: An Overview”, dalam Allan Odden (ed.), *School Based Management: Organizing For High Performance* (San Francisco: Jossey Bass Publishers, 1994), 57.

pembeliannya. Istilah yang sepadan adalah *capital goods* (barang-barang modal) yaitu benda atau barang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain atau untuk menghasilkan jasa-jasa pelayanan.<sup>20</sup>

Bambang Riyanto menjelaskan modal adalah kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Posisi modal itu sendiri berada di neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud barang-barang modal adalah barang-barang dalam perusahaan yang belum digunakan dan terdapat di neraca sebelah debit.<sup>21</sup>

Sedangkan *social* berakar dari kata *socius* (Yunani) berarti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat.<sup>22</sup> Mengenai hal ini, Field menjelaskan bahwa seluruh diskusi tentang teori modal sosial selalu akan dimulai dengan kontribusi pemikiran tokoh Pierre Bourdieu, James Coleman dan Robert Putnam. Dari ketiganya, Bourdieu dan Coleman dianggap sebagai yang masih original pemikirannya.<sup>23</sup>

Menurut Bourdieu, modal dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu: modal ekonomi yang bisa langsung dikonversi menjadi uang dan dilembagakan dalam bentuk hak milik; modal budaya yang memungkinkan dikonversi menjadi modal ekonomi dan dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan; dan modal sosial, terdiri dari kewajiban sosial yang dapat dikonversi menjadi modal ekonomi dan dilembagakan dalam bentuk gelar bangsawan.<sup>24</sup>

Selanjutnya, Field menjelaskan bahwa konsep Bourdieu tersebut dipublikasikan pertama kalinya pada tahun 1973. Menurut Field, Bourdieu telah mengembangkan konsep modal sosial yang berorientasi pada usaha menekan sumber daya yang digunakan oleh orang untuk mengamankan keuntungan dari kedudukan yang dimiliki.<sup>25</sup> Pendapat inilah yang menurut Field disebut sebagai "original".

---

20 Ahmad Anoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi* (ttp.: Gitamedia Press, 2003), 59.

21 Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1997), 18.

22 Abdusyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remadja Karya, 1987), 1. Lihat juga Metta Spencer dan Inkeles Alex, *Foundations of Modern Sociology* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1982), 4. Lihat juga Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 19.

23 John Field, *Social Capital And Lifelong Learning* (Bristol, UK: The Policy Press University of Bristol, 2005), 19.

24 Bourdieu, *The Forms Of Capital*, 243. Max Stepherson dan Alnoor Ebrahim, "Trust, Social Capital", 5.

25 Field, *Social Capital*, 20.

Adapun Coleman, yang berlatarbelakang investigator pada dunia pendidikan, dianggap mampu mendeskripsikan tentang modal sosial secara cermat. Bagaimana tidak, Coleman dapat menjelaskan bahwa modal sosial bisa memberikan keuntungan yang nyata bagi masyarakat miskin dan pinggiran.<sup>26</sup> Dalam hal ini, Coleman berusaha memadukan antara teori dalam ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi tentang Sumber Daya Manusia (*human capital*) yang dipraktikkan pada ilmu ekonomi dan digunakan untuk studi pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.<sup>27</sup>

*Social capital* dalam bahasa Indonesia secara umum telah diserap menjadi “modal sosial”, namun ada pula yang mengartikan dengan “kapital sosial”. Dalam perkembangan, jika *social* dan *capital* diartikan sebagai kesatuan, maka berdampak pada munculnya beragam penjelasan dari berbagai pakar ilmu sosial.

Francis Fukuyama mendefinisikan bahwa *social capital* adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian tertentu darinya. *Social capital* dapat dilembagakan dalam kelompok paling kecil sampai kelompok paling besar, seperti negara atau antar-negara.<sup>28</sup> Lebih jauh, dalam tulisan lain, Fukuyama mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadi kerja sama di antara mereka.<sup>29</sup>

Modal Sosial dalam pengertian singkat dapat dilihat pada publikasi OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*),<sup>30</sup> yaitu:

*Social capital as networks together with shared norms, values and understandings that facilitate co-operation within or among groups.*<sup>31</sup>

---

26 *Ibid.*, 23.

27 Pemikiran Coleman ini nampaknya banyak dipengaruhi oleh Gary Becker. Lihat *ibid.*

28 Francis Fukuyama, *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, terj.: Ruslani (Yogyakarta: Qalam, 1995), 37.

29 Francis Fukuyama, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, terj.: Mohammad Husein Amrullah (Yogyakarta: Qalam, 1992), xii.

30 OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) merupakan organisasi internasional dengan 30 negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Berawal tahun 1948 dengan nama Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Eropa (*OEEC/Organisation for European Economic Co-operation*), dipimpin oleh Robert Marjolin dari Perancis, untuk rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II. Kemudian, sejak tahun 1961, dibentuk kembali menjadi OECD dengan menambah keanggotaan dari non negara-negara Eropa.

31 *OECD Insights: Human Capital (online)*, “What is social capital?”, 103, atau dapat diakses pada (<http://www.oecd.org/insights/37966934.pdf>).

(Modal sosial adalah jaringan yang didasari oleh norma-norma, nilai-nilai dan pemahaman bersama yang memfasilitasi kerjasama dalam atau di antara kelompok-kelompok).

Dari pengertian yang dikembangkan oleh OECD sangat jelas bahwa modal sosial sebagai jaringan merupakan bagian yang dapat dikembangkan bersama dengan norma, nilai-nilai, dan pemahaman yang memungkinkan terjadinya kerja sama dalam atau di antara kelompok.

Hartmut Esser menjelaskan modal sosial dalam dua pengertian, yaitu: sangat khusus dan sangat umum (*generalizable*). Pengertian pertama, menjelaskan bahwa modal dipahami sebagai investasi/ saham (*stock*) yang dimiliki oleh pelaku ekonomi. Dengan demikian, modal sosial hanya dipahami sebagai modal ekonomi murni (investasi), atau modal dalam arti sumber daya manusia (*human capital*). Dalam istilah yang lain modal sumber daya manusia sering juga disebut dengan modal simbolik atau modal budaya (*cultural/ symbolic capital*).

Pengertian kedua (modal sosial dalam pengertian umum) mencakup semua bentuk modal, yang kemudian dipahami dengan modal uang (*financial fortune*). Dalam hal ini, modal adalah sesuatu yang “bernilai” untuk menciptakan eksistensi dalam lingkungan seperti bahasa atau budaya.<sup>32</sup>

Moyers dkk. membagi teori tentang modal sosial ke dalam dua aliran. *Pertama*, aliran berdimensi “struktural” yang dikembangkan oleh Bourdieu (1986) dan Coleman (1988). *Kedua*, aliran berdimensi “budaya” yang telah dikembangkan oleh Putnam (1993).<sup>33</sup>

Bourdieu menjelaskan:

*Capital social is the aggregate of the actual or potential resources that are linked with the possession of a enduring network of relations more or less institutionalized of knowledge and mutual recognition, in other words, with the belonging to a group that gives to every member the support of Social Capital acquired.*<sup>34</sup>

(Modal sosial adalah kumpulan sumber aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan dan relasi yang kuat, minimal berupa pengetahuan yang telah difembagikan (formal), dan adanya

32 Hartmut Esser, "The Two Capital Meaning of Social Capital", dalam Dario Castiglione, et. al., *The Handbook of Social Capital* (Oxford, New York: Oxford University Press, 2008), 23.

33 Carlos German Palafox Moyers, et.al., "The Social Capital as an Element of Development", dalam *International Journal of Operations and Logistics Management*, Volume 3, Maret 2014, 82, atau dapat diakses pada ([www.abcsonline.org/journals](http://www.abcsonline.org/journals)).

34 *Ibid.*, 82.

sikap saling menghargai, atau dengan menjadi anggota suatu kelompok yang memberikan dukungan modal kapital yang dimiliki kepada setiap anggota).

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa modal sosial merupakan kumpulan dari sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan yang kuat (*enduring network*) serta relasi yang lebih tentang pengetahuan dan pengakuan yang saling menguntungkan (*mutual recognition*). Dengan kata lain, hubungan yang dimiliki oleh sumber daya potensial adalah jika memiliki hubungan dengan pemilik kelompok yang dapat memberikan suatu “akuisisi modal sosial” dan pesan yang tersampaikan kepada setiap anggotanya.

Tokoh lain yang menyatakan bahwa Bourdieu merupakan orang pertama yang secara sistematis mendefinisikan modal sosial adalah Torche (New York University dan Pontificia Universidad Catolica de Chile) dan Valenzuela (Pontificia Universidad Catolica de Chile). Menurut keduanya, Bourdieu memandang capital sosial sebagai:

*The aggregate of actual or potential resources linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition, in other words, to membership in a group.*<sup>35</sup>

(Kumpulan sumber aktual atau potensial terkait dengan kepemilikan jaringan yang kuat, paling tidak hubungan saling mengenal dan memahami yang terlembagakan terhadap keanggotaan dalam satu kelompok).

Cara pandang Bourdieu yang dikembangkan oleh Torche dan Valenzuela adalah dalam modal sosial yang mencakup suatu jaringan keanggotaan atas suatu kelompok. Sehingga, dalam penelitian modal sosial, jaringan untuk peningkatan keanggotaan (*membership*) menjadi sangat penting dan merupakan dasar yang representatif.

Selain Bourdieu, tokoh lain yang dianggap sebagai pelopor studi tentang modal sosial adalah Putnam.<sup>36</sup> Putnam menjelaskan:

---

35 Bourdieu, "The Forms of Capital", 248. Florencia Torche dan Eduardo Valenzuela, "Trust and Reciprocity: A Theoretical Distinction Of The Sources Of Social Capital", dalam *European Journal of Social Theory (online)*, 14 (2), 2011, 183, atau dapat diakses pada ([https://files.nyu.edu/ft237/public/torche & valenzuela11\\_reciprocity\\_trust.pdf](https://files.nyu.edu/ft237/public/torche%20&%20valenzuela11_reciprocity_trust.pdf))

36 Robert David Putnam adalah ilmuwan politik dan Profesor Kebijakan Publik di Universitas Harvard John F. Kennedy School of Government, USA. Putnam mengembangkan teori permainan dua tingkat berpengaruh yang mengasumsikan perjanjian internasional hanya akan berhasil ditengahi jika mereka juga memberi manfaat dalam negeri. Putnam juga terlibat dalam sebuah studi komprehensif

*Social capital refers to features of social organization, such as networks, norms, and trust, that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit. Social capital enhances the benefits of investment in physical and human capital.*<sup>37</sup>

(Modal sosial mempunyai ciri-ciri sebagaimana organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan, yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan. Modal sosial meningkatkan manfaat dari investasi yang berupa modal fisik dan sumber daya manusia).

Dari definisi ini, Putnam ingin menyatakan bahwa kepercayaan (*trust*), jaringan (*network*) dan *civil society* adalah sesuatu yang lahir dari adanya modal sosial dan bukan merupakan modal sosial itu sendiri. Pemahaman seperti ini akhirnya banyak dikutip oleh beberapa pakar, salah satunya adalah Carlos German yang mendefinisikan, *The social capital is directed to subjective events, values and attitudes whose central focus is the generalize trust.*<sup>38</sup>

Menurut German, Putnam merupakan pakar yang berkontribusi besar terhadap pengembangan teori modal sosial yang mencakup suatu sistem kepercayaan, norma timbal balik, jaringan, serta didukung oleh pemerintah (politik). Putnam mampu menjelaskan suatu fakta berdasarkan hasil penelitiannya di Italia yang menunjukkan bukti empiris tentang hubungan-hubungan dalam tiga aspek dalam modal sosial.<sup>39</sup>

Kelebihan dari teori yang dikembangkan Putnam adalah proses riset yang mendasarinya yang kemudian dikembangkan secara akademis-ilmiah sehingga mampu berkontribusi besar terhadap paradigma modal sosial. Hal ini terbukti dengan adanya data empiris tentang hubungan yang terjadi antara komponen modal sosial, sistem kepercayaan, norma-norma *res proscitas* dan jaringan, serta kebijakan (performa) pemerintah yang tinggi.

Menurut Loury, sebagaimana dikutip oleh Coleman, "modal sosial adalah kumpulan sumber yang melekat dalam relasi keluarga dan organisasi sosial yang bermanfaat untuk perkembangan kognitif serta sosial anak-

---

tentang hubungan antara trust [kepercayaan] dalam masyarakat dan keragaman etnis. Putnam menjelaskan orang dari semua ras, jenis kelamin, status sosioekonomi, manusia sebagai "hunkering down", menghindari keterlibatan dengan masyarakat.

37 Robert D. Putnam, "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life", dalam *The American Prospect*, No. 13, [Spring, 1993] (<http://epn.org/prospect/13/13putn.html>).

38 Carlos German, et al., *The Social Capital*, 82. Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* [Princeton: Princeton University Press, 1993], 76.

39 Carlos German, et. al., *The Social Capital*, 82.

anak atau pemuda. Sumber-sumber ini berbeda untuk orang yang berbeda dan dapat memberikan keuntungan penting untuk perkembangan modal manusia".<sup>40</sup>

Selain Bordieu dan Putnam, tokoh yang karyanya banyak membahas tentang modal sosial serta sering dijadikan referensi oleh para ahli adalah Coleman. Menurut Coleman, modal sosial didefinisikan sebagai sumber penting bagi para individu yang bisa sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak demi mencapai kualitas hidup yang mereka harapkan.<sup>41</sup> Selanjutnya, Coleman juga menggambarkan bahwa modal sosial memudahkan pencapaian tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya atau dapat dicapai hanya dengan kerugian yang lebih tinggi.

Dengan demikian, modal sosial tercipta ketika adanya relasi antara orang-orang mengalami perubahan sesuai dengan cara-cara yang memudahkan tindakan.<sup>42</sup> Modal sosial tidak berwujud, sama seperti modal manusia. Keterampilan dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang merupakan perwujudan modal manusia. Dalam modal sosial, perwujudannya dapat dibangun melalui relasi di antara orang-orang.

Dalam perkembangannya, teori tentang modal sosial tidak hanya menjadi monopoli pemikiran Bordieu, Putnam, dan Coleman. Ada banyak tokoh lain yang mencoba menjelaskan tentang modal sosial, di antaranya adalah R.S. Burt yang mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya bagi kekuatan ekonomi tetapi juga pada setiap aspek eksistensi sosial yang lain.<sup>43</sup>

Eva Cox mengartikan modal sosial sebagai rangkaian proses hubungan antar-manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan keefektifan koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.<sup>44</sup>

---

40 J.S. Coleman, "Social Capital in the Creation of Human Capital", dalam *American Journal of Sociology*, 2009, 415.

41 J.S. Coleman, *Social Capital in the Creation of Human Capital* (Cambridge Mass: Harvard University Press, 1999), 438.

42 *Ibid.*, 45.

43 R.S. Burt, "Expert From the Social Structure of Competition", dalam *Structure Holes: The Social Structure of Competition* (Cambridge, MA and London: Harvard University, 2009), 3.

44 Eva Cox, *A Truly Civil Society* (Sidney: ABC Book, 2009), 3.

Selanjutnya, Cohen dan Prusak L. menjelaskan modal sosial sebagai setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif.<sup>45</sup>

Senada dengan Cohen dan Prusak L., Hasbullah menjelaskan bahwa modal sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur-unsur utamanya seperti *trust* (rasa saling mempercayai), timbal-balikan, dan aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat.<sup>46</sup>

## 2. *Karakteristik Modal Sosial*

### a. *Modal Sosial Mengikat (Bonding Social Capital)*

Modal sosial mengikat adalah modal sosial yang dasar-dasarnya cenderung bersifat eksklusif.<sup>47</sup> Karakteristik dasar yang melekat pada modal sosial mengikat adalah lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*), sedikit berorientasi keluar (*outward looking*). Ragam masyarakat yang menjadi anggota kelompok pada modal sosial mengikat dikenal sebagai *sacred socie'y*.<sup>48</sup> Jika merujuk pada konsep Putnam, maka umumnya mereka bersifat *homogenius* (cenderung homogen).<sup>49</sup>

Ikatan (*bonding*) pada masyarakat *sacred socie'y* dapat berbentuk dogma tertentu yang mendominasi serta mempertahankan struktur masyarakat yang *totalitarian*, *hierarchial*, dan tertutup. Pola interaksi sosial sehari-hari selalu dituntun oleh nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan level hierarki tertentu dan feodal.

Hasbullah menjelaskan, pada masyarakat yang *bonding* atau *inward looking*, meskipun hubungan sosial yang tercipta memiliki tingkat kohesivitas yang kuat, akan tetapi kurang merefleksikan kemampuan masyarakat tersebut untuk menciptakan dan memiliki

---

45 S. Cohen Prusak L., *In Good Company: How Social Capital Makes Organization Work* (London: Harvard Business Press, 2001), 22.

46 Joisairi Hasbullah, *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia* (Jakarta: MR-United Press, 2006), 35.

47 *Ibid.*, 39.

48 *Ibid.*, 39.

49 Robert D. Putnam, *Making Democracy* 98.

modal sosial yang kuat. Kekuatan yang tumbuh sekedar dalam batas kelompok dan keadaan tertentu, struktur hierarki feodal, kohesifitas yang bersifat *bonding*, atau hanya karena ikatan.<sup>50</sup> Sejalan dengan itu, Woolcock dari Brown University Providence menyatakan bahwa pada pola yang berbentuk *bonding* atau *exclusive* pada umumnya nuansa hubungan yang terbentuk mengarah ke pola *inward looking*. Sedangkan pada pola yang berbentuk *bridging* atau *inclusive* lebih mengarah ke pola *outward looking*.<sup>51</sup>

Ada beberapa kelemahan modal sosial dengan tipe terikat ini. Salah satunya adalah adanya kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya penurunan keanggotaan dalam perkumpulan atau asosiasi, penurunan ikatan kohesifitas kelompok, terbatasnya jaringan-jaringan sosial yang dapat diciptakan, menurunnya saling mempercayai, serta hancurnya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang pada suatu entitas sosial.

Apabila seluruh anggota kelompok masyarakat berasal dari suku yang sama, maka yang menjadi fokus perhatian adalah pada upaya menjaga nilai-nilai yang turun temurun yang telah diakui dan dijalankan sebagai bagian dari tata perilaku (*code conduct*) dan tata aturan (*code of ethics*). Mereka lebih konservatif dan mengutamakan *solidarity making* daripada hal-hal yang lebih nyata untuk membangun diri dan kelompok masyarakatnya sesuai dengan tuntutan nilai-nilai dan norma-norma yang lebih terbuka.

Jalinan kohesivitas kultural yang tercipta belum tentu merefleksikan modal sosial dalam arti luas (beberapa dimensi). Karena ide dan nilai-nilai dalam masyarakat dibentuk oleh pengalaman kultural. Pada sisi yang lain, masyarakat yang kuat dalam kelas sosial atau kepentingan, sering menggunakan kekerasan simbolik untuk memaksa masyarakat yang berada di bawah garisnya. Kondisi ini dapat berpengaruh negatif terhadap kekuatan interaksi sosial, karena akan menimbulkan kekuatan yang cenderung untuk menjauh, menghindar, bahkan pada situasi yang ekstrim menimbulkan kebencian terhadap masyarakat lain di luar

---

50 Hasbullah, *Sosial Kapital*, 90.

51 Michael Woolcock, *Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework: Theory and Society* (Kluwer Academic Publishers: Printed in the Netherlands, 1998), 152., atau dapat diakses di ([http://www.davidmlast.org/POE320-2012/9\\_files/woolcock,%20social%20capital,%202000.pdf](http://www.davidmlast.org/POE320-2012/9_files/woolcock,%20social%20capital,%202000.pdf)).

kelompok, group, asosiasi, atau sukunya. Dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah munculnya sikap fanatik terhadap golongan atau kelompoknya sendiri yang tercermin dalam perilaku defensif dan bahkan menolak apapun yang datang dari luar.

Sebenarnya, pada masyarakat tradisional yang *social'y inward looking*, telah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial. Hanya saja, kekuatan dari modal sosial ini terbatas pada dimensi kohesifitas kelompok, yaitu pada faktor keeratn hubungan emosional ke dalam yang sangat kuat. Konsekuensi dari sifat dan tipologi ketertutupan sosial semacam ini adalah terjadinya kesulitan untuk mengembangkan ide baru, orientasi baru, dan nilai-nilai serta norma baru yang memperkaya nilai-nilai dan norma yang telah ada. Kelompok *bonding social capital* yang terbentuk pada akhirnya memiliki resistensi kuat terhadap perubahan.

Menurut Talcott Parsons, masyarakat mengalami perkembangan menuju masyarakat transisional. Masyarakat akan berkembang melalui tiga tingkatan utama yaitu: *primitif*, *intermediat*, dan *modern*. Dari tiga tahapan ini, Parsons mengembangkan lagi menjadi subklasifikasi evolusi sosial sehingga menjadi 5 (lima) tingkatan yaitu: *primitif*, *advanced primitive and archaic*, *histories intermediate*, *seedbed societies* dan *modern societies*. Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur sub-sistem utama yaitu: kultural (pendidikan), kehakiman (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan ekonomi (adaptasi).<sup>52</sup>

Teknologi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam perubahan sosial. Tokoh yang memiliki pandangan seperti ini adalah Thorstein Veblen. Menurut Veblen, teknologilah yang mewarnai tatanan sistem sosial. Karena itu, ia mengajukan preposisi bahwa perilaku manusia mencerminkan perkembangan teknologi dan ekonominya. Statemen Veblen ini secara implisit mengisyaratkan bahwa ada kemampuan teknologis dalam mempengaruhi perilaku manusia.<sup>53</sup> Dalam kontek dunia modern dengan era digitalnya seperti sekarang ini, pendapat Veblen, menurut hemat penulis, sangat perlu dikembangkan.

---

52 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Cet ke 1 (Jakarta: Prenada Media, 2004), 350.

53 *Ibid.*, 359.

Kohesivitas sosial atau kekuatan hubungan masyarakat untuk berkumpul tidak lagi diartikan secara fisik, tapi dibentuk dalam group-group sosial di dunia maya, dunia android, internet atau *daring* (dalam jaringan). Kohesifitas semacam ini ternyata mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat untuk mengegolkan agenda-agenda tertentu. Bahkan sering terjadi komunitas ini terbentuk dalam waktu yang relatif singkat.

Teknologi internet yang pada awalnya sebagai pengembangan perangkat *hardware* dan *software* yang lebih bersifat akademik (untuk pengembangan pendidikan) dan bisnis (untuk kewirausahaan), kini telah berkembang menjadi sesuatu yang mempunyai kekuatan sosial. Jaringan-jaringan group sosial melalui teknologi media telah membentuk jaringan sosial lintas negara dalam berbagai bentuk komunitas, tidak terkendali, dan bergerak menabrak berbagai dimensi kultur masyarakat.

Masyarakat yang terlibat dalam group media sosial, misalnya, menjadikan mereka sebagai kelompok sosial yang inklusif maupun eksklusif.<sup>54</sup> Bahkan tidak jarang empati lahir dari jaringan dan kepercayaan melalui media sosial. Beberapa contoh pernah terjadi di Indonesia dalam kasus “pengumpulan 1000 uang koin” untuk kasus putusan perdata Pengadilan Tinggi Banten 2 Desember 2009 yang menetapkan Prita harus membayar 204 juta rupiah kepada penggugat yaitu Rumah Sakit Omni Internasional Serpong, Tangerang. Karena keputusan hakim yang dipandang tidak mencerminkan keadilan, kemudian muncul ide pengumpulan koin yang digagas oleh Yusro sebagai dana keadilan untuk Prita. Proses transformasi ide hingga terlaksananya pengumpulan koin ini menggunakan jejaring sosial sebagai piranti kesuksesannya.<sup>55</sup>

#### b. *Modal Sosial Penghubung (Bridging Social Capital)*

*Bridging Social Capital* (modal sosial penghubung) dijelaskan oleh Paxton sebagaimana dikutip oleh Larissa dkk., adalah hubungan

---

54 Jaringan kelompok sosial lewat media sosial yang bersifat inklusif bisa terjadi karena para anggotanya yang terdiri atas berbagai latar belakang yang berbeda baik suku, ras, agama, profesi, ideologi dan kepercayaan namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Sementara itu, jaringan lewat media sosial yang bersifat eksklusif para anggota bersifat tertutup atau tertentu, seperti grup *whatsapp* Ikatan Alumni UIN Suka, IKA IAIN Purwokerto, dan sebagainya.

55 Diolah oleh penulis dari berbagai sumber media. Data mudah ditemukan karena kasus Prita menjadi kasus nasional.

lintas sektoral. *Bridging Social Capital* terjadi ketika anggota salah satu kelompok terhubung dengan anggota kelompok lain untuk mencari akses atau mendukung untuk mendapatkan informasi.<sup>56</sup>

Hasbullah menjelaskan bahwa bentuk modal sosial yang menjembatani atau yang menghubungkan ini, biasa disebut sebagai bentuk yang modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi, atau masyarakat. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut didasarkan pada prinsip-prinsip universal yaitu: a. persamaan, b. kebebasan, serta c. nilai-nilai kemajemukan dan humanitarian (kemanusiaan, terbuka, dan mandiri).<sup>57</sup>

Pada Prinsip persamaan tercermin bahwa setiap anggota dalam suatu kelompok masyarakat memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Pimpinan kelompok masyarakat hanya menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan, sehingga setiap keputusan kelompok berdasarkan kesepakatan yang egaliter dari setiap anggota kelompok. Dalam hal ini, pemimpin tidak lebih dari sekedar seorang konduktor yang irama dan lagunya telah disepakati bersama. Pola ini sangat berbeda dari model kepemimpinan tradisional yang bersifat vertikal.

Prinsip kebebasan, berarti setiap anggota kelompok bebas berbicara, mengemukakan pendapat dan ide yang dapat mengembangkan kelompok tersebut. Iklim kebebasan yang tercipta memungkinkan ide-ide kreatif muncul dari dalam (kelompok), yaitu dari beragam pikiran anggotanya yang kelak akan memperkaya ide-ide kolektif yang tumbuh dalam kelompok tersebut. Kebebasan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab, masih dalam koridor tertentu, dan bukan kebebasan yang bersifat mutlak.

Prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, group, kelompok, atau suatu masyarakat adalah kemajemukan dan humanitarian atau nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain, kehendak kuat untuk membantu orang lain, merasakan penderitaan orang lain, berempati terhadap situasi yang

---

56 Larissa Larsen, et. al., "Bonding and Bridging, Understanding the Relationship between Social Capital and Civic Action", dalam *Journal of Planning Education and Research*, Association of Collegiate Schools of Planning, 2004, hlm. 66. Larsen mengutip dari P. Paxton, "Is social capital declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment", dalam *American Journal of Sociology*, 1999, 105.

57 Hasbullah, *Sosial Kapital*, 87.

dihadapi orang lain, dan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan syarat adanya masyarakat yang bertumpu pada *bridging social capital*. Masyarakat ini biasanya heterogen, terdiri dari beragam unsur, latar belakang, budaya, dan suku. Setiap anggota kelompok memiliki akses yang sama untuk membuat jaringan atau koneksi keluar kelompoknya dengan prinsip persamaan, kemanusiaan, dan kebebasan yang dimiliki.

*Bridging social capital* akan membuka jalan untuk lebih cepat berkembang dengan kemampuan menciptakan *networking* yang kuat, menggerakkan identitas yang lebih luas dan timbal-balik yang lebih variatif, serta akumulasi ide yang lebih memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang lebih diterima secara universal.

Menurut Coleman, sebagaimana dikutip J. Hasbullah, tipologi masyarakat *bridging social capital* dalam gerakannya dapat dibedakan menjadi beberapa dimensi, yaitu: *pertama, fight for*, yaitu gerakan yang mengarah kepada pencarian jawaban bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok. Pada situasi tertentu penyelesaian ini mencakup problem di dalam kelompok atau problem yang terjadi di luar kelompok. Kebersamaan dalam memecahkan masalah untuk tujuan tertentu ini merupakan kekuatan yang bisa “menghipnotis” kelompok lain.

*Kedua, fight against*, yaitu suatu gerakan yang bersifat memberi perlawanan terhadap ancaman yang dapat meruntuhkan berbagai simbol dan kepercayaan tradisional yang dianut. Pada kelompok masyarakat yang demikian, perilaku kelompok yang dominan adalah sekedar *sense of solidarity* (rasa solidier). Hal ini sangat berbeda dengan kelompok tradisional yang memiliki pola hubungan antar-anggota berbentuk pola vertikal. Anggota yang berada di piramida atas memiliki kewenangan dan hak-hak yang lebih besar dalam pengambilan keputusan maupun dalam memperoleh kesempatan dan keuntungan ekonomi.

*Ketiga, outward looking*, yaitu suatu pandangan yang bersifat terbuka dan senantiasa mengikuti perkembangan dunia di luar kelompok masyarakatnya. Rasa kemajemukan merupakan kesadaran yang kuat, bahwa hidup dengan beragam suku, warna kulit, dan cara hidup merupakan bagian dari kekayaan manusia.<sup>58</sup>

---

58 *Ibid.*, 87.

Hasbullah menjelaskan, fakta yang ada di negara-negara berkembang menunjukkan kecenderungan bahwa dampak positif modal sosial dari mekanisme *outward looking* tidak berjalan secara ideal. Walaupun asosiasi yang dibangun oleh masyarakat dengan keanggotaannya yang heterogen dan dibentuk dengan fokus dan jiwa untuk mengatasi problem sosial ekonomi masyarakat, akan tetapi tidak mampu bekerja secara optimal.

Buruknya unsur-unsur penopang seperti *trust*, dan norma-norma yang telah mengafami kehancuran akibat represi rezim otoriter yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, modal sosial yang terbentuk pun menjadi kurang kuat. Akibatnya, tidak memiliki dampak yang signifikan bagi perbaikan kualitas hidup individu, maupun bagi perkembangan masyarakat dan bangsa secara lebih luas.

Analisis yang dijelaskan oleh Hasbullah, menurut penulis, nampaknya memiliki korelasi faktual dengan kondisi pemerintahan di Indonesia pada masa Orde Baru. Sebuah masa yang memiliki rezim otoriter, tidak terbuka, dan anti kritik. Potensi pembangunan atas kekayaan negara dikuasai oleh pihak yang dekat dengan kekuasaan. Basis-basis pembangunan yang berbasis sektor tradisional hanya menjadi subsistem yang tidak terperdayakan.

Albert Widjaja, menjelaskan bahwa Indonesia mewarisi ekonomi penjajah yang memelihara sistem ekonomi dualistis. Selain terdapat sektor modern yang berorientasi pada ekspor yang dikuasai oleh elit kota dan perusahaan asing, ada juga sektor tradisional yang berorientasi pada pertanian yang masih bersifat subsistem. Kekayaan alam (minyak, besi, timah, karet dan sebagainya) dieksplorasi untuk mempercepat modernisasi, sementara rakyat seolah dibiarkan berlama-lama dalam kemiskinan.<sup>59</sup> Dampak dari sistem sosial yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru tersebut melahirkan kemunduran *trust* warga sosialnya (*members of group*) yang terus menguat dan mendorong pada runtuhnya Orde Baru di tahun 1998.

### 3. *Sumber-Sumber Modal Sosial*

Sebelum penelitian yang dilakukan oleh Putnam, studi tentang modal sosial belum menemukan format dan terminologi yang terstruktur. Baru setelah Putnam meneliti tentang studi atas tradisi politik di Italia dan

59 Widjaja, *Budaya Politik*, 98. Lihat juga Joseph A. Faffaele, *The Economic Development of Nations* (New Random House, 1971), 203.

menerapkannya pada studi hubungan sosial di Amerika Serikat, hasilnya cukup mengejutkan, yaitu memperlihatkan bahwa orang Amerika secara perlahan telah memilih menarik dari kehidupan kewargaan.<sup>60</sup>

Putnam menjelaskan bahwa sumber-sumber atau komponen penting modal sosial yang satu sama lain saling terikat adalah jaringan, kepercayaan, dan norma. Tiga sumber tersebut telah menjadi pendapat utama dalam setiap studi tentang modal sosial, termasuk dalam penelitian ini.

#### a. Jaringan

*Networking* atau jaringan menurut Lawang berasal dari kata *net* (jaring) dan *work* (kerja). Ketika digabungkan, dua kata itu menjadi (*network*) yang maknanya ditekankan pada (*work*) kerja bukan pada (*net*) jaring, sehingga dapat dimengerti sebagai kerja (bekerja) dalam hubungan antar-simpul seperti halnya cara kerja jaring. Selanjutnya Lawang memberikan deskripsi tentang jaringan sebagai berikut:

- 1) Ikatan antar-simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan, di mana kepercayaan dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak.
- 2) Kerja antar-simpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan sosial menjadi satu kerja sama, bukan kerja bersama-sama.
- 3) Seperti jaring yang tidak putus, maka kerja yang terjalin antar-simpul itu pasti kuat menahan beban bersama.
- 4) Dalam kerja jaring terdapat ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikat yang kuat.
- 5) Ikatan atau pengikat (simpul) adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan mediana dapat dipelihara dan dipertahankan.<sup>61</sup>

Nan Lin menjelaskan bahwa jaringan-jaringan hubungan sosial antar-individu dalam modal sosial memberikan manfaat dalam konteks

---

60 Field, *Modal Sosial*, 6.

61 Robert M. Z. Lawang, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik, Suatu Pengantar* (Depok: FISIP UI Press, 2004), 50-51. Damsar dan Indrayati, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, cet. Ke-5 (Jakarta: Prenada, 2015), 157-158.

pengelolaan sumber daya milik bersama, karena ia mempermudah koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan yang bersifat “timbang balik”, sebagai salah satu elemen dari modal sosial. Jaringan sosial tersebut terjadi berkat adanya keterkaitan (*connectedness*) antara individu dan komunitas. Dalam kelompok sosial kapital yang formal seperti dalam lembaga pendidikan atau madrasah, jaringan sosial yang kuat antara sesama anggota dalam kelompok mutlak dipertukan dalam menjaga sinergi dan kekompakan. Selanjutnya, jaringan juga menyediakan kondisi yang diperlukan untuk akses dan penggunaan sumber daya yang tertanam.<sup>62</sup>

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerja sama antar-manusia. Jaringan tersebut akan menciptakan komunikasi dan interaksi, yang memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerja sama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain, kemudian membangun interrelasi yang kental, secara formal atau informal. Dalam jaringan sosial, setiap simpul tidak terikat ke setiap model lainnya.

Lebih jauh, Williams dan Durrance menjelaskan bahwa teori jaringan sosial sama dengan teori sosiologi yang didefinisikan sebagai masyarakat dibangun dari kelompok atau komunitas. Dalam modal sosial, jaringan dimulai bukan dari hubungan antar-individu, tapi model masyarakat merupakan jaringan yang terdiri atas hubungan atau ikatan antar-model. Terdapat empat prinsip dasar tambahan model yang dibangun dengan menggunakan teori jaringan sosial, yaitu: 1) kemandirian pelaku, 2) hubungan atau ikatan yang terdiri dalam aliran atau transfer sumber daya, 3) pembatas dan atau kemungkinan aktor individu dengan jaringan, serta 4) generasi hubungan dan jaringan dengan struktur sosial yang tahan lama.<sup>63</sup>

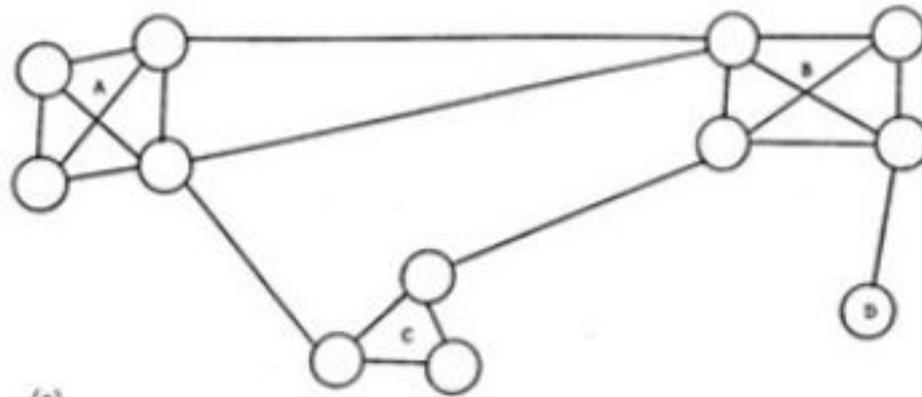
Williams dan Durrance mengilustrasikan model hubungan antara jaringan dalam pendekatan modal sosial dengan model hubungan sosiologis.

---

62 Nan Lin, “A Network Theory of Social Capital”, dalam Dario Castiglione, et. al., *The Hanabook*, 58.

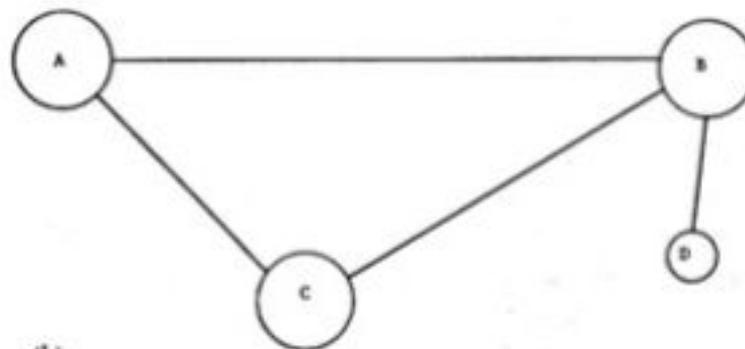
63 Kate Williams dan Joan C. Durrance, “Social Networks and Social Capital: Rethinking Theory in Community Informatics”, *The Journal of Community Informatics*, Volume 4, Nomor 3, 2008, 1.

Gambar 2.1.  
Pola Jaringan dalam Modal Sosial



Dalam jaringan sosial, setiap simpul tidak terikat ke setiap model lainnya. Hal ini menyebabkan setiap jaringan tertentu memiliki fitur tertentu pula. *Cluster* daerah terletak padat rajut yang banyak pelaku terikat satu sama lain, misalnya, keluarga. *Cluster* ini terhubung ke *cluster* lain melalui daerah dan terhubung oleh jaring yang kemudian membentuk apa yang disebut jembatan.

Gambar 2.2.  
Jaringan dalam Hubungan Sosial Biasa



Gambar itu menunjukkan bahwa jaringan dalam hubungan sosial biasanya melibatkan jaringan-jaringan *perindividu* tanpa melibatkan group sebagaimana pada modal sosial.

Jaringan-jaringan hubungan sosial antar-individu dalam modal sosial memberikan manfaat dalam konteks pengelolaan sumber daya milik bersama, karena ia mempermudah koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan yang bersifat “timbang balik”, sebagai salah satu elemen dari modal sosial. Jaringan sosial tersebut terjadi berkat adanya keterkaitan (*connectedness*) antara individu dan komunitas. Dalam kelompok sosial kapital yang formal seperti dalam lembaga

pendidikan atau madrasah, jaringan sosial yang kuat antar-sesama anggota dalam kelompok mutlak diperlukan dalam menjaga sinergi dan kekompakan.

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerja sama antar-manusia. Jaringan tersebut akan menciptakan komunikasi dan interaksi, yang memungkinkan tumbuh kepercayaan dan memperkuat kerja sama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain, kemudian membangun interrelasi yang kental, secara formal atau informal.

Dalam konteks madrasah/sekolah, pelibatan orang tua sebagai komponen jaringan juga mempunyai peran yang sangat penting. Di samping sebagai pilar utama eksistensi madrasah, keterlibatan orang tua dalam setiap kegiatan dapat berfungsi sebagai alat promosi sekolah dan sekaligus pendorong keberhasilan siswa.<sup>64</sup> Hal lain yang lebih penting adalah munculnya rasa memiliki terhadap sekolah/madrasah.

#### b. Kepercayaan

Kepercayaan atau *trust* (Inggris) dalam literatur ilmu sosiologi dijelaskan sebagai salah satu kepemilikan individu, hubungan sosial, atau sistem sosial, *with disproportionate attention to behavior based on actions at the individual level*.<sup>65</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan mempunyai beberapa arti yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memahami modal sosial, yaitu 1) anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata, 2) harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan), dan 3) orang yang dipercaya (diserahi sesuatu).<sup>66</sup>

Fukuyama menjelaskan bahwa kepercayaan muncul ketika sebuah komunitas saling berbagi serangkaian nilai-nilai moral untuk menciptakan perfaku yang wajar dan jujur.<sup>67</sup> Sedangkan Cox menjelaskan,

64 Lihat : Kent L. Tedin dan Gregory R. Weiher, "General Social Capital, Education-Related Social Capital and Choosing Charter School", *The Policy Studies Journal*, Vol. 39, No. 4, 2011. Artikel ini membahas tentang pengaruh pemilihan sekolah terhadap modal sosial kaitannya dengan sekolah. Orang tua yang memilihkan anaknya untuk belajar di sekolah tertentu, mereka mempunyai kepedulian yang tinggi dibanding dengan yang tidak memilihkannya.

65 Stephenson dan Ebrahim, *Trust, Social*, 14.

66 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 70.

67 Fukuyama, *Trust: Kebajikan Sosial*, 225.

*We expect others to manifest good will, we trust our fellow human beings. We tend to work cooperatively, to collaborate with others in collegial relationships.*<sup>68</sup>

(Kami mengharapkan orang lain menunjukkan niatan baik, kami mempercayai sesama anggota. Kita berkeinginan untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain dalam hubungan kolegal).

Penjelasan Cox tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan dapat dimulai dari suatu harapan terhadap orang lain tentang niat baik, sehingga timbul saling percaya antar-sesama manusia. Dari percaya tersebut maka dapat tercipta kerja sama, untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam hubungan kolegal. Lebih jauh, Cox menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan-aturan sosial cenderung bersifat positif; hubungan-hubungannya juga bersifat kerjasama.<sup>69</sup>

Stephenson dan Ebrahim menyatakan bahwa Coleman (1988) dan Putnam (1993) menjelaskan bahwa *trust* merupakan salah satu komponen kunci dalam modal sosial. Demikian juga menurut Fukuyama (1995), *trust* memainkan aturan penting dan sebagai fitur dasar dalam modal sosial. Oleh karenanya, modal sosial dapat lahir dari kemampuan yang timbul dalam kepercayaan masyarakat.<sup>70</sup> Bahkan menurut Francois (2003), kepercayaan dianggap sebagai komponen yang relevan secara ekonomi dari budaya masyarakat.<sup>71</sup>

Torche dan Valenzuela menjelaskan bahwa kepercayaan menyediakan strategi untuk menangani risiko interpersonal, terutama risiko yang muncul dari kebebasan orang lain. Dengan kata lain, kepercayaan menyediakan solusi untuk *problem of strangeness* (masalah yang asing). Karena faktanya, seseorang pasti dikelilingi oleh orang lain yang tidak berhubungan dengannya secara baik, terkadang permusuhan, sedangkan orang tersebut informasinya terbatas.<sup>72</sup>

---

68 Cox, *A Truly Civil Society* (Sydney: ABC Book, 1995), 5.

69 *Ibid.*, 321.

70 Stephenson dan Ebrahim, *Trust Social*, 19-20.

71 *Ibid.*

72 Florencia Torche dan Eduardo Valenzuela, "Trust and Reciprocity: A Theoretical Distinction Of The Sources Of Social Capital", dalam *European Journal of Social Theory (online)*, 14 (2), 2011, 186, atau dapat diakses pada ([https://files.nyu.edu/ft237/public/torche & valenzuela11\\_reciprocity\\_trust.pdf](https://files.nyu.edu/ft237/public/torche%20&%20valenzuela11_reciprocity_trust.pdf)).

Dalam kondisi atau fakta seperti ini, maka kepercayaan satu sama lain dalam sistem sosial merupakan suatu modal yang sangat fundamental.

Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik. Adanya modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh. Dengan begitu, modal sosial akan melahirkan kehidupan sosial yang harmonis. Sebaliknya, kerusakan modal sosial akan menimbulkan *anomie* dan perilaku anti sosial.

Dengan kata lain, kata kunci yang penting adalah *expectations* dan *theation of others*. Hal ini menggambarkan bahwa dalam konsep kepercayaan terdapat negosiasi antara harapan dan kenyataan yang diwujudkan oleh tindakan sosial individu-individu atau kelompok dalam kehidupan kemasyarakatan. Ketepatan antara harapan dan realisasi tindakan oleh individu atau kelompok dalam menyelesaikan amanah yang diembannya, dipahami sebagai tingkat kepercayaan.

Kepercayaan merupakan buah dari pengalaman para aktor masyarakat dalam menjalin interaksi sosial terkait dengan persoalan tertentu. Dalam interaksi ini, terdapat semacam hukum yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan akan tinggi jika penyimpangan antara harapan dengan realisasi tindakan sangat kecil. Sebaliknya, tingkat kepercayaan akan menjadi rendah bila harapan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi oleh realisasi tindakan sosial.<sup>73</sup> Konsep kepercayaan menempatkan terealisasinya harapan sebagai komponen yang menyatu dan mengakar dalam keseharian aktivitas sosial kemasyarakatan. Kenyataan ini menjadikan kepercayaan dikategorikan sebagai modal sosial.

Fukuyama membagi modal sosial menjadi tiga level, yaitu: level nilai, institusi, dan mekanisme. Sedangkan kepercayaan sendiri merupakan jiwa dari modal sosial. Posisi sentral kepercayaan ini akan mempengaruhi bangunan sosial suatu masyarakat, struktur sosial yang kuat (*high trust*) manakala kelembagaan *trust* terinternalisasi dengan kokoh, sebaliknya ikatan-ikatan konstruksi sosial akan melemah (*low trust socie'y*) ketika kepercayaan melemah.

---

73 Arya Hadi Dhamawan, "Kemiskinan Kepercayaan (*The Poverty of Trust*), Stok Modal Sosial dan Disintegasi Sosial", *Makalah Seminar* tidak diterbitkan (Bogor: Kongres Nasional IV Ikatan Sosiologi Indonesia, 2002), 4.

Lebih jauh Fukuyama juga membuat dikotomi antara masyarakat yang *high-trust* dan masyarakat yang *low-trust*.<sup>74</sup> Jenis pertama menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dan terus berkelanjutan di bawah otoritas politik yang didesentralisasi pada tahap *pramodern*. Masyarakat dengan tingkat *high-trust* bisa dilihat di Jepang, Jerman dan Amerika Serikat. Masyarakat di negara-negara ini mempunyai solidaritas komunal sangat tinggi yang mengakibatkan rakyat mereka mau bekerja mengikuti aturan, sehingga ikut memperkuat rasa kebersamaan.

Sementara itu, masyarakat jenis kedua (*low-trust*) lebih dianggap sebagai inferior dalam perilaku ekonomi. Contohnya adalah masyarakat di Cina, Korea, dan Italia. Senada dengan itu, Dharmawan menyatakan bahwa kepercayaan salah satu esensi atau pilar penting konsep modal sosial selain pilar lainnya: kerja sama dan norma sosial.<sup>75</sup> Dalam konteks relasi sosial-kemasyarakatan, kepercayaan mempunyai enam fungsi; yaitu:

1. Kepercayaan dalam arti *confidence*, yang bekerja pada ranah psikologis individual. Sikap ini akan mendorong orang berkeyakinan dalam mengambil satu keputusan setelah memperhitungkan resiko-resiko yang ada;
2. Kerja sama yang berarti pula sebagai proses sosial asosiatif di mana kepercayaan menjadi dasar terjalinnya hubungan-hubungan antar-individu tanpa dilatarbelakangi rasa saling curiga. Selanjutnya, kerja sama akan mendorong integrasi sosial yang tinggi;
3. Penyederhanaan pekerjaan, di mana kepercayaan membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja kelembagaan-kelembagaan sosial;
4. Ketertiban. Kepercayaan berfungsi sebagai *inducing behavior* setiap individu, yang ikut menciptakan suasana kedamaian dan meredam kemungkinan timbulnya kekacauan sosial yang teratur, tertib dan beradab;

---

74 Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity* (New York: Free Press Paperbacks, 1996), 361.

75 Dharmawan, *Kemiskinan Kepercayaan*, 8

5. Pemeliharaan kohesitas. Kepercayaan membantu merekatkan setiap komponen sosial yang hilang dalam sebuah komunitas menjadi kesatuan yang tidak tercerai-berai;
6. Modal sosial. Kepercayaan adalah aset penting dalam kehidupan kemasyarakatan yang menjamin struktur-struktur sosial secara utuh dan berfungsi secara operasional serta efisien.<sup>76</sup>

Keenam fungsi tersebut jika berhasil dijalankan dalam jaringan, akan membuat struktur jaringan dan aktor-aktornya memiliki kelembagaan *trust* yang tinggi, ikatan jaringan sosial yang kuat, penyelesaian beban kerja dalam jaringan semakin efektif dan efisien, menciptakan *sosial order* dalam jaringan, memelihara kohesivitas jaringan sosial, dan memiliki aset penting untuk menjaga keberlangsungan pola dan mekanisme jaringan.

Dengan kata lain, kepercayaan yang bersifat timbal balik antara seluruh komponen *stakeholders* jaringan akan menjadi modal yang penting dalam menumbuhkan partisipasi, kerja sama, bahkan kemitraan dalam perencanaan pembangunan. Tanpa adanya pola ini, masyarakat akan mengalami *distrust* atau *low-trust*. Pada gilirannya, masing-masing aktor masyarakat akan kehilangan legitimasinya dalam mewujudkan tertib sosial dalam masyarakat.

Sedangkan jika dilihat dari bentuknya, terdapat empat bentuk kepercayaan, yaitu: 1) kepercayaan berbasis tujuan, 2) kepercayaan berbasis perhitungan, 3) kepercayaan berbasis pengetahuan, dan 4) kepercayaan berbasis penghargaan.<sup>77</sup>

Kepercayaan berbasis tujuan muncul ketika dua orang mengira mereka memiliki tujuan yang sama. Dalam konteks hubungan berbasis tujuan ini, *trustors* memiliki sedikit minat dalam mempelajari tentang karakter atau keinginan dari mitra mereka, bahkan dapat saling mengidentifikasi. Setiap mitra mungkin mengharapkan dan bahkan meminta untuk mengorbankan segalanya demi tercapainya tujuan. *Trustees* dalam hal ini sering tergantung pada propaganda atau retorika besar. Keduanya sering mengartikan kepercayaan ini sebagai komponen afektif yang hebat.

---

76 *Ibid.*, 8

77 Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 55.

Model kedua adalah kepercayaan perhitungan yang meramalkan apa yang dilakukan mitra terpercaya dengan mencari bukti berupa hal-hal yang dapat dipercaya lainnya, misalnya apakah pihak lainnya memiliki sejarah menepati janji, mempunyai reputasi yang baik atau tidak. Pihak yang menjadi *trustor* memperhitungkan keuntungan dan kehandalan untuk kepercayaan. Jika keuntungan yang diperoleh melebihi biaya yang dikeluarkan, maka individu akan mempertanyakan pihak tersebut. Kepercayaan perhitungan ini biasanya bersifat kognitif dan konatif.

Model yang ketiga adalah kepercayaan yang berbasis pada pengetahuan yang muncul ketika orang saling mengenal satu sama lain atau saling berinteraksi, dan kepercayaan ini menjadi rusak manakala kedua belah pihak saling mencurigai. Dalam kasus ini, baik pihak yang dipercaya maupun yang mempercayai mungkin lebih memperhatikan tentang bagaimana memperoleh keuntungan. Hubungan ini bisa afektif dan juga kognitif.

Sedangkan kepercayaan berbasis penghargaan muncul dan dipaksakan ketika kedua pihak pada suatu hubungan mempunyai *love of virtue* yang sama dan kebijaksanaan serta bersedia melakukan dialog dengan tujuan agar lebih baik dalam memahami satu sama lain. Bentuk kepercayaan ini merupakan persahabatan di antara orang baik, saling menghormati satu sama lain dan tidak ingin saling mengeksploitasi.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kepercayaan memegang peran yang sangat penting, karena itu dibutuhkan strategi untuk mengembangkannya. Ada dua cara yang bisa ditempuh dalam pengembangan modal sosial kepercayaan ini. *Pertama*, dengan menerapkan sosialisasi untuk membangun jaringan sosial dan memperkuat kohesi sosial. Hal ini akan dapat terbangun manakala ada kepercayaan. *Kedua*, dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi yang memberikan peluang bagi seluruh *stakeholders* untuk mengawasi dan memverifikasi tindakan atau keputusan yang telah dibuat. Satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa kepercayaan bersifat dinamis, ia dapat tumbuh dan hilang bila mereka yang mendapat kepercayaan mampu atau tidak mampu bertanggungjawab (amanah) terhadap kepercayaan yang diberikan.

Dengan demikian, moralitas kepercayaan akan menjelma menjadi perilaku bersama (*collective behavior*) atau perilaku kolektif dari akumulasi interaksi aktor-aktor di jaringan. Bukan tidak mungkin, faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat bisa berkontribusi secara signifikan dalam membantu terciptanya kehidupan sosial dan integrasi sosial (*social order*).

Dalam kondisi seperti ini, interaksi harus didasari oleh adanya *trust* dalam struktur sosial. Harus ada kepercayaan yang bersifat timbal balik antara seluruh komponen *stakeholders* untuk bisa menjadi modal yang penting dalam menumbuhkan partisipasi, kerja sama, bahkan kemitraan *stakeholders* dan *networking* dalam mengatasi persoalan publik.

Kepercayaan tersebut akan lebih kuat lagi manakala difandasi dengan nilai-nilai agama atau institusi keagamaan yang telah terbagun di masyarakat. Institusi keagamaan tersebut dilakukan secara rutin dengan tanpa dilatarbelakangi oleh politik maupun persaingan ekonomi. Pernyataan ini didukung oleh temuan Coleman<sup>78</sup> yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh jemaat gereja mampu menumbuhkan *trust*, solidaritas dan kepedulian terhadap anggota jemaat lainnya. Bahkan, ketika gereja tidak punya dana untuk mengadakan kegiatan, para jemaat tersedia untuk mengadakan iuran.

### c. Norma

#### 1) Norma dalam Diskursus Filsafat

Menurut Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, norma adalah aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu.<sup>79</sup>

Dalam Dokumen Kotacat dijelaskan:

*Norms can be defined as attitude and behaviour common to members of a particular group, or what they believe is "normal". For example, most cultures require that people wear clothes. Some even have laws to enforce this dictum: in many western countries, a*

78 J.A. Coleman, "Religious Social Capital: Its Nature, Social Location, and Limits", *Religion as Social Capital*, (Waco: University Press), 2003, 31.

79 Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali, 1982), 31.

*naked person in public will be arrested with a charge of indecent exposure.*<sup>80</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa norma merupakan sikap dan perilaku umum untuk anggota tertentu dari suatu kelompok, atau yang mereka percayai sebagai sesuatu yang “normal”. Sebagai contoh, budaya yang mengharuskan orang memakai pakaian. Kemudian di beberapa negara, hal tersebut dijadikan sebagai hukum, sehingga orang tidak berpakaian di depan umum akan ditangkap dengan tuduhan melanggar norma karena tampilan yang tidak senonoh.

Dalam perkembangannya, norma dijadikan sebagai pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma tersebut dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional.

Dalam teori filsafat, norma, moral, dan etika merupakan sifat-sifat perilaku sosial yang mempunyai kesamaan. K. Bertens menjefaskan bahwa terkadang “etika” dijadikan sebagai sinonim dari “moral”. Artinya, kebaikan moral juga dapat disebut sebagai kebaikan etika, dan sandi-sandi moral (*codes of morality*) disebut juga dengan *ethical codes*.<sup>81</sup>

Moral secara etimologis merupakan akar kata dari bahasa Latin *moralis* (kata dasar *mos, moris*) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara, dan tingkah laku.<sup>82</sup> Dalam pemahaman yang lebih luas, moral adalah:

1. Berkaitan dengan aktivitas manusia yang dipandang baik dan buruk, benar dan salah, tepat dan tidak tepat;
2. Memiliki kepastian untuk diarahkan oleh kesadaran benar dan salah, dan kepastian untuk mempengaruhi yang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar/salah;

80 Kolacat Documen [online], *Norm and Value* ([http://www.kolacat.com/archive/005 Norms And Values.pdf](http://www.kolacat.com/archive/005%20Norms%20And%20Values.pdf)), diakses tanggal 5 April 2015.

81 K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 4.

82 Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 213. Moral juga dapat berarti *concerned with principles of right and wrong behavior, or standard of behavior*. Lihat Jonathan Crowther [ed.], *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford University Press, 1995), 755.

3. Menyangkut sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>83</sup>

Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, etika (*ethic*) dijelaskan sebagai *a system of moral principles or rules or behaviour*, atau suatu sistem, prinsip, aturan, atau cara berperilaku.<sup>84</sup> Pada halaman lain di buku yang sama ditulis, *moral as concerned with principles of right and wrong behaviour, or standard of behaviour*.<sup>85</sup>

Bila dijabarkan lebih jauh, maka moral bisa dipahami sebagai: a) Berkaitan dengan aktivitas manusia yang dipandang sebagai baik dan buruk, benar dan salah, tepat dan tidak tepat, b) Menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang diterima tentang apa yang dipandang baik (tindakan yang benar, adil, wajar), c) Memiliki kepastian untuk diarahkan oleh (dipengaruhi oleh) sebuah kesadaran benar dan salah, dan kepastian untuk mengarahkan (mempengaruhi) yang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar dan salah, d) Menyangkut sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>86</sup>

Sementara itu, Robby I. Chandra menjelaskan bahwa etika adalah suatu penilaian yang berkaitan dengan moral. Penilaian tersebut mengacu pada prinsip-prinsip; a) Hal-hal yang memiliki konsekuensi dalam perbaikan kesejahteraan manusia; b) Bertumpu pada sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang tidak berpihak atau imparsial, serta menghindari *self-interest*.<sup>87</sup>

Di Indonesia, norma banyak berkembang dalam berbagai aspek pengistilahan seperti norma hukum, norma masyarakat, norma agama, dan lain-lain. Sastrapratedja menjelaskan bahwa dari aspek etimologis, istilah moralitas dan etika mempunyai arti sama. Keduanya berarti kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Namun dalam lingkungan filsafat, seringkali moralitas diartikan sebagai norma dan perilaku faktual dalam masyarakat, yaitu anggapan mengenai perilaku yang baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi filsafati atas moralitas

83 Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat*, 213.

84 Crowther [ed.], *Oxford*, 393. Lihat juga *Sallim's Ninth Collegiate English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 2000), 511.

85 Crowther [ed.], *Oxford*, 755.

86 Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat*, 213.

87 Robby I. Chandra, *Etika Dunia Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 42.

tersebut. Etika membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang dihayati masyarakat; etika juga membantu manusia untuk merumuskan pedoman etis yang lebih kuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan, karena perubahan kondisi budaya dan masyarakat.<sup>88</sup>

## 2) Norma dalam Islam

Dalam Islam, norma atau etika sering dikaitkan dengan konsep akhlak. Al-Ghazali mendeskripsikan akhlak dengan suatu keadaan yang menetap di dalam jiwa yang darinya keluar perbuatan-perbuatan secara mudah dengan tidak lebih dahulu memerlukan pertimbangan dan pemikiran.<sup>89</sup> Selanjutnya al-Hufy menjelaskan bahwa akhlak adalah suatu kemauan yang kuat mengenai sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga ia menjadi kebiasaan dalam arti baik atau buruk.<sup>90</sup> Dengan demikian, akhlak merupakan sikap mental, atau watak, terjabarkan dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa.<sup>91</sup>

Rasulullah Saw. secara khusus pernah menegaskan bahwa akhlak adalah orientasi pokok dari misi kerisalahan yang beliau emban. Dalam sebuah hadis beliau bersabda:

انما بعثت لا تمم مكارم الاخلاق (الحديث)

*Artinya: "Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak".*

Hadits di atas menunjukkan bahwa akhlak dalam Islam diposisikan sebagai misi utama ajaran Nabi Muhammad Saw. Hal ini selaras dengan berbagai aspek yang terdapat dalam ajaran agama itu sendiri. Atas dasar itu pula, penulis memandang perlu untuk menyematkan penjelasan mengenai aspek-aspek yang terkait dengan agama sebagai piranti memahami konsep norma dalam ajaran Islam.

88 M. Sastrapratedja, *Pendidikan Sebagai Humanisasi* (Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, 2013), 135.

89 Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 8, 108.

90 Ahmad Muhammad al-Hufy, *Min Akhlaqin Nabi*, terj.: Masdar Helmy dan Abd. Khalik Anwar, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 13.

91 *Ibid.*, 108.

Dalam bahasa Arab, agama adalah terjemahan dari kata *al-milah*, atau yang lebih populer kata *ad-din*. Kata *ad-din* memiliki beberapa padanan kata seperti *al-mulk* (kerajaan), *al-khidmat* (pelayanan), *al-'izz* (kejayaan), *al-'adat* (kebiasaan), *al-'ibadah* (pengabdian), dan lain sebagainya.

Kata *ad-din* yang salah satu maknanya adalah agama, disebutkan sebanyak 92 kali dalam al-Qur'an.<sup>92</sup> Salah satu yang populer adalah QS. Ali Imrān (3) ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ.

*Arti ya: "Sesungguhnya ya agama di sisi Allah adalah Islam"*

Adapun kata "agama" dalam sudut pandang bahasa Indonesia, menurut Faisal Ismail sering merujuk pada bahasa sansekerta "a" dan "gama". Kata "a" berarti tidak dan "gama" berarti kacau, maka agama berarti yang "tidak kacau".<sup>93</sup> Dari makna kebahasaan ini, Faisal Ismail kemudian mendefinisikan agama sebagai peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti, dan pergaulan sesama.<sup>94</sup>

Dalam bahasa asing, agama adalah terjemahan dari kata *religion* (Inggris) dan *religie* (Belanda) yang keduanya bersumber dari *religion/religare* (Latin) yang berarti mengikat.<sup>95</sup> Cavanagh menjelaskan:

*Religion is the varied, symbolic expression of, and a appropriate response to, that which people deliberate'y affirm as being of unrestricted value for them.*<sup>96</sup>

92 Lihat QS. asy-Syūrā [42]: 13, ar-Rūm [30]: 30. Namun terdapat pula *ad-din* bermakna lain tapi masih berkaitan dengan keagamaan, seperti perhitungan [*al-hisāb*] pembangkitan [*al-ba's*] pembalasan [*al-jazā'*] ketetapan [*al-qadā'*], ganjaran [*as-sawāb*] siksaan [*al-'iqāb*]. Lihat QS. al-Fātihah [1]: 4, al-Hijr [15]: 35, an-Nūr [24]: 25, asy-Syūrā [42]: 82, as-Safāt [37]: 20, Sad [38]: 78, az-Zāriyāt [51]: 6, 12, al-Wāq'ah [56]: 56, al-Ma'ārij [70]: 26, al-Mudassir [74]: 46, al-Infitar [82]: 9, 15, 17, 18, al-Mutaffifin [83]: 11, at-Tin [95]: 7 al-Mā'ūn [107]: 1.

93 Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 28.

94 *Ibid.*

95 Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 13.

96 Ronald R. Cavanagh, "The Term Religion", dalam T. William Hall [ed.], *Introduction of the Study of Religion* (San Fransisco: Harper & Row, 1978), 19.

Dalam makna agama memang sangat variatif, bisa dikaitkan dengan ekspresi simbolik, respon yang tepat terhadap (sesuatu), yang masyarakat menganggap sebagai nilai yang tidak terbatas bagi mereka.

Subjektivitas dalam mendefinisikan agama adalah suatu hal yang sulit untuk dihindari. Ada sebagian orang yang memandang bahwa agama merupakan institusi yang diwahyukan oleh Tuhan kepada orang yang dipilih-Nya sebagai nabi atau rasul, dengan ketentuan-ketentuan yang telah pasti. Terdapat pula orang yang memandang bahwa agama adalah hasil dari kebudayaan, hasil pemikiran manusia, pemikiran orang-orang yang jenius, tetapi ada pula yang menganggapnya sebagai hasil lamunan, fantasi, atau bahkan ilusi.<sup>97</sup>

Koentjaraningrat memakai kata “agama” untuk menyebut semua sistem dari semua agama yang diakui secara resmi di Indonesia; Islam, Protestan, Katolik, Hindu-Dharma dan Buddha-Dharma. Sedangkan “religi” untuk menyebut sistem-sistem yang tidak atau belum diakui secara resmi seperti Konghucu, Seventh Day Advent, Gereja Pinkster dan segala macam gerakan kebatinan.<sup>98</sup>

Dengan demikian, agama dan religi pada dasarnya tidak berbeda selain dalam hal keabsahan-ketidak absahan menurut sistem dan administrasi pemerintah. Dalam membahas komponen-komponen sistem religi (agama), ia mengikuti konsep agama yang diberikan oleh Emile Durkheim yang menjelaskan:

*A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden, beliefs and practices which unite into one single moral community called Church, all those who adhere to them.*<sup>99</sup>

(Sebuah agama adalah suatu sistem terpadu dari keyakinan dan praktik relatif terhadap hal-hal yang suci, yang mengatakan, hal-hal terpisah dan dilarang, keyakinan dan

97 Syafa'at, *Mengapa Anda Beragama Islam* (Jakarta: Wijaya, 1965), 20.

98 Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, cet. IX (Jakarta: Gramedia, 1982), 149.

99 Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life*, terj.: Joseph W. Swain (New York: the Free Press, 1969), 62.

praktik yang bersatu menjadi satu komunitas moral tunggal yang disebut Gereja, semua orang yang mengikuti mereka).

Dalam bahasa sederhana, Durkheim mendefinisikan agama sebagai sistem kesatuan tentang kepercayaan dan praktik yang relatif untuk mensucikan sesuatu. Sesuatu tersebut disebut sebagai larangan, kepercayaan, dan praktik yang menyatu dalam satu komunitas moral yang disebut umat. Semuanya itu melekat bagi mereka dan difembagikan dalam Gereja.

Menurut Koentjaraningrat, terdapat empat komponen yang mesti ada dalam setiap sistem “religi”, yaitu:

- a. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia bersifat religius.
- b. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari alam gaib (*supernatural*), serta segala nilai, norma dan ajaran dari religi yang bersangkutan.
- c. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa, atau makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib.
- d. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan dan yang melaksanakan sistem ritus dan upacara tersebut.

Dari definisi dan penjelasan mengenai komponen-komponen di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan religi adalah agama yang nyata ada dalam masyarakat. Adapun pengalifan individual yang bersifat supranatural tidak dapat dimasukkan dalam kategori agama.

Harun Nasution memberikan penjelasan tentang unsur-unsur penting agama, yaitu:

- a. Paham adanya yang kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, kitab suci dan tempat-tempat tertentu.
- b. Kekuatan gaib, pada sisi lain manusia merasa lemah dan membutuhkan pertolongan dari yang gaib tersebut.

- c. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib.
- d. Respons yang bersifat emosional dari manusia terhadap yang gaib tersebut.<sup>100</sup>

Dengan demikian, pengertian agama (religi) dapat dikerucutkan menjadi kesamaan pandangan tentang manusia yang mengalami pertemuan dengan sesuatu yang bersifat supranatural. Pertemuan ini, yang dalam istilah tertentu dikenal dengan pengalaman religius, yang terungkap dalam berbagai bentuk ekspresi.

Joachim Wach membagi pengungkapan pengalaman religius dalam tiga bentuk: 1) tindakan (*action*), 2) pemikiran (*thought*), dan 3) jama'ah.<sup>101</sup> Wach juga mengungkapkan teori yang paling awal dari pengalaman religius terdapat dalam tiga aspek pengungkapan yaitu mitos, doktrin, dan dogma. Mitos berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hidup di dunia ini, asal manusia, dan tentang kematian manusia. Mitos dalam pandangan para peneliti dari berbagai bidang pengentahuan kemanusiaan, diketahui mitos tidak hanya berisi omong kosong, melainkan menunjuk kepada suatu realitas.<sup>102</sup>

Doktrin pada umumnya identik dengan sebuah asas yang berlandaskan agama, politik, ataupun kenegaraan<sup>103</sup> yang tidak disebarluaskan secara umum di masyarakat. Ia digunakan sebagai sebuah alat atau ilmu tertentu yang penyampaiannya untuk tujuan tertentu. Doktrin mempunyai tiga fungsi yang berbeda, yaitu: 1) Pelukisan dan perumusan keimanan, 2) Pengaturan kehidupan secara normatif dalam peribadatan dan pelayanan, dan 3) Pembelaan keimanan dan pendefinisian hubungan iman dengan pengetahuan lain. Dengan demikian doktrin bersifat mengikat dan berlaku hanya bagi jemaat, tidak bagi komunitas luar.<sup>104</sup>

100 Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet. Ke-5 (Jakarta: UI Press, 1985), 11.

101 Joachim Wach, *The Comparative Study of Religion* (New York: Columbia University Press, 1958), 76.

102 *Ibid.*, 65.

103 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

104 *Ibid.*, 68.

Jika doktrin masih membuka kemungkinan untuk berbagai varian atau pilihan, maka dogma keputusan sudah dilakukan di antara pilihan yang tersedia. Pengungkapan juga dapat berwujud dalam pernyataan lisan atau tertulis. Kata-kata suci, cerita-cerita kudus, nyanyian-nyanyian suci dan doa-doa menandai tahap perkembangan pengungkapan teoritis terhadap pengalaman religius.<sup>105</sup> Dalam agama-agama yang disandarkan kepada Ibrahim (*Abrahamic religions*), pengalaman keagamaan, walaupun mengandung kemungkinan untuk penjelajahan bebas yang sangat luas, selalu merujuk pada teks-teks suci Bibel, Taurat, dan al-Qur'an.

Teks-teks dalam kitab-kitab tersebut selalu memberikan inspirasi, dan karena kedudukannya yang sangat terhormat di mata para pemeluknya, tidak jarang teks-teks tersebut dipakai untuk mempengaruhi emosi umat agar dapat digerakkan ke arah tertentu. Dari pemahaman ini, bisa dikatakan bahwa pemikiran keagamaan Islam (ajaran Islam) tidak lain adalah hasil dari interpretasi kaum muslimin terhadap teks suci yang terkumpul dalam al-Qur'an.

Selaras dengan hal tersebut, Ignas Kleden membuat catatan tentang tiga dimensi kebangkitan agama yang disebut sakralitas, spiritualitas dan moralitas.<sup>106</sup> Sakralitas merupakan pengakuan akan adanya, serta hormat kepada sesuatu yang kudus dalam mengatasi kehidupan kita. Spiritualitas adalah sikap penganut setiap agama terhadap dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan agamanya. Sedangkan moralitas adalah sikap seorang individu terhadap orang lain dan tanggung jawabnya terhadap keselamatan dan kesempurnaan orang lain.<sup>107</sup>

Fenomena agama dapat dipahami dalam berbagai bentuk, seperti teks, tokoh, lembaga, barang-barang, komunitas dan sistem hubungan antar-individu, tradisi, dongeng, mitos, serta peribadatan. Hal ini menurut Mukti Ali, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manaf, memiliki setidaknya tiga afasan yaitu:

---

105 *Ibid.*, 65.

106 Ignas Kleden, "Kebangkitan Agama dalam Tiga Dimensi", dalam *SKH Kompas*, tanggal 3 April 1995, 4 dan 5.

107 *Ibid.*, 4.

- a. Pengalaman agama adalah soal batin, subyektif, dan individualistis, oleh karenanya tiap orang mengartikan agama sesuai dengan pengalamannya sendiri atau sesuai dengan pengalaman agama sendiri.
- b. Agama merupakan hal yang sakti dan luhur. Oleh karenanya, membicarakan agama dapat menumbuhkan semangat dan emosi seseorang.
- c. Bahwa konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian agama itu. Orang yang rajin pergi ke Mesjid atau Gereja, ahli tasawuf atau mistik akan condong untuk menekankan kebatinannya. Sedangkan ahli antropologi yang mempelajari agama cenderung untuk mengartikannya sebagai kegiatan-kegiatan dan kebiasaan-kebiasaan yang dapat diamati.<sup>108</sup>

Geertz menjelaskan agama adalah: 1) Sebuah sistem simbol yang berperan, 2) Membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, pervasif, dan tahan lama di dalam diri manusia dengan cara, 3) Merumuskan konsepsi tatanan kehidupan yang umum, 4) Membungkus konsepsi-konsepsi ini dengan suatu aura faktualitas semacam itu, sehingga suasana hati dan motivasi tampak realistik secara unik".<sup>109</sup>

Penjabaran lebih detail pernyataan Geertz di atas adalah: *Pertama*, "sistem simbol" adalah segala sesuatu yang membawa dan menyampaikan suatu ide kepada orang; seperti peristiwa penyaliban, atau sekadar tindakan tanpa kata, seperti gerak isyarat kasihan atau kerendahan hati. Ide dan simbol adalah bersifat publik. Sebagaimana program dapat diuji dan dipahami secara objektif terlepas dari mesin fisik yang menjadi tempat pemasangannya. Begitu pula dengan simbol-simbol keagamaan, yang meskipun masuk dalam pikiran pribadi individu, namun dapat dipegang terlepas dari otak individu yang memikirkannya.

*Kedua*, simbol-simbol "membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, pervasif, dan tahan lama". Motivasi

108 Mudjahid Abdul Manaf, *Ilmu Perbandingan Agama* (Semarang: Badan Penerbitan IAIN Wali Songo Press, tt.), 1-2.

109 Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 29.

memiliki tujuan dan dibimbing oleh serangkaian nilai yang abadi, yang dianggap baik dan benar. Sedangkan agama merumuskan konsep tentang tatanan kehidupan yang umum.

Bagi Geertz, agama menandai suatu wilayah kehidupan yang memiliki status khusus. Memisahkan agama dari sistem budaya yang lain adalah mengklaim dapat dan telah menempatkan kita bersentuhan dengan apa yang “betul-betul baik”. Dalam “ritual” misalnya, orang-orang tercengkeram oleh perasaan dari realitas yang memaksa. Dalam ritual terjadi “suatu perpaduan simbolik antara etos dengan pandangan dunia”.

Geertz memberikan contoh perpaduan antara etos dengan pandangan dunia dalam satu upacara keagamaan di Indonesia. Di beberapa kesempatan, orang-orang Bali mengadakan pertunjukan tentang suatu pertempuran besar antara dua karakter dalam mitologi mereka: *dukun sihir Rangda* yang menakutkan dengan *monster Barong* yang aneh. Ketika keduanya bertempur, para penonton secara perlahan-lahan masuk dalam tontonan yang besar, di mana di antara mereka ada yang ambil bagian dalam mendukung karakter itu dan yang lain jatuh dalam keadaan tak sadarkan diri. Saat pertunjukan itu berlangsung, menjadi jelas bahwa bagi orang Bali dalam drama ini “tidak hanya pertunjukan untuk ditonton tetapi sebuah ritual yang harus diperankan”.

Dari beberapa teori dan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa moral dan agama secara filosofis mempunyai kesamaan sebagai acuan perilaku manusia dan mempunyai kekuatan untuk dipatuhi oleh masyarakat yang mempercayainya. Namun dikarenakan agama memiliki banyak tafsir yang berkembang di masyarakat, muncullah keaneka ragaman dalam beragama. Demikian juga, karena moral banyak bersumber dari agama, maka aturan-aturan mengenai moral menjadi beragam antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Dalam tata perundang-undangan di Indonesia, penyebutan 5 (lima) dasar negara (Pancasila) dalam pembukaan UUD 1945, tepatnya alinea 4, disebut sebagai nilai dasar. Sementara penjabatan dari kelima dasar ini disebut sebagai nilai instrumental.

Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh dirubah. Nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, belum bersifat operatif. Ia masih membutuhkan pranata perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Penjabaran dalam bentuk pranata yang lebih operasional ini kemudian disebut sebagai nilai Instrumental.

Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu.

Dalam diskursus mengenai nilai, teori yang selama ini berkembang masih bersifat umum dan lebih menggunakan pendekatan humanistik. Teori nilai, dalam konteks modal sosial, masih jatang yang mengaitkannya dengan hal-hal yang berdimensi transendental (*ilāhīyah*). Lebih jauh Sidi Gazalba, sebagaimana dikutip oleh Chabib Thoha, menyebutkan bahwa nilai adalah sesuatu yang abstrak, ideal, bukan benda kongkrit, dan bukan fakta. Karena itu, nilai tidak hanya berkaitan dengan benar-salah yang menuntut pembenaran empirik, namun ia berbicara mengenai penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi atau tidak disenangi.<sup>110</sup>

Sedangkan norma yang dimaksud adalah bentuk implementatif dari konsep nilai yang merujuk pada penjelasan Bambang Daroeso mengenai fungsi nilai, yaitu:

- a. Nilai sebagai suatu realitas abstrak dalam kehidupan manusia.

Nilai adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diindra. Kemampuan manusia hanyalah mengamati objek yang bernilai, bukan nilai itu sendiri. Ketika seseorang mengatakan bahwa si "A" adalah orang yang jujur, maka yang bisa diindra hanyalah sosok si "A", bukan kejujuran itu sendiri.

Dalam nilai terdapat realitas yang membentuk karakter atau kepribadian individu menuju hal-hal yang secara

---

110 Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 59.

sosial dianggap baik. Kerangka kebaikan ini dapat dilihat dari dampak positif yang ditimbulkan atas suatu aktifitas/perilaku. Semakin banyak nilai baik yang diperbuat oleh individu atau masyarakat maka akan semakin menciptakan kebaikan, baik bagi individu atau masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin banyak nilai buruk yang diciptakan, maka akan semakin rusak kehidupan individu atau masyarakat.

b. Nilai memiliki sifat normatif.

Karena memiliki sifat normatif, maka nilai bisa memuat harapan, cita-cita, dan suatu keharusan. Nilai memiliki sifat ideal (*das sollen*) dalam bentuk norma yang menjadi landasan manusia dalam bertindak. Sifat normatif merupakan nilai-nilai yang disandarkan pada kerangka norma agama atau sistem kepercayaan yang ada pada masyarakat yang memegang norma tersebut. Semakin banyak landasan normatif yang ada di masyarakat, maka akan semakin beragam nilai yang berkembang. Inilah yang penulis sebut sebagai subyektifitas nilai atau norma masyarakat (*das sein*). Tidak jarang ditemukan, nilai yang secara normatif (*das sollen*) dianggap baik, tapi pada dataran praktis (*das sein*) justru dianggap tidak berguna (buruk). Dalam Islam misalnya, terdapat aturan mengenai kewajiban seorang muslimah menutup aurat secara penuh. Norma ini, dalam tataran praktis, seringkali dianggap sulit untuk difaksanakan. Sebagian mereka yang merasa sulit berargumen bahwa esensi dari norma menutup aurat adalah menutup perilaku dari perbuatan buruk, bukan menutup tubuh sebagaimana dipahami.

c. Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator

Jika nilai berfungsi sebagai daya dorong atau motivator maka keberadaan manusia yang melaksanakan nilai merupakan pendukung nilai tersebut. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya, nilai ketakwaan, ia mampu mendorong seseorang untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa.<sup>111</sup>

111 Bambang Daroeso, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila* (Surabaya: Aneka Ilmu, 1986), 21.

Sedangkan batasan nilai menurut sifatnya terbagi menjadi: *nilai subjektif* dan *nilai objektif metafisik*.<sup>112</sup> Nilai subjektif adalah nilai yang merupakan reaksi subjek (individu) terhadap objek, hal ini sangat tergantung kepada masing-masing pengalaman subjek (individu) tersebut. Nilai subjektif bersifat rasional, yakni nilai yang merupakan esensi dari objek secara logis yang dapat diketahui melalui akal sehat. Seperti nilai kemerdekaan, setiap orang memiliki hak untuk merdeka. Demikian pula nilai kesehatan, setiap orang berhak untuk hidup sehat, dan nilai-nilai lainnya. Adapun nilai objektif metafisik yaitu nilai-nilai yang mampu menyusun kenyataan objektif, seperti nilai agama.

Jika dilihat dari sumber memperolehnya, maka nilai dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: nilai *ilāh'iyah* (*'ubūd'iyah* dan *mu'āmalah*) dan nilai *insān'iyah*. Nilai *ilāh'iyah* bersumber dari agama (wahyu Allah Swt.), yang dengan nilai ini manusia tinggal menerimanya saja dan bersifat konstan. Sedangkan nilai *insān'iyah* merupakan nilai yang bersumber dari kreasi manusia. Karena kreasi manusia, ia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut di atas harus diturunkan dalam bentuk aturan praktis, eksplisit, tertulis dan bersifat membatasi perilaku manusia. Aturan sebagai turunan nilai itu yang selanjutnya disebut dengan norma. Dengan norma ini diharapkan ada keseragaman perilaku dalam kelompok sosial.

Sebagaimana diketahui, teori utama yang digunakan dalam buku ini adalah modal sosial yang dikenalkan oleh Putnam.<sup>113</sup> Isu utama yang diusung oleh Putnam adalah partisipasi masyarakat, yakni pola hubungan antara tingkat pendidikan kaitannya dengan partisipasi politik di Amerika. Ia berkesimpulan bahwa meningkatnya angka atau level ternyata tidak berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi politik. Secara lebih rinci, Putnam memilah variabel pendidikan tersebut ke dalam faktor pendidikan relatif dan absolut. Pendidikan yang diperoleh seseorang, dapat menjadikannya

112 Louis Kattsof, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), 333.

113 John F. Helliwell dan Robert D. Putnam, "Education and Social Capital", *NBER Working Paper*, 7121, Massachusetts, 1999.

lebih kompetitif dalam posisi di masyarakat. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku pada tingkat pendidikan relatif.

Namun, perilaku seseorang, baik sosial maupun politik tersebut sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, melainkan juga oleh masyarakat di sekitarnya. Karakter masyarakat sudah barang tentu majemuk sifatnya, terdiri atas individu-individu yang mempunyai latar belakang, kebiasaan dan kepentingan yang berbeda. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan ekonomi, politik, budaya, agama, eksistensi dan kepentingan lainnya. Pada pemenuhan kepentingan tersebut sering terjadi pola relasi yang tidak jarang menimbulkan gesekan di antara mereka. Namun, hal yang demikian ini justru mencirikan bahwa masyarakat tersebut dinamis.

Dalam beberapa kasus tertentu, dinamika sosial tersebut terkadang mengalami tensi yang agak meninggi, utamanya pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemahaman agama atau politik. Pada pemilihan kepala daerah misalnya, konflik antarpendingung calon kepala daerah pada suatu waktu tidak terelakkan. Demikian juga halnya dengan pemahaman agama. Ritual penganut organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah umpamanya, tak jarang juga mengalami pasang surut untuk diperdebatkan.

Dinamika sosial yang demikian itu bukan merupakan suatu kemunduran dari sebuah masyarakat. Namun sebaliknya, ia bahkan menjadi modal sosial yang ampuh jika diatur dengan baik. Penyatuan dan penyamaan persepsi dari berbagai perbedaan interes masyarakat menjadi satu tujuan dan harapan bersama dan menjadi sebuah energi potensial yang sangat luar biasa. Tentu saja, penyamaan tujuan tersebut berada di wilayah yang netral. Bukan di wilayah pemahaman agama, misalnya yang selama ini terkesan sulit untuk ditemukan titik temunya.

Salah satu institusi yang dianggap mampu mewartakan harapan dan cita-cita bersama dari perbedaan kepentingan dan interes di atas adalah lembaga pendidikan. Di dalam sebuah institusi pendidikan, terdapat hubungan dari berbagai elemen yang mempunyai tujuan dan harapan yang sama. Interaksi itu

akan terjadi jika antarindividu ada kepercayaan dan norma-norma yang disepakati bersama, kemudian membentuk jaringan sosial. Mereka mampu menciptakan lingkungan untuk dapat bekerja sama, berdiskusi untuk memperkuat modal sosial yang pada gilirannya dapat melahirkan *trust* institusi.

Sebagai sumber modal sosial, mutu lembaga pendidikan akan ditentukan oleh kualitas modal budaya atau kompetensi budaya dan komunikasi individu. Karena, kompetensi budaya memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai latar belakang yang berbeda, dan semakin tinggi kompetensi modal budaya seseorang, akan semakin kaya modal sosial untuk berhubungan melalui jaringan interdependensi.

Jika sebuah lembaga pendidikan mampu membangun, mempertahankan dan mengelola modal sosial kepercayaan (*trust*) yang dimilikinya, niscaya berdampak pada partisipasi masyarakat. Besar kecilnya partisipasi masyarakat akan ditentukan oleh kualitas kepercayaan (*trust*) yang terbangun. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut dapat berupa; mempromosikan, menyekolahkan anak, menyumbangkan dana atau pikiran, merasa memiliki, dan mempertahankan eksistensi lembaga.

\*\*\*\*



# 3

## PENGEMBANGAN MADRASAH MELALUI MODAL SOSIAL JARINGAN



Dalam proses mengembangkan diri, MI Istiqomah Sambas menempuhnya melalui jaringan yang dapat dijelaskan dengan dua teori,<sup>1</sup> yaitu teori Nan Lin dan Durrance. Teori Nan Lin menjelaskan bahwa jaringan-jaringan hubungan sosial antar-individu dalam modal sosial memberikan manfaat dalam konteks pengelolaan sumber daya milik bersama, karena ia mempermudah koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan yang bersifat timbal balik. Sementara Durrance mengatakan bahwa teori jaringan sosial berbeda dengan teori sosiologi yang mendefinisikan bahwa masyarakat dibangun dari individu. Dalam modal sosial, jaringan dimulai bukan dari hubungan antar-individu, tapi merupakan model masyarakat yang terdiri dari ikatan antar model.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, dengan mengacu pada kedua teori ini, dapat dianalisis bahwa pengembangan sumber modal sosial MI Istiqomah Sambas yang dilakukan melalui jaringan dapat dibagi ke dalam dua jalur, yaitu internal dan eksternal. Jalur internal adalah jaringan yang dibangun dengan kelompok yang terlibat langsung dengan madrasah sedangkan jalur jaringan eksternal adalah jaringan yang dibangun dengan melibatkan kelompok luar yang secara tidak langsung berkaitan dengan madrasah.

1 Nan Lin, "A Network Theory of Social Capital", dalam Dario Castiglione, et. el., *The Handbook*, 58

2 Kate Williams dan Joan C. Durrance, "Social Networks and Social Capital: Rethinking Theory in Community Informatics", *The Journal of Community Informatics*, Volume 4, Nomor 3, 2008, 1.

Jaringan di MI Istiqomah Sambas Purbalingga mula-mula terbentuk melalui *primordial ties* yang terpelihara dengan kuat oleh keluarga Sambas. Hubungan primordial yang didasarkan pada keturunan keluarga tersebut dimodifikasi dengan adanya kepentingan, perhatian, dan tujuan yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga besar Sambas mempunyai agenda rutin, semisal pertemuan rutin, arisan keluarga, dan pengajian keluarga. Pertemuan insidental juga dilakukan jika salah satu anggota keluarga mempunyai hajat, baik hajat suka ataupun duka. Perkumpulan dan pertemuan, baik yang rutin maupun insidental tersebut, menunjukkan betapa solidnya jaringan sosial bagi keluarga besar Sambas.

Dari pertemuan rutin tersebut muncul keprihatinan terhadap keberadaan pendidikan dasar Islam, madrasah di Purbalingga.<sup>3</sup> Kemudian disepakatilah rencana untuk merealisasikannya. Selanjutnya, mereka mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat untuk membahas rencana tersebut, dan ternyata keinginan tersebut sangat diapresiasi oleh masyarakat. Dukungan tersebut sangat wajar karena di wilayah Purbalingga belum ada lembaga pendidikan dasar Islam, madrasah yang mumpuni dan mampu mengungguli SD Negeri atau SD nonmuslin.

Dengan didirikannya madrasah, menunjukkan bahwa modal sosial telah berperan dan berfungsi secara efektif guna membangun kehidupan sosial masyarakat Purbalingga di bidang pendidikan dasar atau madrasah. Meski jenis ikatan ini awalnya, secara teoritis, rentan dengan tindakan yang kurang jujur, nepotisme, namun pada prinsipnya ia baik untuk meningkatkan laju pembangunan. Untuk itu, agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi, norma lembaga dan kelembagaan serta cara kerja juga dirancang dan diterapkan untuk menghindari penyalahgunaan lembaga.<sup>4</sup>

Ikatan-ikatan yang dibentuk oleh yayasan Sambas tersebut bermakna progresif dan lebih positif dalam memberikan keuntungan tidak hanya individu tapi juga semua anggota. Dari paparan inilah, modal sosial bermakna sebagai modal kolektif penopang bangunan sebuah sistem sosial. Pada gilirannya, dengan modal sosial tersebut memungkinkan secara bersama, semua komunitas yang mempunyai jejaring dengan MI

---

3 Nanum demikian, menurut penuturan ketua yayasan Sambas, Eling, ide awal untuk mempunyai lembaga pendidikan madrasah, merupakan cita-cita besar bapak Sambas jauh sebelum bisnisnya sukses.

4 Mengingat motivasi pendirian madrasah ini bukan *profit oriented*, hal-hal yang berkaitan dengan penyelewengan apapun tidak akan terjadi. Wawancara dengan ketua yayasan Sambas, Eling, tanggal 23 September 2014.

Istiqomah Sambas dapat membentuk sumber kehidupan yang lebih baik, secara sosial-ekonomi, dengan tolok ukur; harmonis secara sosial, bebas konflik, makmur, demokratis, dan egaliter.

Sebagaimana disebutkan, bahwa modal sosial yang dibangun dan dikelola MI Istiqomah Sambas meliputi dua jalur, yaitu jalur internal dan eksternal. Modal sosial jalur internal meliputi komite, yayasan, manajer, atau pengelola madrasah yang terdiri dari pimpinan sekolah dan dewan guru. Jalur internal ini sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Nan Lin yaitu adanya hubungan antar-individu dalam mengembangkan sumber daya bersama yang ada untuk mendapatkan manfaat.

Sedangkan modal sosial jalur eksternal terbentuk melalui wali murid, Kemenag, Kemendikbud, Perguruan Tinggi Umum dan Keagamaan dan lembaga swasta lainnya. Jalur eksternal ini merupakan pengembangan dari teori yang dikembangkan oleh Williams dan Durrance yang menekankan jaringan sebagai proses modal sosial yang berdimensi pada hubungan masyarakat, yaitu antara masyarakat madrasah dengan masyarakat eksternal. Kedua masyarakat tersebut berusaha untuk menciptakan kemandirian masing-masing, sehingga tercipta budaya kondisi yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.

## **A. STRATEGI MEMBANGUN JARINGAN MELALUI JALUR INTERNAL**

### **1. *Membangun Jaringan melalui Yayasan***

Yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha yang bergerak dalam segala macam badan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang non komersial maupun yang secara tidak langsung bersifat komersial.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 dijelaskan:

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.<sup>6</sup>

5 Chatamarasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Cet., Ke-1 (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2002), 81.

6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001.

Yayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum adalah sangat penting bagi organisasi keagamaan, khususnya Islam. Setiap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non-Government Organization (NGO)* Islam, seperti lembaga kemasjidan, da'wah, pendidikan, kajian, sosial, advokasi dan yang sejenisnya, perlu mendirikan yayasan sebagai sarana formal dalam melakukan tindakan hukum para aktivisnya.

Dengan Yayasan yang berbadan hukum serta memayungi suatu lembaga pendidikan, maka pengurus organisasi pendidikan Islam dapat bertransaksi, membuat perjanjian dan kerja sama, berhubungan dengan instansi pemerintah, swasta atau perorangan yang memerlukan aspek legalitas.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ditegaskan bahwa yayasan adalah Badan Hukum. Dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan:

Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Berdasarkan pasal tersebut, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya. Dengan demikian, kekayaan yayasan bukan merupakan kekayaan pribadi atau salah satu anggotanya. Harta kekayaan dan aset yayasan hanya digunakan untuk kepentingan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Banyak yayasan yang tidak sesuai dengan aturan perundangan,<sup>7</sup> seperti aset yang tidak jelas peruntukan dan kepemilikannya, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik antara pengurus yayasan dan pihak yang merasa memiliki aset tersebut.

MI Istiqomah Sambas menggunakannya sebagai modal karena kelembagaannya yang berada di bawah Yayasan Istiqomah sudah sesuai dengan aturan atau norma yang telah disepakati bersama. Yayasan Istiqomah mempunyai peran strategis yang penting sebagai pemberdayaan jaringan internal. Peran ini ditopang dengan modal bahwa yayasan Istiqomah Sambas merupakan yayasan resmi yang sudah berbadan hukum. Dengan demikian, H. Suchari Adi Mulyono

---

7 Sering kita membaca berita tentang konflik yayasan, salah satu contoh konflik yang pernah mencuat adalah peristiwa saling menggembok antara ketua yayasan dengan kepala madrasah, hanya dikarenakan dana BOS, padahal di antara keduanya bersaudara, Baca harian umum *Pikiran Rakyat*, edisi 30 September 2014.

(Alm.), sebagai pendiri, dan keluarga, berhak untuk mempublikasikan yayasannya yang salah satu kegiatannya adalah sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan madrasah.<sup>8</sup>

Secara lebih rinci, jaringan yang terbentuk pada masa awal dimulai dari berbagai langkah dan strategi yang dilakukan oleh pengurus dengan melakukan banyak kegiatan yang melibatkan unsur-unsur dari tokoh masyarakat dan pejabat. Hal ini dapat dilihat saat peresmian yayasan pada tanggal 28 Juni 2000 yang diresmikan oleh Bupati Purbalingga, Drs. Triono Budi Sasongko, M.Si.<sup>9</sup> Kehadiran Bupati, secara politis mempunyai makna yang sangat strategis, karena keberadaannya sebagai birokrat sangat mudah menarik massa untuk ikut hadir dalam peresmian tersebut. Di samping itu, kehadirannya mempunyai dampak yang sangat luas di masyarakat.

Disamping itu, reputasi H. Suchari Adi Mulyono dan keluarga sebagai pengusaha yang sangat peduli terhadap pengembangan kegiatan keagamaan dan pendidikan menjadi modal sosial yang sangat penting. Hal ini tentu mempunyai peran yang sangat strategis dan berdampak positif terhadap pengembangan jaringan yang dilakukan oleh yayasan, sehingga mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Jaringan yayasan juga merambah pada “wilayah politik” dengan melibatkan Bupati dalam berbagai *event* kegiatan yang dilaksanakan oleh yayasan. Dampaknya adalah dukungan yang besar dari pemerintah daerah terhadap kemajuan yayasan. Jaringan dengan birokrasi ini memainkan peran penting dalam menciptakan jaringan modal sosial yang lebih luas. Jika dikaitkan dengan teori yang dikembangkan oleh Putnam, maka ada benang merah yang menghubungkan antara kedua fakta tersebut.

Meskipun pembangunan jaringan yang dilakukan yayasan Sambas melibatkan birokrasi, Bupati yang juga sebagai jabatan politis, bukan berarti pendirian MI Istiqomah Sambas Purbalingga mempunyai kepentingan politis, pencitraan, maupun ekonomis. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengakuan masyarakat yang mengatakan bahwa keluarga besar Sambas, tidak ada yang yang terjun di dunia politik, semisal anggota dewan, atau pejabat yang lainnya,<sup>10</sup> sehingga tidak

8 Wawancara dengan Eling, direktur Yayasan Sambas, pada tanggal 3 Oktober 2014

9 *Dokumentasi Yayasan Istiqomah*, Tahun 2000, tidak diterbitkan. Diperkuat wawancara dengan Kepala Madrasah, Ikhwandi Arifin, pada 2 Oktober 2014.

10 Wawancara dengan Kasi Madrasah Kemenag Purbalingga, Ratmono, tanggal 9 Agustus 2014.

membutuhkan pencitraan. Pendapat ini dipertegas oleh ketua yayasan Sambas, bahwa keluarga besar sambas tidak ada yang berafiliasi ke salah satu partai politik apalagi menjadi pengurusnya.<sup>11</sup> Namun, jika ada lebih dari satu partai politik yang meminta bantuan untuk kegiatan, misalnya kaos berlogo partai, maka semua akan diperlakukan sama dengan diberi dana yang besarnya sama.

Di samping tidak bermuatan politis, pendirian MI Istiqomah Sambas juga tidak berorientasi pada bisnis atau profit. Hal ini dikarenakan semua keluarga besar Sambas berprofesi sebagai pebisnis sukses; seperti kontraktor, gerai perhiasan, jasa SPBU, waralaba, optik, pujasera dan lain sebagainya,<sup>12</sup> sehingga secara ekonomi mereka sangat kuat. Bahkan menurut ketua yayasan Sambas, semua anak-anak bapak Sambas wajib menyisihkan 5 persen dari laba setiap hari untuk menambah operasional madrasah, selain itu mereka diwajibkan membayar zakat malnya untuk kemajuan madrasah. Zakat mal<sup>13</sup> yang diberikan oleh keluarga besar yayasan Sambas, kemudian diserahkan kepada panitia zakat di madrasah, yang selanjutnya dibagi kepada seluruh pegawai, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendirian Madrasah Istiqomah Sambas benar-benar merupakan rasa kepedulian dan tanggung jawab sebagai orang yang diberi harta berlebih terhadap kemajuan pendidikan Islam khususnya di Purbalingga. Di samping itu, pendirian madrasah ini dianggap sebagai ladang amal dan rasa syukur terhadap harta yang telah dianugerahkan oleh Allah. Karena mereka sangat percaya bahwa usaha bisnis keluarga besar Sambas tidak akan berkurang dengan pengambilan sebagian hartanya untuk kepentingan pendidikan, namun sebaliknya, justru bisnisnya bertambah lancar.<sup>14</sup>

---

11 Wawancara dengan ketua yayasan Sambas, Eling, 3 Oktober 2014.

12 Wawancara dengan ketua yayasan Sambas, Eling, 3 Oktober 2014.

13 Zakat mal diberikan setiap menjelang lebaran idul fitri. Pada tahun 2016, zakat mal yang dibagi kepada seluruh pegawai mencapai seratus lima puluh juta rupiah. Sumber dokumen MI Istiqomah Sambas 2016 diperkuat pengakuan seorang guru, yang dirahasiakan identitasnya, yang menerima zakat sebesar Rp.2.000.000,-.

14 Setelah sukses dengan mendirikan madrasah ibtidaiyah, ternyata tidak membuat puas yayasan. Sekarang ini telah dibangun SMP Sambas dan telah meluluskan 2 kali, serta SMA Takhasus Sambas yang dilengkapi pondokan (*barding school*), untuk SMA Takhasus Sambas, sekarang ini baru memasuki tahun kedua. Perkembangan ini bisa terjadi karena divisi pendidikan pada yayasan Sambas diberi kebebasan untuk senantiasa berinovasi dan mengembangkan diri.

Sifat egaliter<sup>15</sup> dan *cap blaka*<sup>16</sup> yang menjadi ciri khas masyarakat Banyumas, termasuk Purbalingga, merupakan penopang mudahnya terjadi komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan di antara kelompok. Sifat terbuka ini juga berperan terjadinya *bergaining* kepentingan ketika mereka berdiskusi. Mereka tidak segan-segan mengatakan sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai dengan hati nurani. Sehingga, pada gilirannya akan memudahkan terjadinya jaringan di antara kelompok. Sehingga hasilnya pun benar-benar merupakan kesepakatan bulat. Di samping itu mereka juga mempunyai komitmen untuk senantiasa mewujudkan kesepakatan yang dibuat dalam perspektif kesetaraan dan kemitraan, sehingga tidak muncul perbedaan perlakuan antarkelompok, semua dianggap sederajat.

Sedangkan dari sisi kontribusi, yayasan Istiqomah telah memberi sumbangsih yang besar terhadap MI Istiqomah Sambas, utamanya dalam membentuk kemandirian berinovasi dan juga pengembangan jaringan sosial, yakni kebebasan untuk berinovasi dalam masalah manajemen pembelajaran maupun pengembangan kelembagaan. Kemandirian ini sangat sefaras dengan teori yang dikembangkan oleh Williams dan Durrance yang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya jaringan adalah membangun kemandirian dalam setiap simpul sosial.<sup>17</sup>

Jika mengacu pada teori Williams dan Durrance, maka sangat tepat bila kelahiran MI Istiqomah dikategorikan sebagai bagian dari hasil pembentukan jaringan yayasan eksternal. Berdasarkan data yang penulis temukan, disebutkan bahwa pendirian MI Istiqomah Sambas merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan rapat tanggal 8 Maret 2000, tentang kerja sama antara Yayasan Istiqomah Sambas dengan Keluarga Besar SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, sehingga pada tanggal 8 April 2000 utusan dari Yayasan Istiqomah Sambas yang diwakili oleh Bapak Toha Adam, S.Pd, Bapak Drs. H. Khufaimi dan Bapak Drs. H. M. Wahyudhiana kembali mengadakan musyawarah di

---

15 Egaliter adalah persamaan derajat pada setiap manusia. Setiap manusia mempunyai derajat yang sama secara sosial maupun di hadapan Tuhan tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, keturunan, suku, ras, golongan, dan sebagainya, melainkan karena sikap masing-masing individu. Di samping itu, bahasa Banyumasan dengan logat *Ngapaknyo* juga tidak mengenal kasta bahasa, seperti bahasa Kraton, menunjukkan bahwa ada keterbukaan yang lebar antarindividu. Hampir tidak ada rasa risih jika anak muda bergaul dengan orang tua dengan menggunakan bahasa Jawa *ngoko*. Dikutip dari orasi budaya Ahmad Thohari, IAIN Purwokerto 10 November 2015.

16 *Cap blaka* adalah bahasa Jawa Banyumasan yang bermakna mengatakan sesuatu apa adanya, tanpa tedeng aling-aling. Apa yang dipikirkan adalah apa yang diucapkan.

17 Kate Williams dan Joans C. Durrance, "Social Networks, 3.

SD Muhammadiyah Sapen<sup>18</sup> guna membicarakan beberapa hal, yang pada akhirnya disepakati:

- a. Sekolah yang didirikan adalah berbentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di bawah naungan Departemen Agama.
- b. H. Sutrisno sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas.
- c. Tiga orang guru senior dari SD Muhammadiyah Sapen untuk ditugaskan ke Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas (Ikhwandi Arifin, S.Ag, Wahyuti, S.Pd. dan Atik Hidayati, S.Pd).
- d. Mengagendakan rencana sosialisasi dan penerimaan peserta didik baru.

Setelah beberapa kesepakatan tersebut, pada tanggal 20 April 2000 MI Istiqomah Sambas resmi tercatat di kantor Departemen Agama Purbalingga, status Terdaftar dengan: 112330305189.<sup>19</sup>

## **2. Membangun Jaringan dengan Komite Madrasah**

Komite Sekolah mulai populer dan terbentuk sejak diberlakukannya Keputusan Mendiknas No. 004/ U/ 2002 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 dijelaskan bahwa tujuan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. Meningkatkan tanggungjawab peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.<sup>20</sup>

---

18 Menurut ketua yayasan Sambas, Eling, kerja sama dengan SD Muhammadiyah Sapen bukan kerja sama yang berbasis ideologis organisasi, melainkan kerja sama profesional. Selain itu lebih dikarenakan masalah teritorial, sebab untuk kerja sama dengan MIN Malang terlalu jauh, meski disadari jika dengan MIN Malang lebih tepat, karena sama-sama madrasah.

19 Sejarah lengkap pendirian MI Istiqomah dapat diakses pada *Sejarah Pendirian MI Istiqomah*, (<http://miistiqomahsambas.blogspot.co.id/2013/05/profil.html>).

20 Umaedi, *Manajemen Berbasis Sekolah/ Madrasah* (Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan, 2004), 405-406.

Keberadaan Komite juga dimuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 angka 3 dan 4 disebutkan:

- a. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- b. Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan dua peraturan di atas, jelaslah bahwa keberadaan komite sangat kuat dari sisi legalitas-yuridisnya. Komite madrasah merupakan grup modal sosial madrasah yang terikat dengan murid. Komite merupakan bagian dari dalam (internal) madrasah, terutama dalam hal partisipasi ide dan gagasan tentang keberlangsungan madrasah.

Untuk meningkatkan kualitas partisipasi komite madrasah, MI Istiqomah Sambas membangun jaringan dengannya secara interaktif, utamanya dalam aspek yang berhubungan dengan kewajiban murid dalam ranah keuangan.<sup>21</sup> Contoh, ketika yayasan berkeinginan untuk menaikkan sumbangan pendidikan, MI Istiqomah Sambas mengajak berkomunikasi secara terbuka dengan komite. Pada umumnya, di banyak tempat, komite madrasah akan menyetujui ketika diajak berkomunikasi mengenai kemungkinan menaikkan sumbangan pendidikan. Namun kondisi “pasti setuju” tidak terjadi pada pertemuan antara pihak MI Istiqomah Sambas dengan komite madrasah. Komite madrasah justru tidak setuju dengan harapan pihak madrasah untuk menaikkan sumbangan pendidikan dengan alasan sebagian besar penghasilan orang tua wali tidak bisa mencapai angka yang diusulkan oleh yayasan.<sup>22</sup>

Menurut Kepala MI Istiqomah Sambas, Komite Madrasah berperan dalam memberikan gagasan, ide dan harapan masyarakat. Sehingga beberapa kebijakan MI Istiqomah Sambas disesuaikan dengan kehendak pengguna jasa. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap peran komite, MI Istiqomah Sambas menyediakan kotak saran yang kemudian dibahas dalam rapat rutin komite.

21 Wawancara dengan Ikhwanidi Arifin, Kepala Madrasah, tanggal 8 Agustus 2014.

22 Wawancara dengan Dwi Sulistiowati, Kepala Bidang Kesekretariatan, tanggal 8 Agustus 2014.

Rapat secara interaktif antara MI Istiqomah Sambas dengan Komite Madrasah diselenggarakan secara rutin, selain untuk membahas berbagai aspek yang terkait dengan madrasah, khususnya mengenai keuangan, juga untuk menciptakan sinergitas antara MI Istiqomah Sambas dengan Komite Madrasah. Sinergitas ini dibutuhkan, karena ada anggapan di masyarakat yang memosisikan minor terhadap keberadaan Komite. Komite madrasah sering dianggap hanya sebagai stempel dan *ben per* ketika madrasah akan menaikkan dana atau pungutan sumbangan tertentu. Bahkan ada kondisi psikologis di kalangan masyarakat bahwa setiap kali mereka mendapatkan undangan pertemuan Komite madrasah, pasti akan ada “tarikan” biaya baru.

Dalam kaitan ini, MI Istiqomah Sambas memberikan peran kepada Komite madrasah secara optimal. Komite madrasah diberikan peran sebagai *Advisory agency (Penasihat)* oleh MI Istiqomah Sambas dalam beberapa kebijakan. Seperti kebijakan jam masuk sekolah pada pukul 06.30, sedangkan dewan guru harus datang lebih awal untuk bisa menyalami murid dan pulang paling akhir, serta penyediaan sarapan pagi di madrasah agar guru tidak terlambat datang dan lain-lain.<sup>23</sup>

Untuk menunjang dan mempertahankan posisi komite madrasah sebagai jaringan internal, MI Istiqomah Sambas senantiasa melakukan pertemuan rutin dengan komite madrasah secara periodik. Pelaksanaan pertemuan ini biasanya dilakukan pada:

- a. Menjelang penerimaan murid baru, pertemuan membahas tentang patokan pembayaran yang akan dikenakan kepada murid baru.
- b. Menjelang pelaksanaan UTS (Ufangan Tengah Semester), UAS (Ufangan Akhir Semester), dan Ujian Nasional (UN) bagi kelas VI.
- c. Menjelang pelaksanaan libur panjang setelah Ufangan Akhir Semester dan Bulan Ramadhan.
- d. Pada aspek-aspek pengembangan madrasah yang dirasa penting untuk dilakukan koordinasi antara MI Istiqomah Sambas dengan komite.<sup>24</sup>

---

23 Wawancara dengan Nurlaila Okiwati, Management Representative, MI Istiqomah Sambas, tanggal 9 Agustus 2014.

24 Wawancara dengan Nurlaila Okiwati, Management Representative, MI Istiqomah Sambas, tanggal 9 Agustus 2014.

Intensitas dan integritas kerja sama yang baik antara MI Istiqomah Sambas dan komite madrasah, telah membuat keberadaan komite menjadi semakin berdaya dan dapat memberikan sumbangsih yang besar, baik dalam gagasan maupun dalam upaya menjaga keseimbangan MI Istiqomah Sambas dengan pihak *user* (pengguna). Dari sinilah kemudian MI Istiqomah Sambas tidak menemukan kendala berarti dalam menentukan proporsi pendidikan yang harus dibayarkan oleh wali murid.

Apa yang dilakukan oleh MI Istiqomah Sambas dengan memberdayakan Komite madrasah, nampaknya sejalan dengan amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56, ayat 1 yang menyatakan: "Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat."

### 3. *Membangun Jaringan melalui Manajemen Madrasah*

Madrasah di Indonesia mempunyai sejarah yang sangat panjang, dari simbol perjuangan terhadap penjajahan, perjuangan politik Islam pasca kemerdekaan, hingga sekarang menjadi bagian dari sistem pendidikan yang berstandar nasional.<sup>25</sup> Hal ini sejalan dengan penjelasan Maksum bahwa latar belakang tumbuhnya sistem pendidikan madrasah karena, *pertama* faktor pembaharuan Islam, *kedua* respon terhadap politik pendidikan Hindia Belanda.<sup>26</sup>

Perkembangan fundamental dari madrasah adalah menjadi konsep pendidikan Islam yang menjabarkan fungsi hak dan kewajiban antara pendidik dengan peserta didik.<sup>27</sup> Kemudian dalam perkembangannya, madrasah tidak sekedar memiliki fungsi pendidikan, tapi juga menjelma menjadi simbol kompetisi antar-pendidikan umum (sekolah) dan pendidikan agama (madrasah).

Dengan begitu, di tengah arus modernitas masyarakat yang cenderung semakin "liar" dalam hal kebebasan bersikap, madrasah semakin memiliki peluang untuk menjadi lembaga pendidikan alternatif Islam yang dapat mencegah arus kebebasan tersebut. Madrasah dengan kurikulum yang sangat menekankan pada materi-materi keagamaan dapat dijadikan sebagai ciri khas yang menarik bagi masyarakat Islam.

25 Madrasah sebagai simbol perjuangan dan perkembangan madrasah setelah kemerdekaan. Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), 86-120.

26 Maksum, *Madrasah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 82.

27 Abdullah Fajar, *Peradaban dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1961), 62-63.

Dengan posisi madrasah yang semakin kuat dalam sistem pendidikan di Indonesia, maka madrasah dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Komponen manajerial di madrasah harus memiliki modal sosial, khususnya di bidang jaringan, sebagai perekat dalam menyatukan gerak dan langkah mewujudkan visi dan misi madrasah.

Berbagai jaringan telah dimiliki oleh madrasah juga sebagai konsekuensi dari pemberlakuan manajemen berbasis sekolah (*School Based Management*). Dalam manajemen berbasis sekolah ini, suatu kebijakan merupakan tarik ulur antara pemerintah dan masyarakat sebagai penyefenggara pendidikan. Dalam konteks bahasa kekuasaan sering diistifahkan sebagai sentralisasi versus desentralisasi, atau yang lebih populer dalam konteks keindonesiaan adalah otonomisasi.<sup>28</sup>

Secara kelembagaan, setelah MI Istiqomah terselenggara, pembentukan jaringan modal sosial akan beralih dari yayasan ke madrasah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa “jaringan melalui manajerial madrasah” secara otomatis bertumpu pada kekuatan bagaimana oprasionalisasi madrasah. Bagus tidaknya pembelajaran di madrasah akan sangat terganggu pada manajemen ini.

Keberadaan struktur manajerial MI Istiqomah yang berada di luar struktur yayasan menjadi tonggak penting dalam membangun jaringan secara fleksibel, sehingga terbentuk madrasah yang mempunyai kekuatan dalam modal sosial. Jaringan manajerial tersebut merupakan pelaksana dari kegiatan manajemen madrasah, atau pengelolaan madrasah. Hal ini dilakukan agar aktifitas yayasan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuannya dan juga tidak terjadi *overlap* tujuan madrasah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, ada dua potensi manajerial madrasah yang telah diberdayakan sebagai motor pembangunan modal sosial dalam aspek jaringan di MI Istiqomah Sambas, yaitu pimpinan Sekolah dan Dewan Guru.

#### 1) *Membargun Jaringan melalui Pimpinan Sekolah*

Dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007, disebutkan bahwa kepala sekolah (madrasah) adalah pimpinan pelaksana (manager)

---

28 Rodney T. Ogawa dan Paula A. White, "School Based Management: An Overview", dalam Allan Odden (ed.), *School Based Management: Organizing For Hight Performance* (San Francisco, Jossey Bass Publishers, 1994), 57.

yang diberi tugas oleh yayasan untuk menjalankan proses persekolahan/permadrasahan.

Selanjutnya, dalam PP No. 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan, Pasal 38, ayat 2 dijelaskan, Kepala Sekolah/ Madrasah adalah:

- a) Berstatus sebagai guru SD/MI;
- b) Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan
- d) Memiliki kemampuan kepemimpinan kewirausahaan di bidang pendidikan.<sup>29</sup>

Dewanto dan Utari menjelaskan bahwa keberhasilan memberdayakan kemampuan *interpreneurship* turut dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam membangun relasi, selain kebutuhan akan jiwa kepemimpinan atau *leadership*. Karena pada gilirannya, usaha memperoleh dan mengelola sumber dana pendidikan tidak dapat dilakukan semata-mata oleh sekolah, namun juga dengan cara memobilisasi partisipasi orangtua murid, masyarakat, dunia usaha dan berbagai pranata sosial yang ada. Mengelola sumber dana sekolah ternyata tidak hanya melibatkan modal finansial, materil, dan tenaga sekolah, namun juga berkaitan dengan mengelola modal sosial.<sup>30</sup>

Pembentukan jaringan modal yang dimaksud dalam konteks pimpinan sekolah, sebagaimana dijelaskan oleh Dewanto dan Utami, adalah “kebutuhan akan jiwa kepemimpinan”.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, di MI Istiqomah Sambas terdapat 7 (tujuh) komponen pimpinan yang berpengaruh kuat dalam pembentukan jiwa kepemimpinan, yaitu: 1) Kepala Madrasah, 2) Kepala Bidang yang terdiri atas Kepala Bidang Akademik, Kepala Bidang Kesiswaan, Kepala Bidang Keagamaan, Kepala Bidang Kesekretariatan, 3) *Management Representatif* (MR), 4) Koordinator Kelas I sampai Kelas VI, 5) Koordinator Laboratorium, terdiri dari

29 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

30 Adi Dewanto dan Rahmania Utari, Pemberdayaan Modal Sosial dalam Manajemen Pembiayaan Sekolah, dalam *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 3 Nomor 1, April 2006, 26.

Laboratorium Informatika, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam, 6) Koordinator Perpustakaan, serta 7) Koordinator UKS.

Dari tujuh komponen tersebut, komponen nomor 1 sampai komponen nomor 4 merupakan motor penggerak dinamika madrasah dalam upaya membangun modal sosial sebagai sarana untuk memajukan madrasah. Konsep manajerial dari keempat motor penggerak tersebut kemudian harus diturunkan ke dalam *job* deskripsi yang jelas dan tidak tumpang tindih. Setiap komponen yang ada harus berkomitmen untuk melakukan apa yang telah menjadi tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>31</sup>

Seluruh komponen dalam struktur organisasi yang dibentuk juga harus bekerja dalam sinergitas yang baik dan kompak karena masing-masing pelaku sudah memahami tugas dan fungsinya. Sistem pengelolaan yang baik inilah yang menjadi modal utama dalam memajukan dan mengembangkan madrasah.

Untuk membekali kualitas manajerial, pimpinan madrasah, utamanya kepala madrasah, hendaknya selalu melakukan pendampingan secara internal dan mampu meningkatkan jaringan yang bersifat eksternal. Pimpinan MI Istiqomah Sambas mengembangkan kualitas manajerial atau kepemimpinan madrasah dalam beberapa aspek, yaitu *capacity building*, transparansi dan akuntabilitas.<sup>32</sup>

Berikut akan dijabarkan aspek modal sosial dalam membentuk jaringan yang telah dikembangkan dalam kualitas manajerial di bidang *capacity building*, transparansi, dan akuntabilitas melalui pimpinan madrasah.

## 2) *Capacity Building*

*Capacity building* adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan.<sup>33</sup>

---

31 Data diolah dari pengamatan penulis pada tanggal 12-13 Maret 2013, dan telah dikonfirmasi dalam Wawancara dengan Ikhwanidi Arifin, Kepala MI Istiqomah Sambas pada tanggal 15 Maret 2015.

32 Wawancara dengan Ikhwanidi Arifin, Kepala MI Istiqomah Sambas pada tanggal 15 Maret 2015.

33 Djaman Satori dan Asep Suryana, "Peningkatan Kualitas Kerja Melalui Pola Pembinaan (*Capacity Building*) Dosen Muda Pada Program Studi Administrasi Pendidikan SP5 UPI", dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 14 No. 1, April 2013, 29. Lianne Brown, La Fond Anne, Kate Macintyre, *Measuring Capacity Building* (North Carolina: Carolina Population Centre/University of North Carolina, 2001), 25.

Selain pengertian tersebut, *capacity building* dapat pula diartikan dengan:

- a) Proses membangun kapasitas individu, kelompok, atau organisasi;
- b) Upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga;
- c) Proses kreatif dalam mengembangkan kemampuan yang sudah ada; atau
- d) Proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak.<sup>34</sup>

Berdasarkan empat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *capacity building* merupakan proses kreatif individu, kelompok atau organisasi dalam membangun kapasitas kemampuan, keterampilan, potensi, bakat, serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.

Pengembangan *capacity building* dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

- a) Adanya proses yang berkelanjutan;
- b) Memiliki esensi sebagai sebuah proses internal;
- c) Dibangun dari potensi yang telah ada;
- d) Memiliki nilai intrinsik tersendiri;
- e) Mengurus masalah perubahan; dan
- f) Menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistik.<sup>35</sup>

Dalam konteks MI Istiqomah Sambas, *capacity building* tercermin dalam setidaknya dua aspek, yaitu: *pertama*, dari aspek pimpinan

---

34 Satori dan Asep, *Peningkatan Kualitas*, 29.

35 Rida Gandara, *Capacity Building Dosen pada Jurusan di Perguruan Tinggi Badan Hukum Miliki Negara* (Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan UPI, 2008), 16.

madrasah, kepala MI Istiqomah Sambas, memiliki kemampuan individu dan kreatifitas dalam menciptakan jaringan modal sosial.

*Kedua*, MI Istiqomah Sambas merupakan lembaga pendidikan yang senantiasa berproses dan memiliki kepentingan yang dibangun dari komponen sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan nilai intrinsik yang sesuai dengan visi dan misi MI Istiqomah Sambas. Semua capaian tersebut didapat dan dibangun melalui proses perubahan struktur, manajerial, dan infrastruktur yang integratif dan holistik.

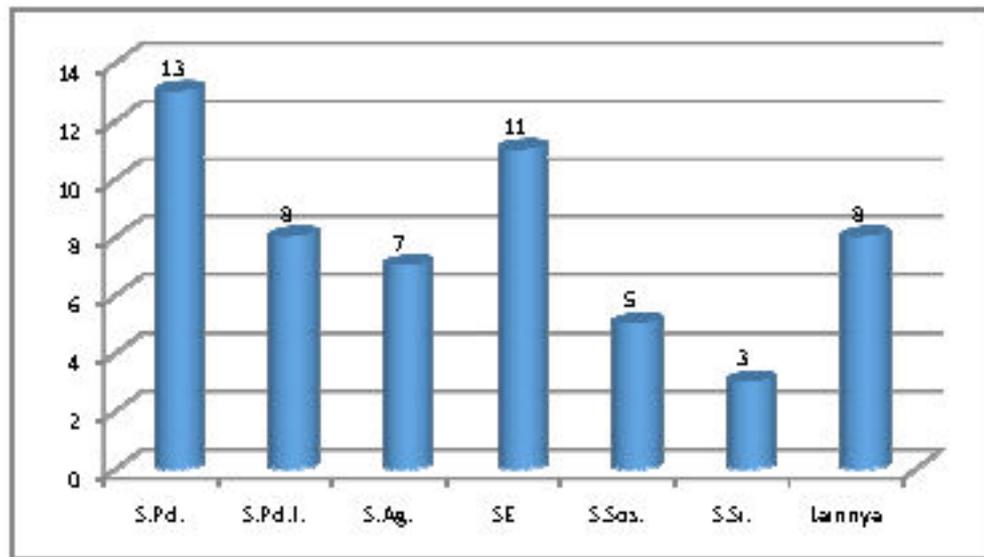
Adapun dari sisi pengembangannya, *capacity building* di MI Istiqomah Sambas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengembangan SDM yang berkelanjutan

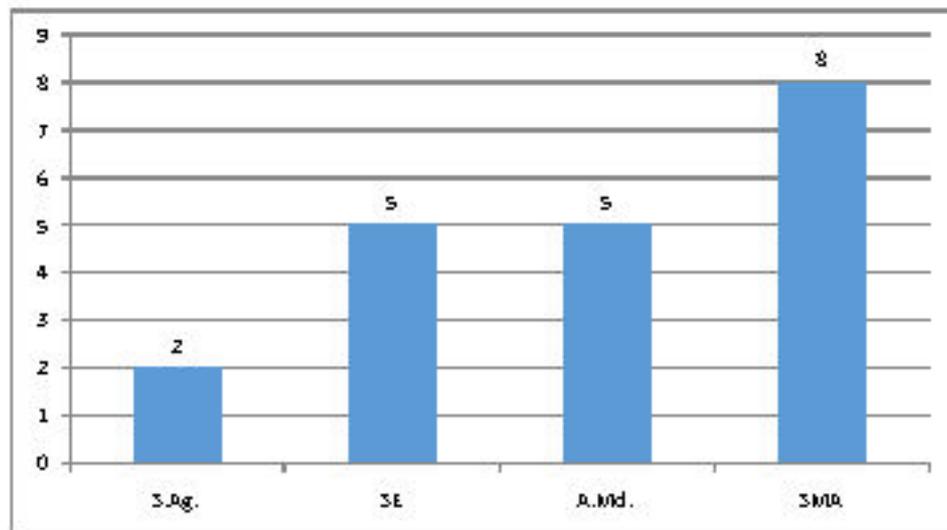
MI Istiqomah Sambas mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) berjumlah 55 tenaga pendidik (guru) dan 20 tenaga kependidikan (pegawai) dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, dari aspek akademik atau pengetahuan keagamaan Islam. Kondisi SDM dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda tersebut memunculkan kebijakan dalam pengembangan SDM yang berkelanjutan di MI Istiqomah Sambas, yang datanya terlihat pada kebijakan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. MI Istiqomah Sambas menempatkan tenaga pendidik sebagai SDM paling penting dalam pengembangan madrasah yang berkelanjutan dan menciptakan jaringan modal sosial.

Peningkatan kompetensi berkelanjutan dilakukan oleh MI Istiqomah Sambas antara lain melakukan pengiriman tenaga pendidik untuk mengikuti *workshop*, sertifikasi guru kelas dan manajemen perpustakaan.

Gambar 4.1  
Data Guru Berdasarkan Gelar Kesarjanaan



Gambar 4.2  
Data Komposisi Tenaga Kependidikan



Pengembangan SDM yang berkelanjutan, sebagai proses dalam pembangunan *apaci'y building* di MI Istiqomah Sambas, dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: pengembangan tenaga pendidik (guru) dan pengembangan tenaga kependidikan (pegawai).

b) Pengembangan Tenaga Pendidik

Pengembangan tenaga pendidik yang berkelanjutan diaplikasikan pada distribusi mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang sesuai dengan bidang keilmuan yang bersangkutan. Berdasarkan data pada gambar 4.1 (data guru) menunjukkan

bahwa tenaga pendidik atau guru di MI Istiqomah Sambas berlatar belakang sarjana (akademik) yang bervariasi sehingga dapat ditindaklanjuti dalam pembagian mata pelajaran kepada masing-masing guru sesuai dengan keahliannya. Mata pelajaran keagamaan, seperti al-Qur'an dan al-Hadits, Akidah Akhlak, Bahasa Arab, dan lain-lain diampu oleh guru dengan latar belakang S.Pd.I., dan S.Ag. Sedangkan guru-guru dengan gelar kesarjanaan umum diberi tugas untuk mengajar mata pelajaran umum, seperti matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain.<sup>36</sup>

Pengembangan tenaga pendidik yang berkelanjutan dalam proses pengembangan *apacity building* juga difokuskan pada pengembangan kualitas dan wawasan keagamaan bagi tenaga pendidik yang mempunyai latar belakang akademik umum, atau tidak mempunyai latar belakang sosial keagamaan. Kebijakan ini merupakan konsekuensi logis dari lembaga madrasah yang dalam kegiatannya adalah menciptakan sumber daya yang memiliki kemampuan pengetahuan umum dan pengetahuan keagamaan.<sup>37</sup>

#### c) Pengembangan Tenaga Kependidikan

Dari dua puluh tenaga kependidikan (pegawai) yang dimiliki oleh MI Istiqomah Sambas hanya tujuh yang bergelar sarjana, lima Ahli Madya, dan delapan setingkat SMA/MA. Fokus dari pengembangan tenaga kependidikan adalah pemahaman masing-masing komponen tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing lini organisasi madrasah, kemudian *job description* dari masing-masing individu dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Berdasarkan pada SOP dan *job description*, maka pengembangan Sumber Daya Manusia MI Istiqomah dilakukan melalui *workshop* keorganisasian, kesekretariatan,

---

36 Berdasarkan pada data penyebaran mata pelajaran Tahun Ajaran 2013. Data telah dikonfirmasi dan diperdalam melalui wawancara dengan Agus Triyono, S.Ag (Kabid Akademik), dan Arjudin Hasan Asy'at (Staf Kabid Akademik), pada tanggal 13 Maret 2014.

37 Meskipun kualifikasi tenaga pendidik menurut Undang-Undang Guru dan Dosen untuk level madrasah cukup dengan strata 1, namun peningkatan kompetensi guru dalam bidang keilmuan selalu mendapatkan perhatian dari MI Istiqomah Sambas. Ini dibuktikan dengan, baru-baru ini, kerjasama dengan Program Pascasarjana IAIN Purwokerto dalam hal studi lanjut tenaga pendidik di MI Istiqomah Sambas di Program Pascasarjana IAIN Purwokerto. Jika program ini dapat terlaksana dengan baik, maka pada tahun 2019 MI Istiqomah Sambas akan memiliki tenaga pendidik berkualifikasi S2 sebanyak 30 orang (Wawancara dengan Ikhwanid Arifin, Kepala Madrasah, tanggal 5 Februari 2016).

dan kearsipan. Misalnya, pada Rabu, 12 Maret 2014, seluruh Tenaga Kependidikan diikutsertakan dalam peningkatan kualitas kesekretariatan dan kearsipan, dalam kegiatan *Workshop* Peningkatan Kualitas Kesekretariatan dan Kearsipan Bagi Tenaga Kependidikan Madrasah Ibtidaiyah. Narasumber dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto, Drs. Rohmad, M.Pd, dan Dr. H. Suwito, M.Ag.<sup>38</sup>

MI Istiqomah Sambas belum melakukan kebijakan pengembangan tenaga kependidikan yang mengarah pada pendidikan berkelanjutan pada tenaga kependidikan yang belum sarjana strata satu. Hal ini dikarenakan padat dan banyaknya pekerjaan sekolah yang harus dilakukan oleh 20 tenaga kependidikan yang dimiliki MI Istiqomah Sambas. Dari sisi waktu, kondisi ini jelas tidak memungkinkan bagi mereka untuk melanjutkan jenjang pendidikan sarjana. Karyawan yang berkualifikasi ahli madya tidak ada lagi transfer, sedangkan bagi yang SMA tidak ada lagi perguruan tinggi (PTAI ataupun PTU) yang membuka kelas jauh atau kelas akhir pekan di daerah Purbalingga dan sekitarnya. Sedangkan kerja tenaga kependidikan adalah dari Hari Senin sampai Sabtu, dari Jam 07.00 sampai 15.00 WIB.

### 3) *Esensi dalam Proses Internal*

Esensi dalam proses internal dalam konteks pembentukan jaringan modal sosial melalui kepemimpinan kepala madrasah, sesuai dengan desain penelitian, difokuskan pada proses seleksi kepemimpinan madrasah di MI Istiqomah Sambas.

Sejak tahun 2012, MI Istiqomah Sambas melakukan kebijakan peningkatan *upacy building* dalam manajemen madrasah dengan sistem seleksi kepemimpinan yang terukur, pembatasan masa bakti kepala sekolah, *rolling* jabatan di bawah kepala madrasah yang transparan, uji kompetensi secara berkala, *workshop* manajemen sekolah, dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Untuk menjadi Kepala Madrasah di MI Istiqomah Sambas, dibutuhkan setidaknya dua syarat, yaitu: *yarat ol'yektif* dan *yarat*

38 Dokumentasi MI Istiqomah Sambas, dan Wawancara dengan Nurlaila Okiwati, *Management Representatif (MR)* MI Istiqomah Sambas, pada tanggal 14 Maret 2014.

39 Dokumen dan wawancara dengan Ikhwandi Arifin, Kepala Madrasah, tanggal 12 Oktober 2014.

*subyektif*. Syarat obyektif merupakan syarat bagi calon kepala madrasah yang secara administrasi terukur jelas dan sulit untuk dimanipulasi, meliputi:

- a) Umur minimal 40 tahun, berpendidikan S2 (Master), dan memiliki jenjang karier baik dengan bukti prestasi akademik; dan,
- b) Mempunyai karya ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ber-ISSN, atau menjadi narasumber temu ilmiah, diskusi atau seminar pada level lokal, nasional, ataupun regional;

Sedangkan yang termasuk dalam syarat subyektif adalah:

- a) Dedikasi di bidang sosial yang sangat potensial dalam menciptakan jaringan madrasah ke luar; dan
- b) Interview tentang visi, misi, dan program kerja dalam peningkatan kualitas manajemen madrasah.<sup>40</sup>

Dalam melaksanakan sistem seleksi yang bersifat obyektif dan subyektif tersebut, MI Istiqomah Sambas telah bekerja sama dengan konsultan yang bergerak di bidang penjaminan mutu yaitu dengan Nadiya Consultants dan Delta Pas untuk memperoleh sertifikat ISO.<sup>41</sup>

Hasil kerja sama ini menghasilkan *job* deskripsi yang tersusun sesuai dengan manajemen organisasi atau manajemen mutu organisasi yang profesional, yang terdokumentasikan pada Edisi Mei 2005 dan telah diperbaharui pada Edisi 2010. Manajemen mutu ini telah diaudit oleh auditor eksternal, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah dengan predikat A dan Delta Pas dengan memperoleh sertifikat ISO 9001-2000.<sup>42</sup>

#### 4) *Pengembangan dan Pembangunan Potensi MI Istiqomah*

Pengembangan dan pembangunan potensi MI Istiqomah yang dikaitkan dengan *apacity building* difokuskan pada pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Keberhasilan dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur MI Istiqomah dapat dilihat pada tabel berikut:

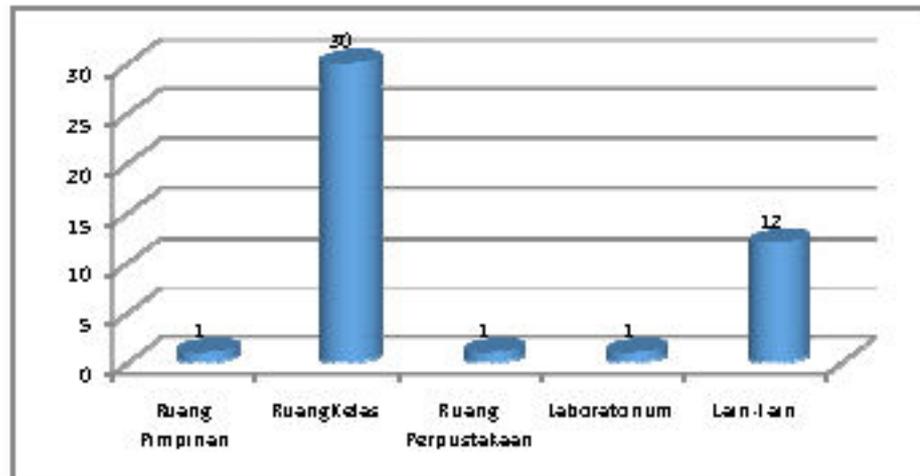
---

40 Dokumen dan wawancara dengan Ikhwanidi Arifin, Kepala Madrasah, tanggal 12 Oktober 2014.

41 Dokumen MI Istiqomah Sambas Tahun 2014.

42 Dokumen MI Istiqomah Sambas Tahun 2014.

Gambar 4.3.  
Infrastruktur MI Istiqomah Sambas



Terdapat dua infrastruktur yang senantiasa menjadi perhatian dalam pengembangan dan pembangunan terhadap potensi MI Istiqomah yaitu pada tata ruang dan jumlah ruang dalam proses belajar mengajar (ruang kelas). Ruang kelas merupakan ruang kedua setelah rumah, sehingga kenyamanan dan estetika ruang menjadi perhatian agar peserta didik bisa menikmati segala proses pembelajaran.<sup>43</sup>

Pengembangan dan pembangunan lain yang terus dilakukan oleh manajemen MI Istiqomah dalam menggali potensi adalah peningkatan kualitas perpustakaan dan laboratorium, khususnya laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

#### 5) Pengembangan dan Pembangunan Nilai Intrinsik

Nilai intrinsik adalah sifat baik dari benda yang bersangkutan, atau suatu tujuan untuk kepentingan benda itu sendiri. Dalam istilah yang berlawanan juga dikenal nilai ekstrinsik, yaitu sifat baik dari suatu benda sebagai alat atau sarana untuk sesuatu hal lainnya, yakni bersifat sebagai alat untuk membantu.

Berdasarkan pengertian nilai intrinsik tersebut di atas, maka pengembangan dan pembangunan nilai intrinsik dalam MI Istiqomah Sambas telah diimplementasikan dalam bentuk pengembangan berbagai metode, materi, dan sistem pembelajaran yang mengarah pada terwujudnya nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam inilah yang kemudian menjadi model pembangunan lembaga yang

43 Dokumen dan wawancara dengan Ikhwandi Arifin, Kepada Madrasah, tanggal 12 Oktober 2014.

terus menerus dipertahankan, sehingga seluruh komponen yang ada di lingkungan madrasah menjadi bagian dalam pengembangan nilai intrinsik madrasah tersebut.

Pengembangan dan pembangunan nilai intrinsik sangat terlihat pada pembangunan siswa melalui kurikulum yang berkarakter Islam tapi tetap mengacu pada standar sistem pendidikan nasional.<sup>44</sup> Nilai intrinsik keislaman dilakukan dengan pengembangan dan pendalaman baca kitab *keuning* yang diberikan kepada saat siswa kelas VI, tartil al-Quran, hafalan al-Quran dan pelaksanaannya dilakukan secara intra maupun ekstrakurikuler.

#### 6) *Manajemen dalam Masalah Perubahan*

Manajemen dalam masalah perubahan merupakan pengelolaan madrasah dalam upaya meningkatkan kapasitas individu dan organisasi agar siap menghadapi segala perubahan yang ada, baik menyangkut regulasi nasional atau kebijakan lokal madrasah yang bermuara pada usaha peningkatan kualitas MI Istiqomah Sambas.

Jika ini dikaitkan dengan kapasitas yang berhubungan dengan kelembagaan madrasah, maka setiap individu yang terlibat dan termasuk dalam proses keberlangsungan madrasah merupakan bagian yang dapat melakukan perubahan tersebut. Terutama pada individu yang terkait langsung dengan proses pembelajaran (guru) dan menjadi *leading sector* dalam menciptakan kualitas produk MI Istiqomah (peserta didik). Keberhasilan perubahan yang diukur dari kualitas peserta didik dengan sendirinya akan berdampak pada tingkat jaringan yang luas karena peningkatan kepercayaan kepada MI Istiqomah.

#### 7) *Pendekatan Terintegrasi dan Holistik*

Integrasi merupakan pendekatan yang menyatu antar-komponen yang bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan holistik merupakan istilah yang menunjuk pada sistem, ajaran, dan proses yang mengandung nilai kesucian dalam arti sosial, akademik, ataupun agama.

Pendidikan holistik adalah suatu filsafat pendidikan yang bersumber dari pemikiran bahwa pada dasarnya setiap individu dapat

---

44 Materi dan bangunan kurikulum akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam bab ini.

menemukan identitas dirinya, tujuan hidupnya dan makna hidupnya melalui hubungan yang dijalin dengan masyarakat dan nilai-nilai spiritual yang dimilikinya serta lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Bila ditilik dari historinya, pendidikan holistik bukanlah sebuah hal yang baru di dalam kehidupan manusia, di mana hal ini sebenarnya telah diterapkan sejak lama dan dikenal dengan cukup luas.

Pendidikan holistik pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk membantu di dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh individu. Hal tersebut dilakukan dalam suasana pembelajaran yang berbeda dan lebih menyenangkan, demokratis, serta humanis. Hal ini akan diterapkan melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan yang terdapat di sekitar kita.<sup>45</sup>

Pendekatan terintegrasi dan holistik dapat dilihat pada perilaku yang diterapkan pada seluruh sumber daya yang terlibat dalam proses dan operasional organisasi MI Istiqomah Sambas, yaitu pada aspek:

- i. Kemandirian pimpinan tanpa intervensi dari pihak luar dalam proses dan penentuan kebijakan pengembangan madrasah;
- ii. Setiap guru senantiasa berusaha untuk pengembangan diri dalam kualitas dari aspek materi dan metode pembelajaran;
- iii. Setiap tenaga kependidikan yang memahami tentang tugas pokok dan fungsi, SOP, serta job deskripsi masing-masing.<sup>46</sup>

a) Manajemen Keterbukaan

Manajemen berasal dari kata *management* (*nouns* dari verba *to manage*) yang bermakna mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sehingga manajemen adalah pengurusan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengelolaan.<sup>47</sup> Kata “keterbukaan” atau transparansi adalah penyediaan informasi oleh perusahaan yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah agar perusahaan menjaga obyektifitas dalam menjalakan bisnisnya. Prinsip keterbukaan

---

45 Anonim, *Pengertian Holistik, Pengertian Menurut Para Ahli (online)*, 10 Februari, 2016, ([HTTP://WWW.PENGETIANMENURUTPARAAHLI.NET/PENGETIAN-HOLISTIK/](http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-holistik/)), diakses tanggal 12 Mei 2016.

46 Hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian pada tanggal 11-12 Maret 2016.

47 Ayan Triyono, *Paradigma Manajemen Sumberdaya Manusia* (Yogyakarta: Oryza, 2012), 12.

yang diwajibkan oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi kerahasiaan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak pribadi.<sup>48</sup>

Jika manajemen dan keterbukaan tersebut diturunkan dalam wilayah organisasi madrasah maka dapat dimaknai bahwa manajemen madrasah harus mengelola organisasinya dengan cara penyediaan informasi yang mudah diakses oleh pemangku kebijakan, *stakeholder*, dengan selalu menjaga obyektivitas. Dalam konteks modal sosial, manajemen keterbukaan atau *transparance management* merupakan kebijakan pimpinan MI Istiqomah Sambas dalam berbagai aspek, terutama di bidang manajemen keuangan sekolah atau madrasah.

Manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu bidang garapan substansi administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan oleh kepala sekolah. Manajemen keuangan sekolah tidak hanya terkait dengan pengelolaan sumber dana pendidikan yang digunakan untuk proses pendidikan, tetapi juga terkait dengan berbagai permasalahan (resiko) tentang pengelolaan keuangan sekolah serta upaya sekolah untuk mencari sumber-sumber pendanaan bagi kelangsungan organisasinya.<sup>49</sup>

Manajemen keterbukaan menjadi penting dalam konteks ini mengingat sistem pendidikan madrasah sebagai lembaga publik harus mempunyai kemampuan manajemen keterbukaan dalam bidang keuangan, apalagi MI Istiqomah Sambas merupakan madrasah swasta yang sektor pendanaannya banyak bertumpu pada donasi masyarakat. Manajemen keterbukaan dalam bidang keuangan ini akan menciptakan tidak hanya kemudahan dalam menciptakan jaringan ke luar, tapi juga menciptakan *trust* (kepercayaan) terhadap madrasah.

Pimpinan madrasah mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan manajemen keterbukaan di bidang

---

48 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006), 5.

49 David Wijaya, "Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan", dalam *Jurnal Pendidikan Penabur*, No. 13/Tahun ke-8/Desember 2009, 81.

keuangan. Jangan sampai MI Istiqomah Sambas, sebagai institusi publik, justru menerapkan model *asymmetric information problem*, yaitu suatu teori keuangan yang menyatakan adanya problem kecenderungan dari salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk tidak bersikap jujur.<sup>50</sup>

Implementasi dari manajemen keterbukaan yang bisa dilihat di MI Istiqomah Sambas nampak dalam beberapa kebijakan sebagai berikut:

- i. Sistem penggajian menggunakan standar upah minimum regional (UMR) dengan penjenjangan masa kerja dan kualifikasi pendidikan, ditambah lagi dengan uang lauk pauk;
- ii. Sistem insentif *take home pay*;<sup>51</sup> dan
- iii. Sistem kegiatan yang didasarkan pada kepanitiaan. Dengan demikian sumber-sumber kegiatan yang dapat diberikan honor dapat dikontrol dengan komposisi Surat Keputusan Kepala Madrasah tentang Panitia Kegiatan yang diselenggarakan di MI Istiqomah Sambas.<sup>52</sup>

Bagi setiap guru biasa dan guru yang mendapat tugas tambahan, semisal sebagai pendamping kegiatan, akan mendapat honor dari kegiatan yang telah direncanakan dan kemudian difaksanakan. Penghasilan yang diperoleh di luar gaji ini, akan sangat ditentukan oleh kreatifitas dan kinerja yang difaksanakan oleh guru yang bersangkutan.<sup>53</sup>

Beberapa kebijakan di atas sangat berpengaruh positif dalam meningkatkan kepercayaan internal, terutama terhadap tenaga pendidik. Kepercayaan yang tumbuh ini secara otomatis akan membentuk pola jaringan dalam beberapa aspek manajerial madrasah. Seperti jika madrasah kekurangan tenaga

---

50 Adiwaman A. Karim. "Problematika Pengelolaan Bank Syariah", *Makalah* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Seminar Nasional Perbankan Syariah di STAIN Surakarta, 2000).

51 *Take Home Pay* adalah pembayaran yang benar-benar diterima oleh Guru dan Pegawai setelah menambahkan pendapatan-pendapatan rutin maupun insidental yang merupakan hak Guru dan Pegawai dikurangi dengan hal-hal yang sudah diatur oleh pemerintah dan kebijakan dari madrasah.

52 *Wawancara* dengan Ikhwandi Arifin, Kepala MI Istiqomah, tanggal 15 Maret 2015, dan diperkuat wawancara dengan DwiSusilowati, dan Muktar Arief Mahmudi, pada tanggal 16 Maret 2015.

53 *Wawancara* dengan Ikhwandi Arifin, Kepala MI Istiqomah, tanggal 15 Maret 2015.

pendidik, maka dengan memanfaatkan jaringan guru yang sudah terbangun akan mudah didapatkan tenaga baru.

#### b). Akuntabilitas Pendidikan

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.<sup>54</sup> Dari pengertian kebahasaan ini, dapat dipahami bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada seseorang mengenai sesuatu, tindakan, proses, hasil, dan manfaat yang bisa berupa pelaporan dan penjelasan mengenai tindakan yang dilakukan.

Dalam konteks MI Istiqomah Sambas, akuntabilitas yang dimaksud tentu akuntabilitas pendidikan, yaitu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan Pimpinan MI Istiqomah Sambas terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang telah difaksanakan, yang meliputi:

##### i) Akuntabilitas Prestasi

MI Istiqomah Sambas telah memperoleh berbagai prestasi kejuaraan yang rata-rata 10 kali dalam setahun.<sup>55</sup> Prestasi yang diraih dalam berbagai bidang seperti: manajemen madrasah berprestasi di Purbalingga, prestasi madrasah Islami di Purbalingga, dan lain-lain. Berbagai prestasi tersebut menunjukkan bahwa MI Istiqomah Sambas sangat berhasil dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Dengan prestasi yang telah diperoleh tersebut, pimpinan MI Istiqomah Sambas lebih mudah dalam memperkuat jaringan ke luar. Karena dengan berbekal prestasi tersebut otomatis meningkatkan akuntabilitas di masyarakat.

Akuntabilitas prestasi mempunyai makna yang strategis, utamanya dalam memperkuat jaringan yang sudah terjalin dengan orang tua murid, masyarakat dan pemerintah. Apa lagi di era keterbukaan, orang tua atau

54 Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1987), 16.

55 Dari tahun 2001 sampai dengan 2014, MI Istiqomah Sambas telah memenangi berbagai lomba sebanyak 104 kejuaraan pada tingkat lokal maupun nasional. *Dokumentasi* pada profil MI Istiqomah Sambas Purbalingga Tahun 2014.

wali murid, masyarakat dan pemerintah sudah sepantasnya memberi apresiasi kepada madrasah atas prestasi yang diperolehnya. Sehingga yang demikian ini dapat menjadi faktor pendorong untuk terus meningkatkan kualitas manajemen madrasah.

MI Istiqomah Sambas telah berhasil mempertahankan akuntabilitas yang diberikan oleh masyarakat. Kaitannya dengan hal ini, MI Istiqomah Sambas telah memberikan jaminan kompetensi yang lebih dari apa yang seharusnya diperoleh dan diharapkan oleh masyarakat, yaitu kredibilitas lembaga dalam berbagai prestasi manajemen pengelolaan prestasi umum madrasah.

ii) Akuntabilitas Evaluasi Akhir Murid

Tujuan akhir dari proses pendidikan secara pragmatis adalah tingkat kelulusan murid yang optimal. Untuk mencapainya, MI Istiqomah Sambas selalu memperhatikan evaluasi akhir murid kelas VI dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Akuntabilitas pada aspek evaluasi akhir murid menjadi yang paling penting. Karena keberhasilan dalam UN, akan membuat MI Istiqomah Sambas dilihat oleh masyarakat sebagai sekolah yang baik dalam mengelola lembaga pendidikan.

Sekolah atau madrasah yang dapat meluluskan muridnya sampai 100 persen maka akan dapat menciptakan tingkat akuntabilitas positif. Cara pandang yang demikian, membuat pihak MI Istiqomah Sambas selalu berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki guna mencapai tingkat kelulusan siswa di level sempurna (100 persen). Ini terbukti, sejak tahun 2006/2007 tingkat kelulusan siswa MI Istiqomah Sambas dalam Ujian Nasional atau Madrasah selalu mencapai persentase 100 atau peringkat sempurna.<sup>56</sup>

Selain melalui UN, akuntabilitas evaluasi murid MI Istiqomah Sambas juga dipertanggungjawabkan

---

56 Dokumen MI Istiqomah Sambas, Tahun 2014.

melalui evaluasi pada pengembangan pengetahuan dan kompetensi keislaman khusus di luar kurikulum utama, yaitu keberhasilan murid dalam menguasai kompetensi tambahan dalam program *taḥfīz al-qur'ān* (wajib) dan *qirā'at al-ḥutub* untuk siswa kelas lima dan enam, dan kemampuan menerjemahkan al-Quran dengan pendekatan nahwu atau tata bahasa (Metode Tamyiz).

Metode setoran materi hafalan al-Qur'an dilakukan oleh guru BTTQ (Baca Tulis Teks al-Qur'an) yang telah dilakukan secara bertahap sejak murid kelas III. Untuk meningkatkan akselerasi tingkat hafalan murid, MI Istiqomah Sambas telah menentukannya menjadi program rutin sebelum dan setelah pelajaran usai. Pada akhir semester, murid harus setor hafalan kepada guru BTTQ dengan materi yang telah dihafal setiap hari. Pemantauan program ini bekerja sama dengan koordinator kelas.

Kerja sama yang lain dalam bentuk tambahan materi adalah dalam bidang *Qirā'at al-ḥutub*. Program ini tidak wajib, tapi diberikan bagi murid yang ingin dapat membaca kitab-kitab dasar agama. Materi tambahan ini hanya berlaku untuk murid kelas V dan VI. Kitab-kitab yang dipelajari dalam *qirā'at al-ḥutub* adalah kitab fiqh *Matan Fath al-Qarib (Taqrīb)*,<sup>57</sup> yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa.

Pada dasarnya, materi *taḥfīz al-Qur'ān* (juz 'amma) juga diterapkan di beberapa sekolah, seperti SD Al-Irsyad Purwokerto, MIN Purwokerto, MI Ma'arif Jatiwinangun, dan MI Ma'arif Pageraji. Namun demikian, di sekolah-sekolah tersebut, kegiatan menghafal juz 'amma dilakukan di masing-masing sekolah. Ini berbeda dengan MI Istiqomah yang melaksanakan program tahfiz tersebut melibatkan dan bekerjasama dengan lembaga lain, yaitu Yayasan UMMI. Dari sisi pembinaan dan peningkatan hafalan murid tentu model seperti ini memiliki beberapa

---

57 Kitab *Matan Fath al-Qarib* yang ditulis oleh Abū Syujā' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Ashfihani merupakan kitab yang sangat populer, bahasa arabnya mudah dipelajari dan dipahami, oleh karenanya kitab tersebut hampir dipakai sebagai materi utama pada seluruh pondok pesantren di Indonesia.

keunggulan, baik dari sisi metode maupun dari nilai tambah berupa semakin kuatnya jaringan sosial MI Istiqomah Sambas.

8) *Membar.gun Jaringan Melalui Dewan Guru*

Dewan guru adalah sekelompok guru yang bertugas mengajar di MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Pengelompokan dewan Guru MI Istiqomah Sambas telah terfembagakan dalam wadah MGMP MI Istiqomah (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas. MGMP MI memiliki anggota 55 orang dengan latar belakang sarjana multi disiplin (S.Pd., SE., SH., S.Ag. S.T). Keragaman latar belakang pendidikan ini merupakan sumber modal sosial terbesar dan strategis karena intensitas hubungan langsung dengan sumber jaringan luar bisa terbangun dengan sendirinya.

Dalam konteks modal sosial, kelompok guru merupakan sumber utama yang dapat diandalkan dalam mempertahankan keberlangsungan jaringan MI Istiqomah Sambas. Tugas utama kelompok guru adalah:

a) *Membangun Jaringan dengan Prestasi Murid*

Dewan guru merupakan elemen dasar untuk menciptakan kualitas sumber daya murid untuk meraih prestasi akademik dan nonakademik. Ketercapaian prestasi akademik ditandai dengan nilai Ujian Nasional dan Ujian Madrasah dengan rata-rata yang tinggi dan ketercapaian prestasi nonakademik dengan memenangi berbagai lomba, baik yang bersifat lokal maupun nasional.

Untuk mencapai prestasi akademik, pihak madrasah telah mengambil kebijakan kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru. Salah satunya adalah dengan diadakannya *Workshop Active Learning*, yaitu pengembangan berbagai metode cara mengajar aktif. Kegiatan ini dibutuhkan supaya KGMI Istiqomah Sambas memiliki keterampilan, dan kreatifitas dalam mengajar, sehingga murid menjadi senang dan aktif.<sup>58</sup>

---

58 Wawancara dengan Agus Triono, Kabid Akademik, pada tanggal 28 September 2014. Kegiatan *Workshop Active Learning* dilaksanakan pada tanggal 21-24 Juni 2011 bekerjasama dengan Tim IELT STAIN Purwokerto.

Kemampuan sumber daya MGMP MI Istiqomah Sambas yang seluruhnya merupakan sarjana S.1, ditambah penguasaan *active learning* yang baik, tentu akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas guru dalam mengajar di kelas. Strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa agar lebih bergairah dan aktif ternyata membawa implikasi yang sangat baik kepada siswa. Mereka selalu merasa nyaman dan senang dalam mengikuti pembelajaran.<sup>59</sup> Bahkan untuk beberapa mata pelajaran yang secara umum dianggap sulit, seperti matematika dan IPA ternyata dengan hasil *workshop active learning* menjadikan interaksi guru dan murid semakin aktif dan kreatif, juga materi tampak lebih mudah dicerna oleh siswa. Hal yang paling penting adalah suasana kelas lebih dinamis dan pelajaran yang semula cenderung menjemukan menjadi lebih rileks dan bahkan tampak bergairah dan antusias.<sup>60</sup>

Keberhasilan tersebut menjadikan MGMP MI sebagai *link* atau garis depan dalam berkomunikasi atau mengkomunikasikan kepada walimurid atau komite tentang apapun yang ada kaitannya dengan pembelajaran. *Link* yang semacam ini, terbentuk bukan dari manajerial atau pimpinan madrasah, melainkan suatu yang sudah menyatu dengan tanggungjawab mereka sebagai guru. Oleh karena, komponen terpenting, menurut hemat penulis, dalam sumber jaringan yang berhubungan langsung dengan grup (kelompok) wali murid adalah MGMP MI.

b) Membangun Jaringan dalam Kegiatan Sosial

MGMP MI banyak melakukan kegiatan sosial yang dilaksanakan dalam kendali MI Istiqomah Sambas, baik dalam kelompok atau perseorangan. Namun yang potensial dalam mendukung terhadap keberlangsungan sumber jaringan adalah yang dilakukan dalam bentuk kelompok di bawah kendali MI Istiqomah Sambas.

Kegiatan kelompok tersebut merupakan kegiatan reguler dalam bentuk kegiatan sosial, seperti Bazar Pasar Murah dalam

---

59 Wawancara dengan beberapa guru, antara lain Puspita Wijayanti, S.Pd., Eluh Subekti, S.Sos., dan Aid Muwalida, S.Pd., pada tanggal 15 Maret 2014.

60 Wawancara dengan guru Matematika kelas VI, Bambang Eko Saputra dan Kholik Agus Nurohman, S.Pd.I., pada tanggal 15 Maret 2014.

rangkaian kegiatan ulang tahun MI Istiqomah Sambas, Bakti Sosial MI Istiqomah Sambas yang juga dikelola pelaksanaannya oleh MGMP MI, dan kerja sama dengan berbagai lembaga komersial seperti produk susu dalam rangkaian kegiatan perlombaan-perlombaan seperti lomba mewarnai dan melukis bagi TK (Taman Kanak-kanak) dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) se-Kota Purbalingga.<sup>61</sup>

Adapun kegiatan MGMP MI yang bersifat mandiri adalah penawaran kepada berbagai sekolah TK dan PAUD untuk mengadakan kegiatan bersama dalam pengembangan kualitas anak didik murid sebelum masuk ke tingkat sekolah dasar atau madrasah. Penawaran ini sifatnya terbuka terhadap seluruh sekolah dini yang ada di wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

## B. MEMBANGUN JARINGAN EKSTERNAL

Jaringan eksternal merupakan sumber modal sosial MI Istiqomah Sambas yang terbentuk dari kerja sama dengan pihak lembaga eksternal (luar) dan keberadaannya bukan *in* dan tidak langsung terlibat dalam manajemen madrasah. MI Istiqomah Sambas telah membangun kerja sama dengan lembaga eksternal yang berhubungan dengan lembaga pendidikan secara umum, seperti Kemenag, Pemda, Sekolah Dasar, dan Perguruan Tinggi.

Membangun jaringan melalui jalur eksternal dilakukan dengan mengkoneksikan grup jaringan yang telah terbentuk di masyarakat dalam rangka penguatan modal sosial MI Istiqomah Sambas. Disebut jaringan eksternal karena grup jaringan tersebut merupakan kelompok yang berada di luar struktur yayasan dan manajemen madrasah, namun keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisah dengan madrasah dan keberadaannya mempunyai fungsi yang sangat strategis.

Dalam kaitan ini, penulis membagi sumber jaringan eksternal ke dalam dua kelompok; yaitu jaringan eksternal dalam (*inward*), dan jaringan eksternal luar (*outward*). Jaringan internal merupakan grup sosial yang keberadaannya merupakan bagian dalam proses yang berpengaruh terhadap keberlangsungan jaringan madrasah, yaitu Komite Madrasah.

---

61 Wawancara dengan Agus Triyono, S.Ag. [Kepala Bidang Akademik] dan Arjudin Hasan Asy'at [Staf Kabid] MI Istiqomah Sambas, pada tanggal 12 Maret 2014.

Sedangkan sumber jaringan eksternal merupakan grup sosial yang keberadaannya sebagai lembaga yang mempunyai hubungan kerja sama dengan MI Istiqomah Sambas, dan lembaga tersebut berada di luar atau tidak terikat langsung dengan manajemen madrasah. Hubungan dengan jaringan dengan pihak luar ini, juga yang dapat memperkuat eksistensi madrasah.

### **1. Wali Murid**

Wali murid merupakan orang tua kandung atau orang tua wali dari seluruh murid MI Istiqomah Sambas. Keberadaannya bukanlah grup sosial yang langsung terikat dengan pelaksanaan dan kebijakan madrasah seperti pimpinan madrasah, dewan guru, atau komite yang diamanatkan peraturan Mendiknas dan perundang-undangan. Namun demikian, keberadaan wali murid sangat strategis dalam memperkuat jaringan yang bisa dijadikan sebagai modal sosial bagi MI Istiqomah Sambas untuk mengembangkan diri.

Keberadaan wali murid dalam konteks modal sosial merupakan komponen jaringan terbesar bagi MI Istiqomah Sambas. Tanpa wali murid seluruh aspek modal jaringan tidak berjalan. Karena kehadiran murid tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar, pilihan tempat belajar sangat ditentukan oleh pilihan wali murid. Ini berbeda dengan pilihan sekolah di tingkat SMP/MTs, atau SMA/MA/SMK banyak aspek yang terlibat, seperti prestasi dan nilai ujian nasional, ekstra, dan lain-lain. Dalam hal ini, murid sudah bisa menentukan pilihan tempat belajar (sekolah) sesuai dengan keinginannya.<sup>62</sup>

MI Istiqomah Sambas telah melakukan berbagai aktifitas yang sering melibatkan keberadaan seluruh wali murid. Ini sangat bermanfaat dalam kaitannya dengan kontribusi ide atau gagasan dari wali murid mengenai pengembangan madrasah yang belum terakomodasi dalam rapat koordinasi antara MI Istiqomah Sambas dengan Komite. Beberapa kegiatan madrasah yang diikuti oleh wali murid adalah:

- a. Pelibatan seluruh wali murid melalui undangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).
- b. Pertemuan seluruh wali murid perkelas yang dipimpin oleh wali kelas. Kegiatan ini diselenggarakan 6 (enam) kali pertahun. Satu kali

---

62 Berdasarkan pengalaman penulis, dan observasi di lingkungan penulis terhadap pilihan sekolah tingkat Sekolah Dasar/Madrasah seorang anak sangat ditentukan oleh orang tuanya.

pada masa awal ajaran baru, dua kali menjelang ulangan tengah semester, 2 (dua) kali menjelang ulangan akhir semester, dan 1 (sekali) pada saat perpisahan kelas.<sup>63</sup>

- c. Pengajian rutin yang dilakukan setiap 40 hari atau *selapanan*.<sup>64</sup> Pengajian ini diikuti oleh seluruh orang tua wali murid dan dilaksanakan pada hari Sabtu. Sebagai penceramahnya diambilkan dari latar belakang NU dan Muhammadiyah atau yang lain secara bergantian. Sebelum acara inti dimulai, orang tua disugahi dengan kemampuan murid-murid dalam membaca *kitab kuning* dan menerjemah al-Quran dengan menggunakan Metode Tarmiyiz.<sup>65</sup> Dengan tampilan tersebut orang tua merasa sangat tidak rugi menyekolahkan anak di madrasah ini. Hal ini juga berimplikasi terhadap semakin meningkatnya rasa kepercayaan orang tua wali kepada madrasah.

Wujud pragmatis dari meningkatnya kepercayaan tersebut adalah partisipasi seluruh orang tua wali terhadap infak yang diedarkan. Mereka menyumbangkan sebagian uangnya sesuai kemampuan yang dimiliki sebagai ekspresi partisipasi untuk membesarkan madrasah. Tanpa adanya partisipasi tentunya nilai-nilai kerja sama akan semakin tumpul. Tingginya partisipasi dalam setiap aktivitas muncul dari akar budaya dan agama yang menyadarkan mereka bahwa orang yang berinfaq akan menempati posisi terhormat di mata Allah. Selain itu, juga dipengaruhi oleh sikap kedermawanan yang ditunjukkan oleh keluarga Sambas.

Bentuk partisipasi wali murid kepada madrasah sudah bukan lagi keuntungan atau prestasi yang bersifat pribadi, namun lebih bersifat kolektif dan kelembagaan. Rasa kepemilikan (*sense of belonging*) wali murid terhadap kemajuan madrasah juga menjadi alasan utama mereka dalam berpartisipasi.<sup>66</sup> Mereka berfikir hanya melalui pendidikan madrasah yang maju dan kompeten saja akan tercipta generasi yang “berotak German dan berhati Makkah.”<sup>67</sup>

---

63 Wawancara dengan Wali Kelas, ibu Atik Nok, dan beberapa sampel wali murid pada tanggal 25 Mei 2014.

64 Selapan adalah hitungan jumlah hari dalam bahasa Jawa. Selapan sama dengan 40 hari.

65 Observasi pada 25 Oktober 2014.

66 Disarikan dari wawancara dengan Siswadi, wali murid dan sekaligus tokoh masyarakat.

67 Istilah ini dulu sering dilontarkan pada masa pemerintahan Habib, untuk menyebut manusia terdidik yang menguasai iptek dan agama secara seimbang.

Sikap kebersamaan ini dapat meringankan beban, berbagi pikiran sehingga dapat dipastikan bahwa semakin kuat modal sosial, semakin tinggi daya tahan, daya juang, dan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Pengembangan modal sosial semacam ini oleh Putnam, sebagaimana dikutip oleh Jousairi, ditengarai mempunyai tiga dampak positif. Tiga hal itu adalah; (1) dapat menumbuhkan semangat *charity*, (2) dapat memicu *voluntarism*, dan (3) dapat membangun *civil involvement*.<sup>68</sup>

Dengan adanya pertemuan semacam ini, berbagai problem siswa juga pola hubungan antar-wali murid, wali murid dengan madrasah senantiasa terjalin dan terkomunikasikan secara baik, utamanya pada problem murid yang kurang mampu mengikuti materi pelajaran. Dengan keberadaan murid yang demikian itu, justru dapat menciptakan sumber jaringan yang berkelanjutan setiap tahun dan memberikan dampak secara tidak langsung dalam memberikan informasi positif terhadap grup sosial dari masing-masing wali murid.

## 2. *Membangun Kerja Sama dengan Kemenag*

Sebagai jalur komando dan koordinasi, kerja sama yang baik dengan Kementerian Agama (Kemenag) sudah semestinya dilaksanakan. Kemenag memiliki kepentingan secara langsung terhadap keberadaan madrasah Ibtidaiyah, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Kualitas pendidikan Islam bisa ditingkatkan apabila penanaman dan pengelolaannya dimulai sejak jenjang yang paling dasar (MI).

Keterlibatan Kemenag Purbalingga secara institusi maupun para pejabatnya secara personal dalam mendirikan dan membangun MI Istiqomah tidak bisa diingkari lagi. Bahkan, salah satu tokoh *fountain.g father*-nya MI Istiqomah Sambas, Drs. Wahyudiana, M.Pd.,<sup>69</sup> adalah Kasubag Tata Usaha Kemenag Purbalingga.

Keberadaan hubungan institusional antara yayasan dengan Kemenag dan posisi Wahyudiana sebagai salah seorang pejabat di Kemenag, berdampak pada lancarnya proses pengurusan ijin pendirian madrasah. Dalam waktu 2 minggu dari keputusan pendirian madrasah, MI Istiqomah Sambas sudah terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dan berstatus terdaftar dengan Nomor Statistik Madrasah 112330305189.

---

68 Jousairi Hasbullah, *Social Capital : Menuju Keunggulan Manusia Indonesia*, (Jakarta: MR-United Press, 2006), 56

69 Wawancara dengan Agus Triono, Kepala Bidang Akademik, pada tanggal 16 Agustus 2014.

Kerja sama dengan Kemenag yang dijalin oleh MI Istiqomah Sambas, tidak hanya berhenti di Kabupaten Purbalingga. Kerja sama ini diperluas hingga di tingkat provinsi (Kanwil) dan Pusat (Kemenag Pusat). Salah satu bentuk kerja sama itu adalah ditunjuknya MI Istiqomah Sambas sebagai koordinator persiapan penerapan Kurikulum 2013. Meskipun pada tahun 2013, Kemendikbud menolak usulan sebagai *pilot* uji coba penerapan kurikulum 2013.

Penunjukan oleh Kemenag Wilayah ini tentu memiliki dasar dan alasan tertentu. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh kepala madrasah bahwa alasan tersebut antara lain:

- a. Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas mempunyai dan sudah mempraktikkan pendidikan berbasis karakter.

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan tentang suatu pandangan mengenai berbagai jenis nilai kehidupan, seperti kejujuran, kepedulian, kecerdasan, tanggung jawab, keindahan, kebenaran, keimanan, dan kebaikan. Pendidikan karakter lebih berkaitan dengan psikis seseorang (individu), antara lain dari segi motif, dorongan berbuat, dan nafsu atau keinginan.

Dalam praktiknya, MI Istiqomah Sambas sangat serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong dan mengajarkan pendidikan karakter bagi para murid. Ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya madrasah membekali mereka menjadi anak-anak yang siap dalam menghadapi dinamika kehidupan yang semakin kompleks dan penuh dengan godaan dunia dan maksiat, juga sebagai tanggungjawab lembaga pendidikan Islam seperti madrasah.<sup>70</sup>

- b. MI Istiqomah Sambas dipandang sebagai sebuah lembaga pendidikan dasar yang paling berpengaruh di Purbalingga dan sekitarnya dengan sederet prestasi baik lokal maupun nasional. Sebagai bukti prestasi nasionalnya adalah diperolehnya penghargaan sebagai Madrasah Bermutu oleh Menteri Agama RI pada tahun 2013.<sup>71</sup>

### 3. *Membangun Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah*

Kerja sama dengan pemerintah daerah telah dijalin sejak pendirian MI Istiqomah Sambas. Ketika *launching* pendirian MI Istiqomah Sambas pada

---

70 Wawancara dengan Ikhwanidi Arifin, Kepala MI Istiqomah Sambas pada tanggal 6 Agustus 2014.

71 Dokumen MI Istiqomah Sambas, Tahun 2014.

6 Juni 2000 yang dihadiri oleh para tokoh agama, Kepala-kepala Dinas, Kepala Kemenag, Muspika, tokoh masyarakat, kepala-kepala sekolah dan madrasah serta masyarakat sekitarnya di Graha Sarwa Guna Purbalingga dan dibuka langsung oleh Bupati Purbalingga Drs. Triono Budisasongko, M.Si. *Launching* dan peresmian yang dilakukan oleh Bupati telah membawa dampak yang sangat besar bagi perolehan murid baru, yakni mencapai 164 murid baru.

Kerja sama dengan Pemda terus dikembangkan. Hasil nyata dari pengembangan ini adalah diijinkannya penggunaan sebidang tanah yang berlokasi di depan madrasah untuk digunakan sementara sebagai sarana olah raga. Hal ini sangat membantu madrasah, mengingat untuk sarana olah raga membutuhkan lokasi yang luas. Murid yang akan berolah raga tidak perlu pergi ke lapangan yang letaknya relatif jauh dari madrasah.

Dengan adanya kerja sama yang baik ini, MI Istiqomah Sambas tidak pernah ketinggalan informasi dari Pemerintah Daerah. Jika Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan yang melibatkan pendidikan dasar, MI Istiqomah Sambas selalu mendapatkan undangan. Hal yang paling penting dari semua itu adalah eksistensi Madrasah menjadi tidak lagi dipandang sebelah mata di kalangan masyarakat.

Dalam perkembangannya, beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah juga menyekolahkan anaknya ke MI Istiqomah. Bahkan banyak juga kepala madrasah yang menyekolahkan anaknya di madrasah ini.<sup>72</sup> Fenomena ini secara otomatis menjadi alat promosi yang sangat efektif dalam menjaring siswa baru. Fakta ini bisa dibuktikan dengan semakin tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke MI Istiqomah Sambas.

Selain itu, kerja sama juga dijalin dengan Dinas Kesehatan Purbalingga dan Puskesmas terdekat. Bentuk kerja samanya adalah dengan diberi piket tenaga paramedis yang *stand by* setiap hari dan dokter spesialis mata dan gigi pada hari Selasa dan Kamis yang bertempat di Ruang UKS.<sup>73</sup> Bagi murid yang mempunyai masalah kesulitan belajar dan bakat minat dapat juga berkonsultasi dengan psikiater yang disediakan di ruang UKS dengan jadwal tertentu.

---

72 Wawancara dengan staf Kasi Mapenda Kemenag Purbalingga, Syamsul Ma'arif, tanggal 14 Oktober 2014

73 Dokumen Piket tenaga kesehatan di ruang UKS.

### 3. Kerja Sama dengan SD Muhammadiyah Sopen Yogyakarta

SD Muhammadiyah Sopen dipilih untuk menjalin kerja sama antar sesama lembaga pendidikan dasar. Bukan tanpa alasan, pada tahun 2000, SD Muhammadiyah Sopen merupakan sekofah dasar swasta yang reputasinya sangat diperhitungkan di Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu, ada kesamaan visi dan misi antara kedua belah pihak, yaitu sama-sama berkeinginan meningkatkan mutu pendidikan Islam.

Bentuk kerja sama antar kedua lembaga tersebut dijalin mulai tahun 2000, yakni saat awal didirikannya madrasah. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa MI Istiqomah Sambas telah melakukan upaya okufatif terhadap apa yang terjadi dan dilakukan SD Muhammadiyah Sopen. Hal ini tentu dengan tidak mengabaikan hal-hal yang bersifat *local wisdom*.<sup>74</sup> Dalam konteks MI Istiqomah Sambas, *local wisdom* tersebut tercermin dari sikap madrasah yang tidak serta merta merubah diri menjadi MI Muhammadiyah, mengingat bahwa mayoritas masyarakat Purbalingga bukan warga Muhammadiyah, melainkan heterogen.

Untuk mempercepat proses transformasi, upaya yang dilakukan adalah menempatkan kepala madrasah dari SD Muhammadiyah Sopen dan diikuti oleh tiga guru senior yaitu; Ikhwandi Arifin, Wahyuti, dan Atik Hidayati. Ketiga guru ini ditugaskan untuk menjadi motor penggerak terhadap kemajuan madrasah. Tentu saja pada saat itu, peran yayasan masih sangat dominan dalam pendanaan maupun mempromosikan madrasah.

Bentuk kerja sama yang lain dilakukan dengan melaksanakan program magang. Calon guru yang dinyatakan lulus seleksi oleh madrasah dikirim ke SD Muhammadiyah Sopen untuk magang selama tiga bulan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi calon guru baik di bidang didaktik, metodik maupun pengelofaan pembelajaran. Namun seiring dengan kualitas MI Istiqomah Sambas yang terus meningkat, maka sejak tahun 2004 tidak ada lagi kebijakan mengirim guru magang. Kerja sama pada saat ini ditekankan pada *management shariat* dalam usaha peningkatkan kualitas pendidikan yang disesuaikan dengan berbagai regufasi.<sup>75</sup>

74 Kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan.

75 Wawancara dengan Ikhwandi Arifin, Kepala Madrasah, pada tanggal 9 Agustus 2014.

#### 4. *Kerja Sama dengan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Lainnya*

##### a. *Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Umum*

MI Istiqomah Sambas telah melakukan kerja sama formal dengan Universitas Negeri Semarang (UNES) pada bulan Mei 2014. Kerja sama ini merupakan bentuk keberlanjutan MI Istiqomah Sambas sebagai koordinator pelaksanaan kurikulum 2013 yang ditunjuk oleh Kemenag Kanwil Jawa Tengah. Untuk proses dan teknik pelaksanaan kerja sama tersebut, MI Istiqomah Sambas melakukan kerja sama dengan Universitas Negeri Semarang sebagai mentor dalam menyusun bahan ajar Kurikulum 2013. Kerja sama ini baru berlangsung sejak bulan Mei 2014, akan tetapi produk yang dihasilkannya sungguh luar biasa, yaitu dua buah dokumen bahan ajar untuk pembelajaran tematik di Madrasah dan satu draf untuk mata pelajaran agama.<sup>76</sup> Untuk dapat digunakan sebagai sumber belajar, produk tersebut tinggal menunggu pengesahan saja dari pihak yang berwenang. Di samping penyusunan bahan ajar, tim dari UNES juga memberikan workshop/ bintek Kurikulum 2013.

##### b. *Memajalin Kerja Sama dengan PTKIN*

Perguruan Tinggi lain yang digandeng untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah STAIN Purwokerto (sekarang IAIN Purwokerto). Kerja sama ini lebih difokuskan pada workshop pembelajaran aktif, di mana para guru difatih untuk dapat mempraktikkan strategi pembelajaran aktif. Kegiatan ini dimaksudkan agar kompetensi guru di bidang pembelajaran lebih meningkat. Seiring perkembangan waktu, kerja sama ini diperluas dengan program pascasarjana, yaitu dengan pengiriman tenaga pendidik untuk mengambil program magister pada program studi Pendidikan Agama Islam dan Ilmu Pendidikan Dasar Islam.

Lembaga pendidikan lain yang digandeng untuk kerja sama adalah UMMI Foundation yang mengembangkan metode membaca tartil al-Qur'an. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan uji kompetensi membaca al-Quran terhadap semua tenaga pendidik. Mereka yang dinyatakan lulus maka diberikan sertifikat atau *yabadah*. Pada tahap awal, *pre test*, tenaga pendidik yang dinyatakan lulus, menurut versi UMMI hanya 5 orang, namun pada waktu penelitian ini dilakukan, menurut pengakuan Kepala Madrasah,

76 Wawancara dengan Ikhwanidi Arifin, Kepala Madrasah, pada tanggal 9 Agustus 2014.

sudah meningkat menjadi 30 guru. Bahkan, kini muncul persepsi di kalangan guru MI Istiqomah Sambas bahwa guru yang belum mempunyai *yahadah* UMMI, dianggap belum berkompeten untuk menjadi guru madrasah. Dengan pemberlakuan metode ini, seluruh warga madrasah mempunyai gaya dan aksen yang seragam atau standar dalam membaca atau menghafal al-Quran.

Untuk meningkatkan manajemen mutu, MI Istiqomah Sambas menjalin kerja sama dengan Nadiya Consultants Cabang Semarang. Kerja sama ini lebih difokuskan pada upaya internasionalisasi standar manajemen mutu dengan mengadakan pelatihan, bimbingan dan pendampingan. Sasaran pelatihannya meliputi, pemahaman terhadap konsep mutu, pemahaman terhadap ISO 9000 dan perkembangannya, pemahaman terhadap persyaratan ISO 9001:2000, pemahaman tentang dokumentasi sistem manajemen mutu, pemahaman tentang audit dan sertifikasi.<sup>77</sup>

Dampak dari jalinan kerja sama ini sangat terasa bagi MI Istiqomah Sambas. Ketika kesadaran telah berhasil maka seluruh masyarakat madrasah akan bekerja keras untuk memenuhi seluruh persyaratan yang dituntut oleh sistem penjaminan mutu tersebut. Perjuangan ini pada akhirnya membawa hasil klimaks, yaitu dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001: 2008<sup>78</sup> tentang penetapan sistem manajemen secara optimal. Perolehan ini tentu saja sangat membanggakan, mengingat belum banyak lembaga pendidikan di tingkat dasar yang mampu mencapainya.

Dari paparan di atas, dapat disatikan bahwa jaringan yang dibuat oleh MI Istiqomah Sambas masuk dalam kategori *bridging* atau jaringan penghubung, karena prinsip-prinsip yang mendasari terjadinya pengelompokan ini adalah persamaan, kebebasan, dan nilai-nilai kemajemukan. Jaringan ini terbentuk dengan cepat dan kuat, karena adanya peran budaya lokal Banyumas, egaliter dan *cep blaka*, yang ikut menopangnya.

Di samping itu, adanya kesamaan keinginan dan cita-cita. Mereka bersedia melakukan kerja sama karena dibatengi dengan satu harapan yaitu dimilikinya sebuah lembaga pendidikan Islam yang unggul di Purbalinga. Dengan dimilikinya lembaga Islam tersebut diharapkan

---

77 Dokumentasi MI Istiqomah Sambas, dikutip tanggal 9 Agustus 2014.

78 Dokumentasi MI Istiqomah Sambas, dikutip tanggal 16 Agustus 2014. Sertifikat ISO 9000: 2008 tersebut bernomor seri D004.1.104.10.10

akan mampu menanggulangi isu-isu, kenakalan remaja, dekadensi moral, dan juga kemunduran pendidikan Islam di Purbalingga, lebih luasnya Indonesia. Harapan akan terciptanya generasi yang berakhlak mulia dan berotak brian semakin menjadi kenyataan.

Soliditas dan luasnya kerja sama dan jaringan yang dibentuk oleh madrasah ini menunjukkan bahwa kinerja institusi dalam melakukan proses pembentukan sikap dan *behavior* melalui transfer ilmu dan internalisasi nilai dapat dikatakan sudah bagus. Karena disadari betul oleh pengelola madrasah, bahwa dalam pembentukan perilaku baik bermasyarakat atau bernegara tidak hanya dipengaruhi oleh proses internal lembaga melainkan juga oleh faktor masyarakat sekitar atau kehidupan luar sekolah siswa.<sup>79</sup> Sehingga keterlibatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung kaitannya dengan proses ini adalah sebuah keniscayaan.

Keterlibatan dan keaktifan individu di masyarakat juga dipengaruhi oleh keterlibatan individu ketika di lembaga sekolah dan juga tingkat pendidikannya.<sup>80</sup> Interaksi yang dilakukan selama di sekolah baik dengan dewan guru, karyawan dan sesama murid, akan terbawa ketika dia sudah selesai dan berkiprah di tengah-tengah masyarakat. *Social engagement* ini dapat berlangsung dengan baik karena mereka mempunyai kesadaran akan fungsi sosialnya di masyarakat.

Sebaliknya, lembaga pendidikan yang tidak memberikan layanan sebagaimana disebutkan di atas, para lulusannya akan mempunyai sikap tak acuh terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak menutup kemungkinan mereka bahkan menjadi apatis yang bisa bentuknya berupa sikap apati, anomie, sinisme, dan bahkan alienasi. Keempat sikap ini secara umum didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap orang lain di sekitar lingkungannya.<sup>81</sup>

\*\*\*\*

---

79 Peter M. Miller, "Community-Based Education and Social Capital in an Urban After-School Program", *Education and Urban Society*, <http://www.sagepub.com/journals> Permission.vav, 2011, 4.

80 John F. Helliwell dan Robert D. Putnam, "Education and Social Capital", *NBER Working Paper*, 7121, Massachusetts, 1999, 4.

81 Micheal Rusf dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 143

## 4

# PENGEMBANGAN MI ISTIQOMAH SAMBAS MELALUI MODAL SOSIAL KEPERCAYAAN



Salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan dan pengembangan kelembagaan adalah adanya persekutuan atau jaringan yang mempunyai kesamaan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama. Jaringan tersebut dapat eksis dengan kuat karena difandasi oleh nilai-nilai dan norma yang tumbuh dan dipatuhi bersama. Masyarakat Indonesia yang mempunyai jiwa gotong royong yang tinggi, menjadi modal utama terbentuknya jaringan ini dibanding dengan negara yang individualis.

Kemampuan kerja sama tersebut muncul dari kepercayaan umum di dalam masyarakat atau bagian-bagian paling kecil dalam masyarakat. Sedangkan, kuat tidaknya kepercayaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang.<sup>1</sup> Namun, demikian, kepercayaan tersebut sudah barang tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi memerlukan proses dan usaha yang terus menerus. Oleh karena itu dalam bab ini akan membahas bagaimana MI Istiqomah Sambas dalam membangun kepercayaan.

---

1 John F. Helliwell dan Robert D. Putnam, "Education and Social Capital", *NBER Working Paper Series*, 7121, Massachusetts Avenue Cambridge, 1999, 3.

## A. "TRUST BUILDING"

Sebagaimana disebutkan pada bab dua, *trust* atau kepercayaan dari masyarakat adalah salah satu faktor utama dalam membangun dan mengembangkan madrasah dengan pendekatan modal sosial. Lembaga pendidikan yang mampu membangun dan mempertahankan kepercayaan dari masyarakat, ia akan dapat berkembang dengan baik. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang sudah mapanpun bisa saja tidak mendapatkan peserta didik yang banyak karena ketidakmampuannya dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam ilmu filsafat, terdapat 3 (tiga) pemikiran yang membentuk cara pandang seseorang terhadap sesuatu, yaitu: idealisme, realisme, dan pragmatisme. *Idealisme* berpandangan bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual. Karena manusia adalah makhluk yang berpikir, memiliki tujuan hidup, dalam aturan moral yang jelas. Epistemologi pengetahuan merupakan kinerja intuisi, sementara manusia juga memiliki aspek aksiologis, yaitu moral.

*Realisme* mengartikan bahwa dunia adalah materi yang hadir dengan sendirinya, yang tertata dalam hubungan-hubungan di luar campur tangan manusia. Sehingga pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman dan penggunaan akalinya, sedangkan tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam dan pada taraf yang rendah, diatur oleh kebijaksanaan yang teruji.

Adapun *pragmatisme* merupakan suatu sikap hidup, metode, dan pemikiran yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai suatu ide dan kebenaran secara praktis. Esensi dari pragmatisme terletak pada metodenya yang empiris, yaitu berorientasi pada metode dan sikap. Ini adalah corak filsafat yang dianggap lebih sistematis karena menggunakan metode ilmiah-modern sebagai dasarnya. Dari tiga landasan filosofis tersebut, maka secara teoritis, kepercayaan filosofis nampaknya lebih dekat relevansinya dalam upaya membangun kepercayaan melalui idealisme madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, daripada kepercayaan institusional.

Lebih jauh, dikatakan bahwa *trust* atau rasa percaya (mempercayai) adalah satu keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang disadari dalam hubungan-hubungan yang di dasari oleh perasaan yaitu bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti diharapkan dan tidak akan bertindak merugikan diri sendiri dan komunitasnya. Saling percaya merupakan unsur terpenting dalam modal sosial, dengan kepercayaan

orang-orang dapat bekerja sama secara efektif. Kepercayaan yang dibangun oleh MI Istiqomah Sambas tentu saja tidak terjelma begitu saja, namun melalui proses yang panjang dan terus menerus.

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, paling tidak ada 4 strategi yang dilakukan oleh MI Istiqomah Sambas dalam membangun kepercayaan ini.

### **1. Penerimaan**

Pada awal mula terjadinya hubungan, setiap orang pasti membutuhkan jaminan bahwa mereka diterima sepenuhnya, termasuk rasa aman untuk mengemukakan pendapat dan berkontribusi dalam kegiatan kelompoknya. Selain itu, dibutuhkan juga suasana saling menghargai untuk tumbuhnya penerimaan dalam kelompok, sehingga kelompok tersebut akan tumbuh menjadi komunitas yang kuat. *Ta'aruf* dan andil dalam *event* lokal yang dilakukan MI Istiqomah Sambas merupakan langkah untuk menumbuhkembangkan ikatan sosial. Karena dengan saling mengenal dengan baik merupakan modal awal terjadinya jalinan sebuah komunitas.

Rasa saling percaya dibentuk dalam waktu yang tidak sebentar serta memerlukan proses sosial yang berliku. Sikap dan perilaku yang didasarkan kepada nilai-nilai universal yang diyakini sebagai nilai yang berlaku di seluruh tempat di dunia seperti, jujur, adil, kesetiaan, dermawan, dan saling melindungi sesama warga komunitas, menjadi modal yang mendasari terjadinya rasa percaya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Fukuyama<sup>2</sup> bahwa kepercayaan adalah penghargaan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif berdasar norma-norma yang disepakai bersama. Sikap jujur dan dermawan keluarga Sambas yang telah diakui oleh masyarakat kota Purbalingga merupakan *entri point* atau modal yang sangat berharga untuk terbentuk ikatan kepercayaan tersebut.

Kepercayaan yang dibangun di MI Istiqomah Sambas, menurut hemat penulis, tidak termasuk dalam sudut pandang strukturalisme yang lebih menguntungkan elemen di tingkat individu, sehingga modal sosial hanya bermakna sebagai aset sosial-ekonomi yang dikuasai dan dioprasionalkan oleh individu. Namun, ikatan kepercayaan tersebut berada dalam pengertian yang lebih progresif dan lebih positif dalam

---

2 Fukuyama, *Trust: Kebajikan sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Terj. Ruslani, (Jakarta: Qalam, 1995), 26.

memberikan keuntungan yang tidak hanya individu semata, namun lebih kepada kolektivitas. Dalam konteks inilah modal sosial bermakna sebagai modal kolektif penopang bangunan sebuah sistem sosial.

## **2. *Berbagi Informasi dan Kepedulian***

Setiap orang yang akan berhubungan dalam sebuah komunitas, agar bisa memecahkan masalah bersama, membutuhkan informasi mengenai dua hal; (1) kehidupan, pengalaman, gagasan, nilai masing-masing dan, (2) masalah-masalah yang dianggap penting dalam kehidupan mereka. Untuk menumbuhkan kepercayaan, pertukaran informasi yang diberikan di antara warga MI Istiqomah Sambas selalu memberikan informasi yang terbuka dan jujur (transparan dan akuntabel). Disadari betul bahwa informasi yang diberikan tersebut tidak akan berarti apa-apa bila dalam hubungan tersebut tidak didasari dengan rasa kepedulian.

Jika ada rasa kepedulian, maka setiap warga masyarakat dalam jaringan ini akan memberikan sumbang saran dan terlibat aktif dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi. Apabila warga masyarakat mempunyai kemampuan dan kemauan, maka mereka akan saling berbagi, saling peduli, sehingga kepentingan individu akan mengalah kepada kepentingan-kepentingan komunitas.<sup>3</sup>

## **3. *Menentukan Tujuan***

Strategi ketiga yang diambil oleh MI Istiqomah Sambas adalah menentukan tujuan bersama. Setiap anggota warga tentu tidak akan tertarik dan memberikan komitmen yang dibutuhkan apabila tidak terlibat dalam perumusan tujuan. Proses pengambilan keputusan akan menentukan komitmen warga dalam pelaksanaan pemecahan masalah bersama.

## **4. *Pengorganisasian dan Tindakan***

Dalam menggerakkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan, MI Istiqomah Sambas mempunyai penanggungjawab sebagai motor, yakni dengan sebuah yayasan dan divisi pendidikan yang kuat. Perilaku dan sikap yang ditunjukkan Ketua yayasan dan kepala Madrasah sebagai *uswah* telah mampu menumbuhkan rasa kepercayaan anggotanya. Perilaku jujur, adil, peduli, dan berkomitmen terhadap kesepakatan bersama, serta melindungi anggotanya akan menumbuhkan rasa kepercayaan dari semua unsur komunitasnya.

3 Fakta ini terlihat dari kebijakan madrasah terhadap penentuan sumbangan pengembangan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga. Bahkan 5 persen siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dibebaskan dari beban SPP tersebut.

Berbagai tindakan kolektif yang didasari rasa saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi, utamanya dalam konteks membangun kemajuan bersama. Rasa percaya ini harus terus menerus ditumbuhkan, dikelola dan dipelihara dengan baik, karena menipisnya atau bahkan hilangnya faktor ini, akan membawa sikap yang apatis dan *distrust*. Jika hal ini terjadi, memulihkan kepercayaan itu jauh lebih sulit dari pada membangunnya. Untuk membangun dan mengelola kepercayaan ini, MI Istiqomah Sambas menempuh dengan dua cara, yaitu filosofis dan praktis, yang akan dibahas seperti di bawah ini.

## B. MEMBANGUN KEPERCAYAAN FILOSOFIS

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, konstruksi kepercayaan filosofis di MI Istiqomah Sambas dibangun melalui perumusan kebijakan madrasah dalam mengembangkan kepercayaan dengan menciptakan aspek sikap dan eksistensi kelembagaan, dan aspek-aspek lain yang terkait dalam menunjang kualitas lembaga pendidikan.

MI Istiqomah Sambas membangun kepercayaan filosofis dengan memproklamkan diri sebagai lembaga pendidikan madrasah dalam dua kultur, yaitu madrasah yang inklusif, dan madrasah yang tidak berafiliasi ke organisasi masyarakat (ormas) keagamaan tertentu. Kedua kultur ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. *Madrasah Inklusif*

Inklusif (*inclusive*) artinya “termasuk di dalamnya”. Secara istilah berarti menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain/kelompok lain dalam melihat dunia, dengan kata lain berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah. Dengan kata lain, yang lebih operasional, ia bermakna membuka diri dari berbagai pandangan orang, bukan berpandangan dan berfikir “kaca mata kuda.”

Dalam perkembangannya, pengertian inklusif kemudian digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka, dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan yang lainnya.

Jika didasarkan pada pengertian di atas, madrasah inklusif dapat diartikan dengan madrasah yang terbuka, ramah, meminimalkan perbedaan bagi seluruh komponen madrasah, serta saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan. Dalam konteks MI Istiqomah Sambas, sifat terbuka ini dapat dilacak dari proses pendirian yayasan yang menaungi pendirian madrasah, proses pendirian madrasah, nama madrasah, serta berbagai komponen yang dilibatkan dalam pendirian dan pengembangan madrasah. Kemudian dalam hal manajerial, MI Istiqomah juga dipimpin oleh beberapa orang dengan latar belakang pemahaman keagamaan yang berbeda-beda, dewan guru dan tenaga pendidikan juga merupakan berbagai grup sosial yang berbeda-beda pula, terdapat dari Muhammadiyah (MD), Nahdhatul Ulama (NU), dan Sarikat Islam (SI).<sup>4</sup>

Konsistensi Madrasah dalam menjaga inklusifitasnya telah menciptakan kepercayaan yang luar biasa di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, inklusifitas yang dibangun juga menunjukkan sikap dan model madrasah yang “unik”, sekaligus menjadi nilai unggul tersendiri bagi MI Istiqomah Sambas. Apalagi ini bisa diterapkan di jenjang pendidikan level dasar (ibtidaiyah).

Secara umum, pendidikan setingkat madrasah ibtidaiyah didirikan dan dikembangkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang sudah jelas afiliasi ideologi dan ke-ormasannya. Dengan label organisasi yang mewadahi tersebut secara otomatis modal sosial bisa tercipta, minimal dalam bentuk kepercayaan grup sosial (jamaah) ormas yang mendirikan dan mewadahnya.

MI Istiqomah Sambas yang didirikan sebagai lembaga yang inklusif secara teoretik tidak mendapatkan sumber modal sosial dasar, karena tidak diwadahi oleh organisasi kemasyarakatan Islam seperti pada umumnya. MI Istiqomah Sambas hanya mengandalkan dan mengoptimalkan modal sosial yang bersumber dari kepercayaan yang dibangun secara filosofis, yaitu grup sosial yang memahami konsep lembaga pendidikan inklusif, seperti yang dikembangkan oleh MI Istiqomah Sambas.

Konsistensi MI Istiqomah Sambas dalam membangun tradisi inklusif telah berbuah positif, sehingga banyak masyarakat, dari latar belakang yang heterogen, mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada MI Istiqomah Sambas. Kondisi ini sejalan dengan apa yang

---

4 Wawancara dengan Eling, Ketua Yayasan Istiqomah, pada tanggal 12 Mei 2014.

dirumuskan oleh Cox bahwa kepercayaan merupakan bentuk niat baik yang berdampak pada timbulnya kepercayaan dari pihak luar semata-mata sebagai hubungan kolegal,<sup>5</sup> bukan karena sektarian atau emosional kesamaan organisasi keagamaan.

Menurut penulis, inklusifitas yang dikembangkan oleh Yayasan dan MI Istiqomah Sambas juga tampak pada beberapa kegiatan tertentu. Misalnya dalam Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), di mana pihak Yayasan dan MI melibatkan masyarakat luar menjadi bagian dari kepanitiaan. Strategi ini direspon oleh masyarakat secara antusias, sehingga setiap acara PHBI yang diselenggarakan oleh MI Istiqomah selalu ramai diikuti oleh masyarakat luas.<sup>6</sup>

Pola keterbukaan madrasah melalui pencitraan lembaga yang Islami tanpa diembel-embeli organisasi, serta keterbukaan secara sosial dalam melaksanakan peringatan keagamaan Islam sangat efektif dan efisien dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan madrasah.

## 2. *Non Afiliasi Ormas Islam*

Non afiliasi Ormas Islam dapat dimaknai bahwa MI Istiqomah Sambas sebagai lembaga pendidikan, tidak berafiliasi terhadap organisasi masyarakat Islam tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari semangat inklusifitas yang dibangun oleh madrasah, meskipun dari sisi para pendiri, sebagian besar mereka memiliki afiliasi dengan organisasi keagamaan Muhammadiyah.

Dari aspek modal sosial, pilihan lembaga pendidikan apalagi dengan label madrasah tanpa berafiliasi kepada ormas tertentu merupakan pilihan yang sangat sulit. Karena hampir mayoritas lembaga pendidikan madrasah merupakan bagian dari pengembangan pendidikan ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang di Purbalingga jumlahnya mencapai 180 madrasah.<sup>7</sup>

Kesulitan sebagai lembaga yang tidak berafiliasi terhadap ormas Islam dapat diatasi oleh MI Istiqomah Sambas dengan menjafankan strategi *personal capacity*, yaitu suatu kemampuan personal untuk membangun jaringan dengan modal atau kapasitas kepribadian dan sikap yang dimiliki.

5 Lihat Cox, *A Truly Civil Society* (Sydney: ABC Book, 1995), 5.

6 Penulis melakukan observasi pada kegiatan PHBI Isra Mi'raj Nabi Muhammad 1436 H pada Hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015.

7 Data Statistik Madrasah Ibtidaiyah di Purbalingga tahun 2015, Dokumen Kankemenag Purbalingga.

Tindakan dan perilaku yang ditampakkan oleh para pengurus yayasan di tengah-tengah masyarakat mampu menarik simpati masyarakat sekitar sebagai modal membangun dan mengembangkan madrasah.

Sosok ketua yayasan, Bapak Eling yang sangat bersahaja, terbuka, mudah bergaul dengan segala lapisan masyarakat, tidak berafiliasi ke salah satu partai politik dan organisasi keagamaan, menempatkan beliau sebagai tokoh yang bisa diterima oleh seluruh segmen masyarakat. Terkait dana yang masuk ke yayasan, Bapak Eling tidak pernah menolak sumbangan (dana) yang diajukan dari siapapun dan berfatar belakang apapun. Hal inilah yang membuat pihak luar selalu antusias ketika madrasah melaksanakan suatu acara, atau membutuhkan partisipasi dari masyarakat luar.<sup>8</sup>

*Personal capacity* juga ditekankan pada pimpinan madrasah, dewan guru, dan seluruh tenaga kependidikan. Meskipun memiliki latar belakang organisasi keagamaan yang berbeda-beda atau tidak memiliki sama sekali, namun mereka diberikan wawasan untuk menjaga inklusifitas yang diwujudkan dalam sikap mereka yang saling menghargai perbedaan. *Personal capacity* juga diwujudkan dalam bentuk menjaga netralitas, yaitu dengan tidak menjadi pengurus salah satu ormas Islam yang ada. Ini berlaku bagi pimpinan yayasan, pimpinan madrasah, kelompok guru dan seluruh tenaga kependidikan MI Istiqomah Sambas.

## C. MEMBANGUN KEPERCAYAAN PRAKTIS

### 1. *Jargon 3 M*

MI Istiqomah Sambas memiliki jargon “3 M” yaitu Murah, Mutu, dan Massal. Jargon tersebut selalu disosialisasikan ke masyarakat, dan hasilnya cukup efektif mengingat Purbalingga adalah kota *sub urban*<sup>9</sup> yang masyarakatnya berpenghasilan rata-rata menengah ke bawah. Pendidikan murah tentu menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Purbalingga. Secara lebih detail, ketiga jargon tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. *Murah*

Dalam bahasa yang sederhana “murah” dapat diartikan bahwa harga suatu barang lebih rendah daripada harga yang berlaku di

8 Hasil pengamatan penulis terhadap sosok Bapak Eling (Ketua Yayasan), diperkuat wawancara dengan Wahyu Diana mantan pengurus Dewan Pendidikan Muhammadiyah dan Syamsul Hadi, Pengurus Ma'arif Purbalingga tanggal 23 September 2014.

9 Sub urban adalah daerah peralihan dari desa ke kota.

pasarannya. Dari kata *murah* ini muncul “murahan” yang berkonotasi negatif dan memiliki makna tidak bermutu (tentang barang).<sup>10</sup>

Slogan “Murah” diwujudkan oleh MI Istiqomah Sambas dengan tidak menarik sumbangan pendidikan yang terlalu tinggi dari masyarakat. Pada awal pendaftaran siswa baru, manajemen madrasah menarik dua jenis iuran kepada calon murid madrasah yaitu: *iuran wajib* dan *SPP* (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Rincian dari kedua iuran ini adalah:

- 1) Iuran wajib harus dibayarkan oleh calon murid baru, terdiri atas:
  - a) Iuran untuk 3 setel seragam madrasah, tas, dan beberapa buku cetak, serta alat-alat sekolah sebesar Rp. 400.000,-
  - b) Iuran wajib sukarela merupakan sumbangan yang diwajibkan kepada wali calon murid baru, namun nominal ditentukan secara sukarela sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua. Acuan jumlah iuran yang disetorkan merupakan kesepakatan hasil musyawarah pimpinan madrasah dengan komite madrasah. Pada tahun ajaran 2013-2014 besaran iuran terbagi dalam 4 pilihan; a. Rp. 200.000, b. Rp. 300.000, c. Rp. 400.000.<sup>11</sup>
- 2) Iuran SPP

Bagi orang tua murid boleh memilih salah satu di antara 6 (enam) pilihan, yaitu: 1). Rp. 50.000, 2). Rp. 60.000, 3) Rp. 70.000, 4). Rp. 80.000, 5). Rp. 90.000, atau 6). Rp. 100.000.<sup>12</sup>

Pada awalnya, model penyelenggaraan pendidikan murah tidak bisa serta merta bisa menarik animo masyarakat. Ada persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa “barang yang dijual murah pasti tidak bermutu (murahan)”. Dari sini kemudian pihak yayasan menentukan kebijakan yang cukup unik, yaitu, madrasah harus mampu menopang keberlangsungan pendidikan, namun disisi lain madrasah juga harus mampu memberikan tampilan (*tarjibk*) baru yang bisa mengubah

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online), “Murah”, (<http://kbbi.web.id/murah>), diakses tanggal 6 Agustus 2014.

11 Dalam pengamatan penulis, nominal yang ditawarkan pada iuran SPP tidak pernah berubah atau naik pada pilihan maksimal 100 ribu rupiah sejak berdiri (2002) sampai sekarang.

12 Dalam pengamatan penulis, nominal yang ditawarkan pada iuran SPP tidak pernah berubah atau naik pada pilihan maksimal 100 ribu rupiah sejak berdiri (2002) sampai sekarang.

persepsi masyarakat bahwa<sup>13</sup> tidak selalu “murah” itu kumuh, tidak menarik, dan tidak bermutu. Untuk itu, pihak yayasan memberikan subsidi pendidikan yang diambil dari beberapa keuntungan bisnis keluarga yayasan. Subsidi ini difokuskan untuk pengembangan infrastruktur madrasah.<sup>14</sup> Dukungan finansial yayasan dengan membangun tampilan madrasah yang bersih memberikan efek positif dalam menciptakan kepercayaan masyarakat.

#### b. Mutu

Mutu adalah hal yang tidak mudah didefinisikan, terutama mutu atas suatu jasa seperti pendidikan. Hal ini disebabkan karena standar yang dibuat atas terpenuhinya mutu tersebut sangat beragam. Namun secara sederhana, mutu biasa dimaknai dengan terpenuhinya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dalam konteks ini adalah kepuasan yang didapat dari pelajar dan orang tua sebagai pihak yang mengkonsumsi jasa pendidikan. Adapun indikator mutu pendidikan biasanya dilihat dari hasil proses penyelenggaraan pendidikan, seperti prestasi yang diperoleh murid maupun sekolah untuk kurun waktu tertentu.

Konsep “mutu” yang dikembangkan oleh MI Istiqomah Sambas mencakup mutu akademik dan nonakademik. Dalam menjaga mutu akademik, MI Istiqomah Sambas selalu memberi tambahan pelajaran, khususnya mengenai pendalaman keagamaan. Karena itu, tidak heran jika banyak orang tua atau wali murid yang terkejut melihat perkembangan atau kompetensi anaknya yang baru masuk tiga bulan sudah bisa membaca al-Quran, padahal sebelumnya ia belum mengenal huruf Arab secara baik.<sup>15</sup>

Di bidang prestasi nonakademik, MI Istiqomah Sambas menggunakan strategi *mercusuar*. Maksudnya, MI Istiqomah akan selalu tampil “mati-matian” pada *event* yang banyak menyedot khalayak, seperti lomba sekolah sehat yang pesertanya berasal dari

---

13 Dalam teori pemasaran terdapat 5 variabel untuk menarik minat konsumen yaitu: penentuan pasar, perencanaan produk, manajemen harga, distribusi, komunikasi dan promosi.

14 Wawancara dengan Ikhwanidi Arifin, Kepala Madrasah, tanggal 9 Agustus 2014.

15 Wawancara dengan wali murid, Siswadi pada Jum'at, tanggal 14 November 2014. Penulis juga secara acak menguji 5 anak kelas I MI Istiqomah Sambas yang sudah tiga bulan masuk sekolah. Hasil bacaan al-Qur'annya cukup bagus dalam hal membaca, namun panjang pendeknya belum lancar dan belum memahami tentang *tajwid*.

SD/MI, drum band, karnaval, band kecil (*ked banda*), dan yang lainnya. Bahkan pada lomba sekolah sehat MI Istiqomah Sambas berhasil menyabet juara nasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, pihak madrasah sudah mampu merubah terminologi “murah” yang berkembang di kalangan masyarakat. *Murah* tidak lagi harus paralel dengan berapa jumlah rupiah yang dibayarkan. Ikhwandi menuturkan bayaran suatu lembaga sekolah atau madrasah yang mungkin dianggap mahal, tapi akan menjadi terasa murah bagi pengguna karena diimbangi dengan kualitas pendidikan yang bagus. Pada kondisi yang terbalik, biaya suatu sekolah secara kuantitatif murah tapi jika tidak diimbangi dengan kualitas yang baik maka akan terasa mahal.<sup>16</sup>

Upaya merubah persepsi mengenai terminologi murah, jika dianalogkan dengan kebijakan madrasah, nampak dalam nalar berfikir:

- 1) Apabila masyarakat menyekolahkan putranya ke MI Istiqomah Sambas maka mereka tidak butuh lagi les di luar, semua sudah tercukupi di madrasah;
- 2) Sekolah juga memiliki kantin luas dengan sistem terbuka, sehingga anak-anak juga tidak perlu jajan di luar sekolah; dan
- 3) Sekolah menerapkan aturan shalat berjamaah bagi murid dan menekankan upaya pembentukan karakter (*akhlāqul karīmah*).

Keberhasilan para murid dalam menjaga *akhlāqul karīmah* dan memahami berbagai aspek dan sifat keagamaan, kemudian diperkuat dengan hafalan Juz 'Amma, serta dapat membaca kitab kuning. Jika itu semua harus dirupiahkan maka tentu bukan sesuatu yang murah. Butuh biaya mahal untuk dapat membentuk pengetahuan serta kepribadian anak yang unggul. Apalagi jika melihat dari lamanya waktu yang dibutuhkan, sudah pasti ini bukan produk pendidikan instan yang sekali jadi, tetapi produk yang butuh proses lama serta berkesinambungan.

#### c. *Massal*

Untuk menekan biaya yang ditarik dari murid agar tidak mahal, MI Istiqomah Sambas menerapkan kebijakan yang bersifat masif atau masal. Yaitu MI Istiqomah menerima seluruh murid yang

---

16 Wawancara dengan Ikhwandi Arifin, Kepala Madrasah, tanggal 9 Agustus 2014.

mendaftar, tanpa harus ada yang ditolak. Seluruh murid pendaftar, masuk di MI Istiqomah tanpa melalui proses seleksi terlebih dahulu. Dari kebijakan yang kurang populer ini, MI Istiqomah Sambas justru berani memberi jaminan bahwa dalam waktu tiga bulan awal, murid yang belum mampu membaca akan bisa membaca dengan lancar.

Penulis tidak melakukan riset secara mendalam tentang kelancaran murid membaca huruf Latin dan Arab dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dijamin. Namun secara acak, penulis melakukan *cross-check* kepada beberapa murid kelas 1, dan seluruh siswa yang dijumpai, hasilnya mereka semua dapat membaca secara baik dan benar.<sup>17</sup> Metode mengajar yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan psikologis anak, adalah kunci keberhasilan MI Istiqomah Sambas dalam mewujudkan 3 (tiga) bulan lancar membaca.

Ketiga jargon di atas telah menjadi semacam segi tiga yang saling menopang satu sama lain. Dengan hanya biaya murah tanpa dibarengi dengan mutu maka tidak akan ada orang yang tertarik. Murah dan bermutu tapi muridnya sedikit juga menghambat operasionalisasi madrasah. MI Istiqomah sedang dalam proses menuju pada lembaga pendidikan murah (terjangkau masyarakat) tapi berkualitas (bermutu), sehingga dapat mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang sangat diminati masyarakat.

## 2. *Kurikulum Kolaboratif*

Oemar Hamalik menjelaskan bahwa kurikulum (latin: *curriculare*) merupakan jembatan yang sangat penting dalam perjalanan pendidikan untuk mencapai titik akhir yang ditandai dengan ijazah.<sup>18</sup> Sedangkan Ben Levin menjelaskan bahwa kurikulum merupakan gambaran dari elemen sentral pengembangan suatu sekolah. Dengan kurikulum, sekolah dapat mengembangkan dan menggerakkan hasil produk. Namun di beberapa sekolah, banyak yang tidak menempatkan kurikulum sebagai prioritas dalam menciptakan sumber daya yang ada.<sup>19</sup>

### a. *Kurikulum Standar Nasional*

Dalam proses pembelajaran, kurikulum menempati posisi yang sangat urgen. Ibarat tubuh, kurikulum adalah ruhnya

17 Hasil Observasi terhadap Siswa Kelas 1, tanggal 18 September 2014.

18 Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 16.

19 Ben Levin, *How to Change 5000 Schools* (Cambridge: Harvard Education Press, 2012), 100.

lembaga pendidikan. Sebab, ia merupakan turunan dari visi dan misi lembaga, sehingga arah dan tujuan dari sebuah lembaga akan sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Kurikulum juga harus memuat seperangkat nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang harus ditransfer kepada peserta didik dan bagaimana proses transfer tersebut harus difaksanakan.<sup>20</sup>

Sebagai lembaga pendidikan dasar, MI Istiqomah Sambas masih menggunakan kurikulum yang sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Kurikulum Kementerian Agama yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008.<sup>21</sup>

#### *b. Kurikulum Muatan Lokal*

Secara sederhana kurikulum muatan lokal dapat didefinisikan sebagai kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah yang bahan kajian dan pembelajarannya disesuaikan dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi serta kebutuhan pembangunan daerah yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kurikulum atau muatan lokal ini harus dimiliki oleh setiap sekolah, dan bahkan bagi sekolah swasta, ia akan lebih fleksibel dalam menentukan kurikulum ini.

Dasar dari kurikulum muatan lokal dapat dirujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 dan 38 dijelaskan:

- 1.) Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.
- 2.) Pelaksanaan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.

---

20 Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Yogyakarta: Buya Indra Grafika, 2001) 128.

21 Wawancara dengan Agus Triyono, Kabid Akademik, pada tanggal 13 September 2014.

Berdasarkan dua pasal di atas, kurikulum nasional memberikan peluang pengembangan bagi penyelenggara pendidikan untuk memasukan beberapa materi pelajaran dalam kurikulum yang didasarkan pada kebutuhan lokal. Dengan memasukan materi lokal dalam kurikulum, maka diharapkan peserta didik dapat memahami berbagai pelajaran mengenai lingkungan sekitarnya, mampu melestarikan budaya daerahnya termasuk kerajinan dan keterampilan yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Jika kurikulum muatan lokal dikaitkan dengan pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berada di Purbalingga, maka muatan lokal tersebut harus diarahkan pada tingkat kebutuhan lingkungan tentang pendidikan keagamaan yang dapat dipraktikkan di Purbalingga secara khusus, dan lingkungan lainnya secara umum.

Agus Triyono, Wakil Kepala Madrasah Bidang Akademik, menjelaskan bahwa penambahan muatan lokal didasarkan pada ciri utama MI Istiqomah Sambas dalam pengembangan madrasah. Pelajaran muatan lokal dipilih dari pelajaran yang tidak biasa diberikan oleh sekolah atau madrasah sejenis, namun mempunyai nilai yang strategis untuk kelanjutan pendidikan murid.<sup>22</sup>

Muatan lokal yang diajarkan oleh MI Istiqomah Sambas terbagi dalam program pengembangan baca al-Qur'an yang dibagi dalam empat program, yaitu Program UMMI dan Program Tamyiz, Qira'atul kutub, dan hafalan juz 'amma. Secara lebih rinci keempatnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Program UMMI

Program UMMI adalah program membaca al-Quran yang diadopsi dari Yayasan UMMI di Bandung. Program ini dikembangkan oleh Lembaga Ummi Foundation (UF), yaitu sebuah lembaga yang membantu institusi baik formal/non formal dan guru al-Qur'an, khususnya untuk meningkatkan kemampuan mengefektifkan pembelajaran al-Qur'an yang efektif, mudah, menyenangkan dan menyentuh hati.

Di samping itu, Lembaga Ummi Foundation berupaya meningkatkan kualitas setiap guru al-Qur'an, agar mampu

---

22 Wawancara dengan Agus Triyono, Kepala Bidang Akademik, pada tanggal 13 Agustus 2014.

dalam memahami metodologi pengajaran al-Qur'an serta tahapan-tahapan dan pengelolaan kelas dengan baik, sehingga menjadi guru al-Qur'an yang profesional. Sistem pengajaran al-Qur'an metode Ummi juga berupaya menjamin, bahwa setiap lulusan SD/MI, TKQ, TPQ, SMP/MTs, SMA/SMK mampu membaca al-Qur'an secara tartil.<sup>23</sup>

Program UMMI diwajibkan bagi murid kelas rendah (1, 2, dan 3), khususnya bagi yang belum benar bacaan al-Qur'annya. Program UMMI difaksanakan secara khusus pada jam 06.30 WIB atau sebelum dimulai mata pelajaran. Materi yang diajarkan adalah membaca al-Qur'an yang benar dan *tartil*. Program UMMI ini wajib diikuti oleh siswa, karena bagi yang sudah lulus dalam mengikuti program UMMI akan diberikan *yahadah* (sertifikat) yang bersifat mengikat. Maksudnya, meski murid sudah lulus ujian akhir dan belum mempunyai *yahadah* UMMI, maka mereka tidak akan mendapat ijazah madrasah yang asli, melainkan hanya fotocopynya.<sup>24</sup>

Program ini berjalan sangat baik diterapkan di MI Istiqomah Sambas dan dapat memberikan warna kelulusan peserta didik dalam cara membaca al-Qur'an yang *tartil* sesuai dengan *tajwid* dan *makhrij*-nya. Penulis juga mengobservasi terhadap beberapa siswa kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 3 anak secara acak dan hasilnya pun cukup baik dan jelas dalam pembacaannya.<sup>25</sup>

## 2) Program Tamyiz

Muatan lokal lainnya adalah pembelajaran dengan menggunakan metode Tamyiz, yaitu metode baru dalam belajar bahasa Arab dan terjemah al-Qur'an. Metode ini didedikasikan bagi umat Islam yang ingin menguasai kemampuan menterjemah al-Quran 30 juz dalam jangka waktu yang cepat. Pelatihan telah dilakukan di banyak tempat, baik bagi peserta umum maupun bagi calon pengajar (TOT).

23 Lembaga Ummi sekarang dijabat oleh Masruri dan berkantor di Ketintang Selatan, No 1 Surabaya, yang sebelumnya bemarkas di Bandung. Profil tentang Metode dan Lembaga Ummi Foundation dapat diakses di [<http://metodeummi.org/index.php/tentang-ummi>].

24 Murid yang belum dinyatakan lulus dalam ujian UMMI ia hanya mendapat fotocopi dari ijazah kelulusan madrasah nya. Ijazah aslinya akan diberikan ketika ia sudah mempunyai sertifikat UMMI.

25 Observasi dengan murid pada tanggal 13 Agustus 2014

Tamyiz adalah buku lembar kerja (*workshee*) tentang formulasi teori dasar kuantum nahwu-shorof yang masuk dalam katagori *Arabic for Special Purpose (ASP)* dengan target sangat sederhana yaitu pintar terjemah al-Qur'an.<sup>26</sup>

Di MI Istiqomah Sambas, pelajaran ini diberikan kepada murid kelas tinggi (4, 5, 6) dengan tujuan untuk memberikan kemampuan kepada murid dalam menerjemahkan al-Quran. Penerjemahan al-Quran dengan menggunakan metode Tamyiz adalah cara menerjemahkan al-Quran dengan menggunakan pendekatan gramatika atau *nahwu* (menerjemahkan al-Quran sesuai dengan kedudukan *kalimah* dalam sebuah ayat). Sehingga, belajar menerjemahkan al-Quran dengan Tamyiz secara langsung belajar *nahwu*.<sup>27</sup>

Terdapat perbedaan antara pelajaran Tamyiz dengan muatan lokal lainnya. Kalau pelajaran Tamyiz ditetapkan menjadi mata pelajaran terstruktur dalam jadwal keseharian sebagaimana mata pelajaran yang lain, namun untuk UMMI dan *ta'liq* diberikan pada setiap hari sebelum pelajaran dimulai.

### 3) Qirā'at al-Kutub

*Qirā'at al-Kutub* merupakan program muatan lokal bagi murid untuk dapat membaca dan memahami kitab fiqh. Pembelajaran *qirā'at al-kutub* diberikan kepada murid kelas 4, 5, dan 6 dengan menggunakan metode klasikal. Muatan lokal *qirā'at al-kutub* jarang ditemukan di madrasah ibtidaiyah atau bahkan madrasah tsanawiyah. Apalagi kitab yang digunakan adalah kitab fiqh *Fath al-Qarib*, sebuah kitab yang tidak familier di kalangan siswa madrasah ibtidaiyah formal.

MI Istiqomas Sambas sangat memahami bahwa kebijakan muatan lokal membaca kitab (baca kitab kuning/ gundul),<sup>28</sup> memang cukup berat. Namun kebijakan tersebut, menurut

---

26 Sebagai sebuah hasil riset panjang dan akan disebarluaskan untuk masyarakat, baik untuk muslim di Indonesia maupun muslim di seluruh dunia, maka Tamyiz telah tercatat sebagai produk intelektual dengan Hak Cipta No. 016445 Tanggal 05 Mei 2010. Lebih lengkap profil tentang "Metode Tamyiz" dapat diakses pada (<http://atsanulkalam.or.id/artikel/mengenai-metode-tamyiz>).

27 Observasi pada murid kelas lima yang sudah lancar menerjemahkan surat al-Baqarah ayat 1- 10 dengan cara metode ini.

28 Kitab gundul adalah istilah populer di pondok pesantren untuk menyebut jenis kitab yang tidak berkhawat.

penulis sangat relevan dengan teori Theodore Levitt dalam menjamin mutu *out put*, yakni memberikan suatu yang tidak pernah dituntut oleh pelanggan/ wali murid.<sup>29</sup> MI Istiqomah Sambas selalu memberi kompetensi yang lebih kepada siswanya, dan kompetensi itu tidak didapatkan di lembaga setingkat madrasah ibtidaiyah.

Keberhasilan MI Istiqomah dalam menciptakan sumber daya murid yang dapat membaca kitab menghasilkan kepercayaan yang sangat tinggi bagi orang tua atau wali murid. Karena banyak orang tua wali murid yang kaget dengan kemampuan baca kitab anaknya, padahal kemampuan tersebut bukan merupakan tuntutan dan harapan dari wali murid.<sup>30</sup>

#### 4) Hafalan *Juz Amma*

Pada tiga puluh menit sebelum jam pelajaran dimulai, murid diminta untuk mengerjakan tugas yang diberikan pada hari sebelumnya.<sup>31</sup> Setelah selesai mengerjakan tugas, dilanjutkan dengan hafalan *asmā al-husnā* dan *tadarrus* untuk menghafal juz 30. Hafalan *Juz Amma* ditekankan kepada murid kelas 4. Karena fokus murid kelas 1 sampai kelas 3 adalah pada baca al-Qur'an yang baik dalam *tarfil* dan *makhrujnya*. Untuk siswa kelas 4 dan 5 fokus pada hafalan, kelas enam pada melancarkan seluruh surat dalam *Juz Amma*.

Dari aspek target capaian maksimal program hafalan al-Quran, MI Istiqomah Sambas mempunyai target ketika sudah kelas 6 wajib menghafal *Juz Amma*. Mulai tahun 2014, MI Istiqomah Sambas telah mencanangkan lanjutan hafalan siswa yaitu juz 29, 28, dan 27. Ini dilakukan setelah mereka hafal juz 30 (juz 'amma). Menurut pegakuan Farhah Sugiyanti, sudah ada 27 siswa yang hafal 4 juz tersebut dengan predikat bagus.<sup>32</sup>

---

29 Dalam teori pemasaran produk, Levitt membedakan menjadi 4 lapis, yaitu *Generik*, *Expected*, *Augmented*, dan *Potensial*. Dalam konteks ini, muatan lokal *qira'atul kutub*, ditempatkan pada lapisan *augmented*.

30 Wawancara dengan Agung Triyono selaku Kabid Akademik pada tanggal 13 Agustus 2014.

31 Menurut penuturan salah satu guru, setiap akan pulang sekolah murid yang mempunyai jadwal piket wajib mengambil tugas yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan di kelas pada hari berikutnya. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan karakter kedisiplinan murid.

32 Wawancara dengan Farhah Sugiyanti, Kabid Keagamaan, tanggal 14 Oktober 2015.

### 3. *Madrasah Familier*

Madrasah Familier merupakan istilah yang digunakan oleh kepala madrasah untuk menyebut atau mengganti istilah terbuka.<sup>33</sup> Istilah tersebut tidak terlalu populer dipergunakan sebagai bagian dalam kebijakan lembaga madrasah. Namun jika penulis mengamati, yang dimaksud dengan madrasah familier adalah madrasah yang banyak melakukan kebijakan berdasarkan prinsip dan nilai kekefuargaan atau seperti bersifat layaknya keluarga. Hampir seluruh masalah yang muncul di madrasah akan diselesaikan secara terbuka.

Salah satu kebijakannya adalah bahwa orang tua boleh menunggui anaknya ketika bersekolah. Padahal lazimnya orang tua menunggui adalah ketika anak mereka bersekolah di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) atau TK (Taman Kanak-kanak). Dengan berbasis kekefuargaan, MI Istiqomah Sambas memberikan kebebasan kepada wali murid untuk menunggui anaknya sekaligus mengamati proses pembelajaran dan suasana di kelas dari luar ruangan, terutama untuk kelas 1 pada masa awal masuk.

Dengan program ini, masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan masukan kepada madrasah untuk meningkatkan layanan pendidikan. Melalui kegiatan ini orang tua dan masyarakat diharapkan bisa lebih berperan aktif dalam memberikan masukan, saran, dan kritik atas apa yang telah mereka amati dan rasakan. Masukan dan kritik ini biasanya disampaikan dalam rapat pertemuan antara pihak madrasah dan masyarakat.

Madrasah familier merupakan grup keluarga yang mempunyai peran dalam perwalian dan peningkatan kualitas hubungan sosial murid sebagaimana hubungan keluarga (orang tua dan anak). Sehingga banyak problem sosial yang terjadi di dalam madrasah bisa diselesaikan dengan sistem kekefuargaan dan tidak banyak melibatkan orang tua murid. Hal ini seperti ketika kasus salah paham antar-murid yang berujung pada perkelahian. Pihak madrasah, sebagai bagian dari keluarga besar si murid, akan menyelesaikan secara kekefuargaan di internal madrasah. Murid tidak boleh melaporkan kejadian tersebut kepada pihak orang tua, pihak madrasahlah yang akan memberikan pengertian dan kronologinya kepada orang tua. Hal ini untuk menghindari timbulnya masalah yang

---

33 Penjelasan ini dikemukakan pada saat penulis memawancari Ikhwanidi Arifin, Kepala Madrasah, pada tanggal 14 Oktober 2014.

lebih besar karena melibatkan banyak pihak. Apalagi jika si murid yang bermasalah menambah porsi kronologis cerita karena ingin mendapatkan pembelaan dari orang tuanya.

Catur Priyatmoko menuturkan, suatu ketika terjadi murid yang berkelahi, di mana kebetulan salah satu orang tua dari dua murid yang berkelahi tersebut berprofesi sebagai aparat keamanan. Atas informasi yang kurang tepat yang disampaikan murid kepada orang tua ini, kemudian si orang tua datang ke madrasah dengan kondisi marah-marah. Melihat tindakan dari orang tua yang semacam ini, pihak madrasah kemudian menyampaikan bahwa apabila orang tua tersebut masih percaya kepada madrasah untuk menyelesaikan problem tersebut maka diharapkan menyerahkannya ke madrasah, dan jika sudah tidak percaya terhadap madrasah sebagai bagian keluarga, maka diperbolehkan untuk pindah sekolah.<sup>34</sup>

Kebijakan ini diberlakukan agar masalah anak-anak (murid) selesai di madrasah dan tidak melibatkan orang tua. Sebab jika masalah anak sampai ke orang tua, maka dikhawatirkan persoalannya akan semakin besar. Karena sebagian besar orang tua akan senantiasa membela anaknya meski anaknya dalam posisi yang salah. Kasus kriminalisasi guru oleh orang tua murid merupakan salah satu cermin minimnya komunikasi, pengertian dan pemahaman dari kedua belah pihak. Jika terjalin komunikasi yang baik, penyelesaian terhadap persoalan yang muncul tentu bisa dilakukan dengan cara-cara kekeluargaan yang lebih humanistik.

Penanganan kasus dengan model kekeluargaan ini akan memberikan dampak kepada perkembangan sifat dan karakter murid. Madrasah bisa mengajarkan tentang nilai-nilai bagaimana hidup bersama kepada murid, seperti: pemaaf, toleransi, kasih sayang, saling menghormati dan tidak ada rasa dendam. Pembentukan karakter yang terintegrasi seperti ini masih jarang ditemukan di sekolah atau madrasah tingkat dasar atau madrasah lainnya.

#### **D. MEMBANGUN KEPERCAYAAN INSTITUSIONAL**

Kepercayaan institusional dalam hal ini adalah kepercayaan terhadap lembaga pendidikan MI Istiqomah Sambas. Upaya MI Istiqomah Sambas dalam membangun kepercayaan institusional diwujudkan antara lain dengan:

---

34 Wawancara dengan Catur Priyatmoko. Kepala Bidang Kesiswaan, pada tanggal 18 September 2014.

## 1. *Membangun Kepercayaan dengan Stakeholder*

Pada saat *launching* pendirian madrasah bulan Juni tahun 2000, banyak tokoh masyarakat yang menghadiri acara tersebut. Di antara peserta yang hadir adalah Bupati dan Wakil Bupati, ketua DPRD, Dewan Pendidikan Muhammadiyah, Ketua Yayasan Istiqomah Sambas, Keluarga Besar SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, para tokoh agama dan masyarakat, ormas, para pakar pendidikan, para calon wali murid, serta masyarakat sekitarnya.<sup>35</sup>

Dukungan dari Bupati, tokoh-tokoh masyarakat yang kebetulan berprofesi sebagai pejabat publik maupun politik menambah kepercayaan masyarakat. Hal ini terbukti, pada penerimaan murid baru 2000-2001 (murid angkatan pertama), MI Istiqomah Sambas telah memperoleh 164 murid atau 4 rombel.<sup>36</sup> Sesuatu yang sangat mengejutkan dan sekaligus menggembirakan untuk sekolah atau madrasah yang baru dibuka.

Dengan perolehan jumlah murid yang banyak tersebut berarti telah tercipta kepercayaan masyarakat (*stakeholder*) terhadap MI Istiqomah Sambas. Untuk menjaga kepercayaan dari *stakeholder*, MI Istiqomah Sambas melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

### a. *Memberikan Kompetensi kepada Murid di atas Rata-rata*

Dalam mengolah produknya, apa yang dilakukan oleh MI Istiqomah Sambas, menurut penulis sejalan dengan teori Theodore Levitt mengenai tiga lapisan: *generic, augmented dan potensial*.<sup>37</sup> Lapisan *generic* adalah perolehan dasar sebagaimana yang diinginkan oleh kurikulum pada umumnya, sedangkan lapisan *augmented* adalah semacam kompetensi tambahan, sementara lapisan *potensial* adalah tahap yang dijamin oleh madrasah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid.

Guna menarik pelanggan, madrasah harus berada pada lapisan *augmented* atau bahkan *potensial*. Jika hanya memberikan yang *generic*, maka MI Istiqomah Sambas tidak akan memiliki "keunikan" jika dibanding madrasah yang lain. Konsekuensi dalam kebijakan tersebut, MI Istiqomah Sambas memberikan beberapa

35 Profil MI Istiqomah Sambas Purbalingga tahun 2013.

36 Dokumentasi MI Istiqomah Sambas Purbalingga, tahun 2011.

37 Wawancara dengan Ikhwanid Arifin, Kepala Madrasah MI Istiqomah Sambas, tanggal 6 Agustus 2014.

keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik, antara lain: bacaan tartil al-Qur'an dengan metode UMMI, Tamyiz, *qirā'at al-kutub*, *khafalan Juz 'amma*, dan pembentukan karakter baik dalam maupun di luar pembelajaran.<sup>38</sup>

b. *Meningkatkan Prestasi Akademik maupun Non Akademik*

MI Istiqomah Sambas selalu berusaha memacu prestasi, baik akademik maupun nonakademik. Mengingat bahwa di tahun-tahun awal kelas yang ada masih dalam kategori rendah, maka yang diprioritaskan adalah prestasi non-akademik. Kebijakan ini, menurut kepala madrasah,<sup>39</sup> ditempuh karena dianggap lebih strategis untuk dijadikan magnet dan alat promosi. Dengan menjuarai *event* yang dihadiri oleh banyak orang, maka jelas akan mampu menumbuhkan kepercayaan di masyarakat.

Dalam upaya membangun prestasi non-akademik, strategi yang ditempuh oleh MI Istiqomah Sambas di antaranya adalah berusaha untuk menjadi juara pada kompetisi *drum band* yang selama ini dipegang atau dijuarai oleh sekolah dasar (SD). Prestasi pada perlombaan *drum band* tingkat sekolah dasar atau madrasah oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai indikator keunggulan sekolah. Dengan berbagai persiapan yang matang, "pasukan" *drum band* MI Istiqomah Sambas pada tahun 2002 berhasil menumbangkan juara bertahan dan berhasil keluar sebagai juara 1 tingkat Kabupaten Purbalingga.

Pada tahun 2003, pasukan *drum band* MI Istiqomah Sambas mengikuti lomba *drum band* di level yang lebih tinggi, yaitu lomba tingkat eks Karesidenan Banyumas. Dalam lomba ini MI Istiqomah Sambas juga menyabet sebagai juara pertama.<sup>40</sup> Berbarengan dengan itu, MI Istiqomah Sambas juga berhasil menjuarai lomba Gita Pati di kabupaten Purbalingga. Ketika sudah menjuarai di tingkat karesidenan, maka promosi lewat lomba *drum band* sudah dianggap cukup. Selanjutnya pihak sekolah memprioritaskan untuk menang di lomba-lomba lain yang selama ini juga didominasi oleh sekolah-sekolah umum.

Prestasi yang diperoleh oleh MI Istiqomah Sambas tidak hanya berasal dari murid saja. Pada tahun 2003, salah satu guru MI Istiqomah

38 Wawancara dengan Agus Triyono, Kepala Bidang Akademik, tanggal 6 Agustus 2014.

39 Wawancara dengan Ikhwanid Arifin, Kepala Madrasah MI Istiqomah Sambas, tanggal 6 Agustus 2014.

40 Dokumen tentang Profil MI Istiqomah Sambas, tahun 2014.

Sambas berhasil memenangi lomba guru berprestasi/ teladan tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan menjadi juara 1. Bahkan total kejuaraan yang dimenangkan oleh MI Istiqomah Sambas, sejak berdiri tahun 2000 sampai 2003, tidak kurang dari 30 kejuaraan, baik dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, maupun Provinsi.

Di tahun keempat pendiriannya (2004) MI Istiqomah Sambas telah berhasil memenangi lomba bergengsi tingkat nasional, yaitu sebagai Juara 1 lomba sekolah sehat tingkat madrasah dan sekolah dasar. Jika di total secara keseluruhan, piala kemenangan yang sudah dikoleksi oleh MI Istiqomah Sambas hingga tahun 2013 sudah mencapai 104 piala/ penghargaan. Jika dirata-rata per-tahun, maka dalam setiap tahunnya MI Istiqomah Sambas mampu mengoleksi 8 buah piala/ penghargaan, suatu prestasi yang tentunya sangat membanggakan.

Sederet prestasi sebagaimana disebutkan di atas, tentu berdampak sangat positif bagi tumbuhnya kepercayaan masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di MI Istiqomah Sambas. Lonjakan penerimaan murid terjadi pada tahun 2011 sampai tahun 2013/2014. Murid yang tercatat di MI Istiqomah Sambas pada tahun pelajaran 2014/2015 sebanyak 1.166 murid.<sup>41</sup>

c. *Membarugun Kepercayaan melalui Kegiatan Sosial Budaya dan Keagamaan*

MI Istiqomah Sambas selalu berperan serta dalam setiap kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Bahkan menurut kepala Madrasah, di saat murid sekolah dasar lain belum banyak yang terampil memainkan alat musik, MI Istiqomah Sambas telah mampu membentuk grup band dan beberapa kali tampil di acara Kabupaten.

Strategi pemberdayaan sumber daya murid dalam kemahiran bermusik dan bernyanyi (*bana*) ditempuh untuk menyakinkan kepada masyarakat bahwa MI Istiqomah Sambas tidak hanya identik dengan sekolah yang bergelut di bidang pendidikan agama saja, tetapi juga pendidikan seni dan budaya yang banyak diminati remaja.

Dalam pengembangan sumber budaya, MI Istiqomah Sambas sangat memperhatikan budaya lokal, yaitu melakukan pemberdayaan murid dalam kelompok musik Islam dalam dua grup Nasyid MI

---

41 Dokumentasi MI Istiqomah Sambas, Tahun 2014, dan hasil wawancara dengan Catur Priatmoko, Kepala Bidang Kesiswaan, tanggal 5 Agustus 2014.

Istiqomah dan Hadroh MI Sambas.<sup>42</sup> Pada setiap lomba atau kejuaraan kategori musik Islami, MI Istiqomah selalu memenanginya. Selain itu, MI Istiqomah juga membangun kepercayaan melalui pemberdayaan sumber daya dalam Komunitas Pecinta Tulis Indah Arab (*kehoi*) yang beberapa kali ikut lomba, walaupun prestasinya masih belum sampai tingkat nasional.

Berbagai bentuk pengembangan dan pemberdayaan sumber daya yang dilakukan oleh MI Istiqomah Sambas, menurut penulis adalah langkah yang multi strategis. Karena dengan hal tersebut, MI Istiqomah Sambas telah berperan sebagai pelestari dan penyangga budaya nasional sehingga masyarakat sekitar akan merasa dihargai, dan pada gilirannya masyarakat juga akan menghargai madrasah. Ini tentu akan sangat baik dalam upaya membangun sinergi maksimal antara masyarakat dan madrasah dalam upaya mengoptimalkan modal sosial yang ada.

Dukungan dari masyarakat merupakan faktor yang paling menentukan. Tanpa *support* yang nyata dari masyarakat, usaha untuk mengakomodir berbagai harapan yang sarat dengan kepentingan tersebut akan menemui banyak kendala dan kesulitan. Oleh karena itu partisipasi dari *stakeholder* bagi layanan pendidikan di suatu madrasah menjadi sangat diperlukan. Dalam konteks ini pula, peran madrasah menjadi tidak hanya lembaga pendidikan tetapi juga merupakan lembaga sosial.

Sebagai lembaga sosial, madrasah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, ia dipengaruhi oleh masyarakat dan sebaliknya madrasah juga mempengaruhi masyarakat. Relasi resiprok semacam inilah yang dimanaj oleh MI Istiqomah Sambas Purbalingga menjadi modal sosial yang ampuh.

## 2. *Membangun Kepercayaan dengan Lembaga Kementerian*

Ketemahan lembaga pendidikan Islam umumnya terletak pada pola kerjanya yang sendiri-sendiri, sangat minim melakukan komunikasi dengan lembaga lain. Kalaupun terjadi hubungan, hanya sebatas relasi dengan kelembagaan yang berada di bawah naungan satu departemen. Dengan demikian perkembangan madrasah jadi terhambat dan kurang “lincah” dalam bergerak.

---

42 Wawancara dengan Farhah Sugiyanti, dan Nunik Imawati, Kepala Bidang Keagamaan, pada tanggal 6 Agustus 2014.

Seharusnya, madrasah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mencetak anak didiknya mempunyai kompetensi keilmuan yang handal tapi juga ber-*akhlāqul karīmah*, dapat membangun kepercayaan dari lembaga, departemen dan dinas terkait yang lebih luas. Karena dengan modal kepercayaan, lembaga bisa mendapat *support* secara tidak langsung. Misalnya dalam bentuk, jika ada anak kepala dinas atau tokoh masyarakat yang anaknya bersekolah di MI Istiqomah Sambas, maka mereka akan menjadi rujukan bagi orang tua lainnya untuk ikut menyekolahkan anaknya.

Strategi membangun kepercayaan yang dilakukan oleh MI Istiqomah Sambas pada tahun 2013 adalah mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan Kurikulum 2013 oleh Tim Puskurbuk Pusat,<sup>43</sup> setelah madrasah ditolak usulannya sebagai madrasah *pilot project* pelaksanaan kurikulum 2013.<sup>44</sup> Meski belum menerapkan kurikulum 2013, madrasah bersikap proaktif dan jemput bola dengan melatih para gurunya dengan memanfaatkan pelatihan dari narasumber yang kompeten.

Pada tahun 2014, berita tentang bintek kurikulum 2013 sampai ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, lalu MI Istiqomah Sambas ditunjuk oleh Kanwil Kemenag Jawa Tengah sebagai lembaga yang diminta untuk menyusun bahan ajar Kurikulum 2013. Karena program ini baru, maka pihak madrasah menggandeng Universitas Negeri Semarang sebagai mentornya.

Penunjukkan MI Istiqomah sebagai *pilot project* penyusunan bahan ajar Kurikulum 2013 merupakan bukti riil bahwa kepercayaan MI Istiqomah Sambas telah berkembang dengan baik. Mencakup tidak hanya masyarakat dan instansi lingkup Kabupaten Purbalingga, tetapi meluas hingga lingkup provinsi seperti: Kanwil Kemenag Jateng dan Unnes. Kepercayaan sekaligus bangunan jaringan ini, menurut penulis, merupakan bagian terpenting dari keberhasilan MI Istiqomah Sambas dalam memperdayakan sumber daya yang dimiliki kemudian dikonstruksi dalam suatu kegiatan dan melahirkan suatu kepercayaan sekaligus jaringan dengan dinas lain.

### **3. Membangun Kepercayaan Melalui Kepemimpinan**

Sebagaimana dimaklumi, kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting terhadap kemajuan sebuah organisasi. Berkembang tidaknya sebuah organisasi akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana

43 Tentang Puskurbuk dapat diakses pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud (<http://puskurbuk.net/web13/kontak.html>).

44 Wawancara dengan Ikhwanid Arifin, Kepala Madrasah, pada tanggal 16 September 2014.

pembagian kekuasaan atau *steering* yang jelas beserta dengan standar operasi yang baku. Jika pembagian kewenangannya jelas, maka pergerakan organisasi tersebut tidak hanya bergantung pada satu pimpinan saja.

MI Istiqomah Sambas Purbalingga, dalam kaitannya dengan pembagian kewenangan organisasi, berbeda dengan madrasah ibtidaiyah pada umumnya. Jika madrasah pada umumnya hanya mempunyai kepala madrasah dan seorang wakil, tidak demikian halnya dengan MI Istiqomah Sambas. Di lembaga ini, struktur organisasi madrasah nya terbagi menjadi kepala madrasah dengan empat kepala bidang (kabid akademik, kesiswaan, keagamaan, dan kesekretariatan), seorang *management representative*, koordinator kelas, koordinator perpustakaan dan UKS.<sup>45</sup> Dengan struktur organisasi yang relatif lengkap tersebut nisacaya dapat memberikan layanan yang optimal kepada *stakeholders*. Sehingga meniscayakan hadirnya seorang *top manager* (kepala madrasah) yang visioner dan mampu menjadi toko penggerak bagi anak buahnya untuk mewujudkan cita-cita besar madrasah.

Dengan banyaknya jabatan yang ada di MI Istiqomah Sambas Purbalingga tentu saja berdampak pada dinamika yang muncul dalam menjalankan roda madrasah. Sehingga dibutuhkan upaya pemahaman terhadap visi misi secara terus menerus, karena semakin banyak pihak yang terkait akan memunculkan kemungkinan variasi pemahaman yang berbeda pula. Hal ini sangatlah wajar karena pemahaman seseorang tentang sesuatu dipengaruhi oleh banyak faktor.

Terlebih lagi, madrasah ini sudah mendeklarasikan sebagai madrasah inklusif, madrasah terbuka untuk masyarakat. Sehingga personil yaysan, para pejabat, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan orang-orang tua siswa sudah barang tentu berasal dari latar belakang pendidikan, ekonomi, pemahaman keagamaan, kebiasaan, afiliasi politik, profesi dan budaya yang berbeda.

Perbedaan sebagaimana tersebut di atas akan berdampak pada interaksi yang berlangsung. Gesekan-gesekan kecil yang sering terjadi sudah menjadi sesuatu yang wajar dalam sebuah organisasi. Selama gesekan tersebut masih dalam kerangka untuk mencapai tujuan yang sama, maka tidak menjadi masalah, bahkan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang positif. Karena, hal tersebut justru menunjukkan bahwa ada dinamika dalam sebuah organisasi atau institusi.

---

45 Dokumen MI Istiqomah Sambas Purbalingga tahun 2014.

Pilihan terhadap madrasah yang tidak berafiliasi pada partai politik dan juga organisasi agama tertentu juga merupakan pilihan yang cerdas. Gerakan madrasah menjadi lebih elastis dan luwes, lebih mudah diterima dari berbagai lapisan masyarakat. Di samping itu, madrasah mampu menampung semua sumber daya manusia dengan latar belakang yang berbeda. Kondisi yang demikian ini bahkan menjadi modal potensial yang luar biasa.

Keberhasilan langkah yang ditempuh untuk mewedahi semua perbedaan dan dinamika yang ada dalam organisasi tersebut akan menimbulkan kepercayaan atau *trust* dari masyarakat. Lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka partisipasi masyarakat terhadap lembaga pun akan tinggi pula. Sebaliknya, masyarakat akan rendah partisipasinya terhadap lembaga jika tidak ada *trust*. Dengan kata lain, partisipasi seseorang, masyarakat atau lembaga akan muncul jika ada sesuatu yang bisa untuk saling dipercayai.<sup>46</sup>

Untuk memelihara *trust* dari masyarakat, MI Sambas Purbalingga menerapkan beberapa strategi. *Pertama*, dengan menanamkan rasa percaya pada diri sendiri dan mempunyai rasa komitmen dan integritas yang tinggi dalam menjalankan organisasi yang bersifat terbuka dan jujur. *Kedua*, pemberlakuan aturan yang disepakati bersama secara konsisten dan berkesinambungan. *Ketiga*, dikembangkan sikap tidak melindungi kekurangan akan tetapi berani menjamin kualitas anggotanya dengan cara memberi kepercayaan yang tinggi. *Keempat*, penggunaan prinsip reputasi dan politik *branding image* dan menunjukkan bukti nyata. *Kelima*, kemampuan memelihara kepercayaan yang telah diberikan masyarakat dengan memberikan kembali kepercayaan tersebut dengan bentuk bahwa *out put* yang dihasilkan mempunyai daya saing tinggi.<sup>47</sup>

Sedangkan bentuk kongkrit partisipasi masyarakat terhadap MI Istiqomah Sambas dapat berupa langsung maupun tidak langsung. Pembayaran uang sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP) tiap bulan, infak tiap jum'at, infak pengajian *selapanan* (tiap 40 hari), menyekolahkan putra-putrinya, ikut mempromosikan madrasah adalah bentuk partisipasi langsung. Sedangkan partisipasi tidak langsung oleh instansi dapat berupa pemberian ijin, pemanfaatan fasilitas dan akses untuk menjalin kerja sama.

46 John F. Helliwell dan Robert D. Putnam, "Education and Social Capital", *NBER Working Paper*, 7121, Massachusetts, 1999, 4.

47 Disarikan dari hasil wawancara dengan Ikhwanid Arifin, tanggal 9 Agustus 2014.

Selanjutnya, partisipasi yang telah diberikan oleh masyarakat tersebut di mana melalui sentuhan manajemen kualitas dengan diterapkannya kualitas layanan publik yang optimal. Prinsip-prinsip manajemen yang digunakan meliputi: 1) selalu mengutamakan kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal, 2) sumber daya manusia yang mempunyai obsesi untuk melampaui mutu yang diharapkan pelanggan, 3) menerapkan pendekatan ilmiah dalam mendesain kinerja dan penyelesaian masalah, 4) mempunyai komitmen jangka panjang, 5) memperkuat *team work*, 6) perbaikan sistem yang terus menerus, 7) pendelegasian wewenang, 8) mempunyai satu visi misi yang sama, 9) pemberdayaan guru dan karyawan, dan 10) memberikan pelatihan, desiminasi atau bentuk *workshop* yang berkaitan dengan pembelajaran dan peningkatan kompetensi.<sup>48</sup>

Sementara itu, dalam hal layanan publik, madrasah telah mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang berasal dari; personal, organisasi, masyarakat, dan pihak swasta. Bentuk optimalisasi tersebut ditempuh melalui tiga strategi yang dikembangkan, yaitu: 1) mengembangkan *call center* dalam berbagai layanan, 2) *resource sharing* yang melibatkan sektor swasta (misalnya konsultasi psikologi, catering dan antar-jemput siswa), dan 3) konsultasi publik.<sup>49</sup>

Di samping menggunakan prinsip manajemen modern, dalam mengelola partisipasi masyarakat, MI Istiqomah Sambas juga melandaskan pada nilai-nilai agama, yakni amanah. Dengan bermodalkan dua pendekatan, manajemen dan amanah, *trust building* yang dilakukan oleh MI Istiqomah Sambas dapat berjalan dengan maksimal. Dengan jumlah siswa yang mencapai 1300 dengan 53 tenaga pendidik dan 20 tenaga kependidikan,<sup>50</sup> adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa partisipasi masyarakat Purbalingga dan sekitarnya terhadap madrasah ini sangatlah besar.

\*\*\*\*

---

48 Wawancara dengan Ikhwanidi Arifin, tanggal 9 Agustus 2014.

49 Wawancara dengan Ikhwanidi Arifin, tanggal 9 Agustus 2014.

50 Data MI Istiqomah Sambas Purbalingga tahun 2017.



## 5

# PENGEMBANGAN MI ISTIQOMAH SAMBAS MELALUI MODAL SOSIAL NORMA



Norma adalah suatu aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas tertentu. Aturan kolektif tersebut berupa aturan tertulis dan tidak tertulis yang berfungsi untuk mengontrol tingkah laku semua anggota dalam entitas tersebut. Norma sosial dalam satu komunitas bisa saja sama dengan norma komunitas lainnya, tapi tidak semua bentuk perwujudan atau tindakan norma sosial tersebut dapat digeneralisasi.

Sebagaimana dikatakan oleh Fukuyama, norma merupakan bagian dari modal sosial yang tidak diciptakan oleh birokrat atau pemerintah.<sup>1</sup> Norma tersebut terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh kharismatik yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau sekelompok masyarakat. Selanjutnya, ia akan menimbulkan modal sosial secara seponatan dalam rangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kelompok.

Kaitannya dengan MI Istiqomah Sambas, norma yang dibangun dan dikembangkan di lembaga ini juga tidak lepas dari tradisi yang sudah berjalan pada institusi-institusi sosial setempat. Norma yang berasal dari masyarakat tersebut kemudian ada yang disusun dalam bentuk dokumen

---

1 Fukuyama F., *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, (New York: Free Press 1995), 79.

dan ada juga yang tidak tertulis. Pembahasan berikut ini adalah deskripsi dari norma-norma yang dibangun dan dikembangkan di MI Istiqomah Sambas Purbalingga.

## A. NORMA KELEMBAGAAN

Dalam ilmu sosiologi dan antropologi, dikenal istilah “kelembagaan” yang biasanya merujuk pada norma, tingkah laku, atau adat istiadat. Dalam ilmu politik istilah kelembagaan biasanya menyangkut aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif untuk kepentingan bersama atau umum. Ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia. Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan, penegakan hukum, serta instrumen dan proses litigasinya.

Terkadang istilah kelembagaan dan organisasi digunakan secara tumpang tindih (*interchangeably*) dan membingungkan. Secara keilmuan, *social institution* dan *social organization* berada dalam level yang sama, untuk menyebut apa yang dikenal dengan kelompok sosial, grup, *social form*, dan lain-lain yang sejenis. Namun dalam perkembangan, istilah “kelembagaan” lebih sering digunakan untuk makna yang mencakup keduanya sekaligus.

Ada beberapa alasan mengapa kata “kelembagaan” cenderung banyak dipilih orang dewasa ini dari pada kata yang lain, seperti kata organisasi. Kata organisasi lebih menunjuk kepada suatu *social form* yang bersifat formal dan memiliki kecenderungan negatif dari segi *image*. Adapun kata kelembagaan lebih memberi warna “sosial” dan cenderung menghargai budaya lokal, atau lebih humanistik.<sup>2</sup> Karena inilah kata kelembagaan banyak digunakan orang.

Kelembagaan adalah bagian dari peraturan dan tingkah laku manusia yang bersifat kolektif. Sehingga, jika dikaitkan dengan norma kelembagaan dalam sistem pendidikan di MI Istiqomah Sambas, maka norma kelembagaan bisa didefinisikan sebagai sistem koordinasi dan konsolidasi tentang kebijakan perilaku, aturan, dan nilai-nilai bagi seluruh komponen atau unsur yang ada di MI Istiqomah Sambas.

MI Istiqomah Sambas sangat menyadari betapa pentingnya konsolidasi internal dalam kaitannya dengan norma. Sebuah lembaga pendidikan tidak akan bisa mengembangkan dirinya jika di internal

---

2 Maryadi Syarif, "Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam", dalam *Media Akademika*, Vol. 28, No. 3, Juli 2013, 334.

lembaga tersebut tidak tertanam nilai-nilai dan norma seperti etos kerja, jujur, amanah dan ikhlas. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi kunci utama menuju sebuah keberhasilan.

Ada beberapa strategi yang diterapkan oleh MI Istiqomah Sambas dalam membangun dan mengembangkan norma kelembagaan sebagai bagian modal sosial, yaitu:

### **1. Membangun Disiplin dan Etos Kerja**

Disiplin dapat diartikan latihan, pendidikan kesopanan, kerohanian, atau pengembangan tabiat.<sup>3</sup> Sementara etos kerja adalah gabungan dari kata “etos” dan “kerja”. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “etos” memiliki arti pandangan hidup yang khas dari suatu golongan masyarakat. Sementara “kerja” adalah semangat yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.<sup>4</sup> Berdasarkan dua pengertian tersebut, baik dalam disiplin maupun etos kerja terdapat semangat untuk mengembangkan tabiat dan keyakinan seseorang atau kelompok dalam bentuk suatu pekerjaan.

Secara struktur, disiplin dan etos kerja MI Istiqomah dikembangkan dalam seluruh tatanan organisasi madrasah yang meliputi Direktur, Kepala Madrasah, *Master of Representative*, Kepala Bidang, Wali Kelas, Guru dan Karyawan.<sup>5</sup> Seluruh personal yang terdapat dalam struktur organisasi harus melakukan standar kerja yang mengacu pada SOP yang disepakati bersama.

Di awal pelaksanaan program kerja, ada beberapa kendala yang biasanya muncul. Hal ini dikarenakan banyaknya personil anggota yang belum sepenuhnya memahami mengenai tujuan dari norma yang ditetapkan. Menurut Ibu Okky, kendala tersebut dapat diatasi dengan dibuatkannya *job deskripsi* yang jelas bagi seluruh elemen lembaga. Setiap komponen madrasah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Mereka bekerja seperti mesin yang sudah terprogram, mereka juga bekerja tanpa menunggu diperintah, semua komponen madrasah bisa bekerja dengan baik dan penuh tanggungjawab.<sup>6</sup> Moral yang

3 Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 151.

4 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 39.

5 Dokumen Struktur MI Istiqomah Sambas Tahun 2014. Dikutip pada tanggal 16 Agustus 2014.

6 Wawancara dengan Okky, Management of Representative MI Istiqomah Sambas, tanggal 15 April 2014.

ditanamkan dalam etos kerja adalah kesadaran dan semangat seluruh komponen sehingga antar-komponen senantiasa terjalin sebagai simpul modal sosial.

Dalam pengamatan penulis, setiap individu di MI Istiqomah Sambas bekerja secara dinamis, penuh semangat, dan melakukannya dengan senang hati tanpa ada rasa terpaksa. Hal inilah yang akhirnya mampu menghasilkan energi produktif yang sangat baik bagi peningkatan kualitas madrasah. Mereka bergerak dalam irama yang sama, memberikan komitmen yang tinggi untuk mengembangkan madrasah, memiliki rasa keikhlasan, rasa nyaman di madrasah, saling membantu, memiliki ikatan sosial yang tinggi, dan mempunyai niat untuk berjuang.<sup>7</sup>

Setiap komponen madrasah juga mengembangkan *shared value* berupa nilai-nilai komitmen bersama untuk memajukan madrasah. Semua program yang telah disepakati dijalankan dengan bertanggungjawab dan senang hati. Oleh karena itu, di antara personal tersebut hampir tak pernah terjadi gesekan atau konflik yang bertatar belakang politik maupun aliran agama. Perbedaan latar belakang keagamaan di antara komponen madrasah, tidak berdampak serius terhadap budaya kerja, semua komponen mempunyai kesamaan sikap dan komitmen yaitu ketika menjadi bagian di MI Istiqomah Sambas, maka mempunyai tujuan satu yaitu memajukan madrasah.<sup>8</sup>

Keinginan untuk memajukan madrasah yang unggul, menjadi modal yang sangat kuat dan tertanam di semua jiwa para penyelenggara MI Istiqomah. Hasilnya pun menjadi sangat jelas ketika MI Istiqomah Sambas menjadi juara nasional madrasah berprestasi pada tahun 2005. Prestasi ini tidak membuat mereka menjadi puas, tapi menjadi cambuk untuk memperoleh prestasi yang lebih tinggi lagi. Salah satunya adalah dengan memperoleh tropi dan sertifikat juara 1 madrasah berprestasi tingkat nasional pada tahun 2012.<sup>9</sup>

Prestasi yang diraih merupakan kesatuan nilai dan norma yang tertanam dalam seluruh struktur madrasah, keluarga besar madrasah dan masyarakat sekitar. Keberhasilan tersebut merupakan produk dari sistem dan model kepemimpinan yang dijalankan oleh MI Istiqomah Sambas dengan pendekatan *amanah*. Dengan kata lain, seluruh warga madrasah

7 Pengamatan mendalam penulis terhadap sistem dan aktifitas kerja komponen madrasah pada tanggal 12-13 Mei 2014.

8 Wawancara dengan Ikhwanidi Arifin, Kepala Madrasah, pada tanggal 16 Agustus 2014.

9 Dokumen MI Istiqomah Sambas Purbalingga, Tahun 2014.

bekerja tidak berdasarkan jabatan struktural dengan filosofi “tukang cukur”. Menurut Ikhwandi Arifin, Kepala Madrasah, istilah “tukang cukur” untuk mengartikan bahwa anak buah mau bekerja hanya jika diawasi dan diminta oleh pimpinan (kepala), jika pimpinan tidak ada maka mereka juga tidak bekerja atau malas-malasan.<sup>10</sup>

Menurut penulis, MI Istiqomah Sambas cukup berhasil dalam menciptakan model komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan. Selain itu, komunikasi dan hubungan baik juga selalu dijalin dengan warga sekitar madrasah. Beberapa pengajar di MI Istiqomah Sambas menyebutkan<sup>11</sup> bahwa mereka membiasakan diri untuk selalu hadir memenuhi undangan warga yang mengadakan hajatan atau bertakziah ke rumah warga yang tertimpa musibah. Madrasah juga menyediakan anggaran yang disebut “bungah-susah”,<sup>12</sup> guna memenuhi keperluan kunjungan ke warga. Ini adalah bukti bahwa norma kegotongroyongan terpelihara dengan sangat baik di MI Istiqomah Sambas.

## **2. Membangun Kualitas Pembelajaran**

Manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses belajar mengajar, dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen pembelajaran merupakan pengaturan semua kegiatan pembelajaran, baik kegiatan pembelajaran yang dikategorikan dalam kurikulum inti maupun penunjang, berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama, dan berbagai aspek yang mendukung proses belajar mengajar.

Dengan demikian, suatu pembelajaran akan dapat berhasil dengan maksimal apabila dikelola dengan baik. Pembelajaran tidak bisa diberikan secara insidental dan tanpa persiapan yang matang. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang baik, banyak faktor yang ikut mempengaruhinya, dari kepemimpinan madrasah, faktor guru, sarana dan prasarana, suasana akademik, hingga kurikulum dan yang lainnya.

Dalam perencanaan pembelajaran, semua guru MI Istiqomah Sambas Purbalingga mengawali dengan membuat program semester

---

10 Wawancara dengan Ikhwandi Arifin, Kepala Madrasah, pada tanggal 16 Agustus 2014.

11 Wawancara dengan Nur Cholis, Sri Mulyani Barokah, dan Sri Suprijatni, guru-guru MI Istiqomah, pada tanggal 16 Agustus 2014.

12 *Bungah-susah* adalah istilah yang dipakai untuk saling membantu warga madrasah baik dalam keadaan senang maupun susah/musibah.

dan mempersiapkan berbagai sumber belajar. Rencana pembelajaran ini sudah harus dibuat satu minggu sebelum pelajaran dimulai. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari guru masuk terlebih dulu ke bidang akademik untuk diselaraskan dan distandarkan. Jika sudah melalui proses penyelarasan dan pen-standaran, maka baru bisa diaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran di kelas bisa seiring dengan visi dan misi Madrasah.

### 3. *Pengawasan Pembelajaran*

Pengawasan atau *controlling* merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan mengatur potensi baik yang berkaitan dengan produksi maupun sumber daya yang ada. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang terkait dengan perencanaan strategis, sedangkan perencanaan strategis merupakan puncak dari suatu pemikiran untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai organisasi dan juga merencanakan berbagai sumber daya yang ditetapkan organisasi serta usaha pencapaian tujuan strategis.

Dalam konteks pendidikan, pengawasan ini sangat terkait dengan rangkaian penjaminan mutu yang diadakan di sekolah/ madrasah. Tujuannya adalah untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, pejabat madrasah dapat memperoleh informasi balik yang sangat bermanfaat dalam upaya menghasilkan perbaikan program dan prosedur serta usaha individual atau kelompok dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.

Pengawasan yang berlangsung di MI Istiqomah Sambas dilaksanakan secara terprogram dan konsisten. Sebagaimana penuturan bapak Ikhwandi Arifin, pengawasan yang dilakukan di MI Istiqomah Sambas meliputi:<sup>13</sup>

#### a. *Supervisi*

Supervisi adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan prestasi pendidikan. Atau bisa juga diartikan bantuan yang diberikan kepada guru dan seluruh staf untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik.

Supervisi yang dimaksud dalam buku ini adalah upaya satuan lembaga pendidikan untuk mengukur efektifitas kinerja guru dan

---

13 Wawancara dengan Ikhwandi Arifin, Kepala Madrasah, pada tanggal 16 Agustus 2014.

karyawan MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Supervisi dilaksanakan untuk meninjau kinerja guru dan karyawan yang meliputi: pengelolaan kelas oleh guru, pelaksanaan tugas oleh karyawan, serta pelaksanaan kegiatan sekolah yang telah terprogram. Sedangkan personalia yang melakukan supervisi adalah Kepala Madrasah, Kepala Bidang serta tim yang dibentuk oleh kepala madrasah. Pelaksanaan supervisi ini sekurang-kurangnya diadakan 3 bulan sekali.

b. *Audit Internal*

Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.<sup>14</sup> Adapun pemeriksaan internal (*internal auditing*) adalah fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif.<sup>15</sup>

Dalam proses penjaminan mutu, proses audit menjadi kegiatan yang sangat menentukan. Audit diperlukan untuk mengevaluasi ketercapaian penjaminan mutu dan mengidentifikasi peluang perbaikan yang dibutuhkan. Di MI Istiqomah Sambas, pelaksanaan audit internal dilaksanakan oleh auditor internal yang mempunyai kapabilitas tentang penjaminan mutu dan sudah mempunyai sertifikat sebagai auditor.

Personalia yang melakukan audit internal adalah *Management of Representative* (MR), di mana para anggotanya ditunjuk oleh Kepala Madrasah dan Yayasan Istiqomah Sambas. Pelaksanaan audit internal di MI Istiqomah Sambas dilakukan sesuai jadwal dan sekurang-kurangnya empat bulan sekali.<sup>16</sup>

---

14 Sukrisno Agoes, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik*, Edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 4.

15 Hiro Tugiman, *Standar Profesi Audit Internal*, Edisi Kelima (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 11.

16 Prosedur Penjaminan Mutu MI Istiqomah Sambas, Edisi 3 Tahun 2014.

c. *Penilaian Kinerja Guru dan Karyawan*

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja guru dan karyawan, MI Istiqomah Sambas melakukan penilaian kinerja guru dan karyawan sebanyak dua kali dalam satu tahun di bulan Juni dan Desember.<sup>17</sup>

Objek penilaian kinerja guru dan karyawan meliputi: hasil kerja efektif terhadap sasaran yang telah ditetapkan, kedisiplinan pelaksanaan tugas, kerja sama, kreatifitas, loyalitas, dan kepribadian. Hasil penilaian kinerja ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan promosi dan gradasi, kenaikan pangkat dan golongan, kenaikan gaji, dan pemberian penghargaan.

d. *Penilaian dari Stakeholder*

Sebagai penerus perjuangan Bapak Suchari, ibu Hajjah Ifitah Suchari menerapkan manajemen nonprofit pada MI Istiqomah Sambas. Bahkan tidak jarang ketika melihat sarana yang kurang sesuai di madrasah, Ibu Suchari langsung memberikan uang *cash* untuk membetulkannya.<sup>18</sup> Tindakan yang dilakukan oleh Ibu Ifitah Suchari ini menjadi energi potensial yang dahsyat bagi semua guru dan karyawan untuk bekerja keras dengan tanpa berorientasi pada materi.

Sebenarnya, sebuah lembaga pendidikan dengan jumlah murid sebanyak 1.300, banyak materi yang dapat dikumpulkan. Namun penarikan dana dari masyarakat hanya untuk menutupi dana operasional madrasah dan sifatnya tidak terlalu mahal. Selama ini, dana untuk pengadaan infrastruktur yang harganya mahal, seperti membangun ruang kelas atau pembelian barang-barang elektronik, masih mendapat subsidi dari yayasan.

Sifat sederhana dan rendah hati (moral) yang ditunjukkan oleh Ibu Ifitah Suchari membuat masyarakat semakin percaya terhadap keberadaan MI Istiqomah Sambas. Masyarakat yang menyekolahkan putra-putri mereka ke MI Istiqomah Sambas bukan karena gengsi tapi karena perilaku yang dicontohkan oleh para pendirinya. Sehingga motivasi orang tua sudah mengalami pergeseran, dari yang semula sangat pragmatis, seperti; agar anaknya dapat melanjutkan

17 Dokumen Penjaminan Mutu MI Istiqomah Sambas, Tahun 2014.

18 Wawancara dengan Ikhwandi Arifin, Kepala Madrasah, pada tanggal 16 Agustus 2014.

sekolah ke SMP favorit, atau agar pintar ilmu agama dan umum, berubah menjadi semacam ingin mengimitasi sikap para pengelola madrasah atau yayasan.

## **B. NORMA SOSIAL**

### **1. Pengertian Norma Sosial**

Secara ilmiah dalam kondisi kehidupan masyarakat yang telah semakin berkembang dan modern, tentu segala aktivitas selalu diperhitungkan fungsi dan manfaatnya bagi kepentingan hidup manusia dalam masyarakat dengan landasan kebaikan dan kebenaran. Dalam konteks ini masyarakat tidak menilai unsur budaya, termasuk norma, secara subjektif, melainkan menggunakan penalaran kausalitas logis yang sesuai dengan kehendak dan kepentingan kelompok atau masyarakat.

Dengan posisi yang demikian ini, masyarakat akan mampu memilih dan memberikan penilaian terhadap fungsi kebudayaan yang ada, dan masyarakat harus berani menolak nilai atau norma yang tidak sesuai lagi atau norma asing yang cenderung merusak prinsip kepribadian masyarakat dan bangsa secara umum. Meski penilaian tersebut bersifat subjektif namun tetap tunduk pada prinsip norma yang berfaku. Kebiasaan asing yang berhubungan dengan pemenuhan hajat hidup harus dinilai secara objektif baik material maupun spiritual.

Kehidupan masyarakat sebagai suatu kondisi pergaulan yang dinamis dengan segala konsekuensinya perlu diikat dengan makna norma, agar dapat tercapai stabilitas sosial yang mantap dalam kelompok masyarakat. Akibat yang timbul karena ikatan tersebut adalah adanya solidaritas, yang dengannya diharapkan dapat mempererat persatuan dan persatuan masyarakat dalam derap langkah mencapai tujuan.

Menurut pengamatan penulis, norma yang terbentuk di MI Istiqomah Sambas lahir dari pemikiran-pemikiran dan sebagian bahan renungan individu yang kemudian dikembangkan secara kelompok dalam hidup bermasyarakat yang gunanya untuk mencegah perpecahan, pertengkaran, permusuhan, dan agar tercipta keadilan. Peraturan norma yang terbentuk adalah hasil dari kata sepakat dan hasil suara terbanyak yang sama-sama mempunyai tujuan yang satu yaitu norma. Peruntukan norma ini sebagai pondasi dan landasan dalam berperilaku dan bertatakrma dalam pergaulan sehari-hari tanpa memandang status sosial seseorang atau faham agama tertentu.

Masyarakat yang ada di sekitar MI Istiqomah Sambas terdapat banyak kelompok yang sudah barang tentu memiliki pandangan tentang perilaku mana yang dianggap pantas untuk dijafankan oleh anggotanya. Dalam hal ini tentu ada pedoman yang disepakati bersama berupa kaidah yang mengatur kehidupan anggotanya baik berupa keharusan, anjuran, maupun larangan, apa yang harus dimiliki, dipercayai, dan dikehendaki. Kaidah itulah yang kemudian disebut sebagai norma kelompok yang terbentuk dari proses akumulatif interaksi kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat Lewis bahwa pola interaksi sosial ini kemudian dijadikan sebagai suatu peraturan, dengan harapan masyarakat atau anggota sosial yang lain akan menyesuaikan terhadap norma tersebut.<sup>19</sup>

Banyaknya institusi-institusi lokal di Purbalingga, semacam arisan, pengajian, yasinan, tahlilan, kelompok ronda, remaja masjid, dasa wisma dan sebagainya, yang terbentuk atas keinginan bersama merupakan sistem yang saling silang (*cross-cutting affiliation*) dan sekaligus berperan sebagai pengaman sosial (*social safety net*) ketika institusi tersebut berada dalam kondisi krisis. Institusi ini pada dasarnya merupakan regulasi perilaku kolektif yang bersandar pada etika sosial, sehingga ia mampu untuk mengatur diri sendiri dari kacamata normatif. Dalam konteks inilah, institusi lokal mampu menjadi bingkai etika komunitas lokal.<sup>20</sup>

Norma sosial juga diartikan sebagai aturan adat perilaku pada koordinat interaksi sosial dengan yang lain. Norma sosial juga bisa dimaknai sebagai fungsi untuk mengkoordinasikan harapan masyarakat pada interaksi yang memiliki beberapa keseimbangan. Norma mengatur berbagai hal, seperti hak milik, kontrak, bentuk komunikasi, dan konsep keadilan. Dengan norma, kondisi penyeragaman perilaku dalam suatu kelompok sosial tertentu bisa dipaksakan, meskipun pemaksaan tersebut sering bervariasi secara substansial antar-kelompok.

Norma yang diturunkan dari budaya lokal dan atau universal yang kemudian disepakati bersama juga berfungsi sebagai perekat dari berbagai individu atau kelompok yang berbeda. Ikatan budaya ini jauh lebih kuat dibanding dengan ikatan yang dilandasi dengan kepentingan, ekonomi maupun agama. Sebagai contoh, kasus Inggris yang menempuh jalan

19 David Lewis, *Convention: A Philosophical Study* (Cambridge MA: Harvard University Press, 1969). Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume (ed.), *The New Palgrave Dictionary of Economics*, Second Edition, (London: Macmillan, tt.), 1, dapat diakses pada (<http://www.economics.ox.ac.uk/materials/PalgraveSocialNormsJuly07.pdf>).

20 Purwo Santosa, *Merubah Watak Negara*, (Yogyakarta: LAPPERA Pustaka, 2002), 6.

*brexit* dari Masyarakat Ekonomi Eropa adalah representasi dari sebuah kelompok yang hanya didasari oleh ekonomi semata, atau konflik Timur Tengah yang tidak berkesudahan merupakan contoh lain dari kelompok besar yang hanya difandasi dengan agama semata.

Norma tidak bersifat tunggal dan mutlak, ia bisa bergeser dan berubah seiring dengan adanya perubahan tujuan, keadaan, persepsi, atau harapan yang bersifat subjektif. Dalam bahasa yang lebih umum, pergeseran norma dapat dimodelkan dengan menggunakan teori permainan evolusi, sehingga beberapa norma dapat diprediksikan lebih stabil daripada yang lain dalam jangka panjang.<sup>21</sup>

Merujuk pada pengertian norma di atas, MI Istiqomah mengembangkan norma sosial dalam lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah melalui pendidikan perilaku yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pengembangan norma sosial tersebut dilakukan melalui seluruh pengurus yayasan, pelaksana kegiatan pendidikan MI Istiqomah, serta melalui anak didik dan alumni MI Istiqomah Sambas.

## 2. *Tingkatan Norma Sosial*

Tidak mudah untuk membuat rumusan mengenai tingkatan norma sosial. Hal ini dikarenakan subyektifitas yang terjadi ketika seseorang membuat batasan norma dalam kaitannya dengan moral. Belum lagi jika dibuhungkan dengan konteks sosial masyarakat yang selalu berubah. Namun demikian, berdasarkan pendapat beberapa ahli, tingkatan norma sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Cara (*Usage*). Cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus, seperti makan yang baik adalah menggunakan tangan kanan atau yang semisalnya.
- b. Kebiasaan (*Customs*). Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas serta dianggap baik dan benar. Seperti kebiasaan masyarakat yang menggunakan baju sopan saat bertamu.
- c. Tata kelakuan (*Mores*). Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh

21 Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume (ed.), *The New Pgrave*, 1.

sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dalam tata kelakuan terdapat unsur memaksa atau melarang suatu perbuatan, seperti dilarang membunuh, merampok, dan lain-lain.

- d. Adat istiadat (*Custom*). Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.

Dari empat tingkatan moral tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa norma sosial merupakan aktifitas perbuatan yang berulang-ulang difakukan dalam suatu masyarakat tertentu, dengan merujuk pada berbagai kebiasaan, tata kelakuan, serta adat kebiasaan. Kemudian, semua aktifitas perbuatan tersebut dilakukan dalam kesadaran, dan sebagai bagian dari pengawasan sosial.

### 3. *Norma Sosial yang Dikembangkan di MI Istiqomah Sambas*

Berdasarkan pengamatan penulis, norma sosial yang dibangun di MI Istiqomah Sambas dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:

#### a. *Norma Agama*

Ketika orang mendefinisikan agama sebagai sistem kepercayaan manusia kepada Tuhan, maka landasan norma agama tersebut tentu bersumber dari aturan Tuhan. Dalam teori agama, setiap pelaku kebaikan akan mendapatkan pahala, sementara pelaku kejahatan akan mendapatkan dosa. Norma ini tidak bisa ditawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan.

MI Istiqomah membangun norma sosial yang bersumber pada norma agama dengan mendasarkan pada dua pokok ajaran Islam yaitu: *arkānūl imān* dan *arkānūl Islām*. Keduanya menjadi prioritas utama bagi seluruh unsur dan komponen MI Istiqomah Sambas untuk dipedomani dan diamalkan.<sup>22</sup> Secara lebih detail, keduanya bisa dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Arkānūl Imān* sebagai pendorong dan pengontrol terhadap unsur-unsur MI Istiqomah dalam bersosial.

*Arkānūl imān* berintikan 6 (enam) dasar dalam keimanan Islam, yaitu: iman kepada Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-rasul Allah, Malaikat-malaikat Allah, Hari Akhir, serta iman kepada

---

22 Dua istilah yang penulis tawarkan kepada pimpinan madrasah tentang *Arkānūl Imān* dan *Arkānūl Islām* sebagai dua teori dalam membangun norma sosial di aspek agama disetujui oleh pimpinan madrasah. Diskusi penulis dengan pimpinan madrasah pada tanggal 15 April 2014.

Qadla dan Qadar Allah. Keenam dasar keimanan ini menjadi pegangan bagi MI Istiqomah Sambas dalam beraktifitas sosial.

Setiap unsur dalam MI Istiqomah Sambas wajib memberikan teladan keimanan yang berdampak sosial. Dalam diri mereka ditanamkan kesadaran bahwa baik dan buruk dalam bersosial tidak sekedar merupakan tanggungjawab bermasyarakat, tapi merupakan tanggungjawab keagamaan yang terkait dengan pahala dan dosa. Dengan iman yang baik diharapkan akan tercipta norma sosial yang baik pula.

Pokok-pokok keimanan juga selalu ditanamkan kepada murid-murid MI Istiqomah Sambas. Salah satunya adalah dengan memberikan materi pelajaran ke-tauhidan atau aqidah, sejak para murid masuk kelas I. Materi keimanan menjadi penting di tengah muncul dan berkembangnya berbagai aliran, kepercayaan, atau akidah di kalangan masyarakat muslim yang dalam banyak hal dianggap menyimpang.

Menurut Ikhwandi Arifin, penanaman ke-tauhidan atau aqidah terhadap seluruh murid MI Istiqomah Sambas difakukan dengan tujuan agar mereka memahami dasar-dasar keimanan dalam Islam secara baik dan benar. Secara lebih khusus, tujuannya adalah untuk menanamkan pemahaman mengenai keimanan terbuka dan moderat. Dengan begitu, diharapkan murid-murid dan alumni MI Istiqomah dapat menjadi bagian masyarakat yang senantiasa menjadikan keimanan sebagai unsur utama dalam membangun karakter norma sosial yang baik dan Islami.<sup>23</sup>

2) *Arkānul Islam* sebagai Dasar Pembangunan Keislaman yang Berdimensi Sosial.

*Arkānul Islam* merupakan lima pokok sistem ajaran Islam yang meliputi: *yabādat*, shalat, zakat, puasa, dan haji. Dalam konteks norma sosial, maka setiap individu dalam melaksanakan *arkānul Islam* harus senantiasa memberi dampak positif secara sosial dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang sudah ada.

Dalam pelaksanaan shalat misalnya, MI Istiqomah menanamkan bagi seluruh guru, tenaga pendidik, dan siswa

---

23 Wawancara dengan Ikhwandi Arifin, Kepala Madrasah, pada tanggal 15 April 2014.

untuk senantiasa melaksanakan shalat berjama'ah, khususnya shalat Dzuhur di madrasah. Dengan shalat berjama'ah diharapkan akan tertanam kebersamaan di antara makhluk sosial, tanpa perbedaan strata sosial. Kemudian hal tersebut juga akan berpengaruh dalam kehidupan sosial yang sesungguhnya, di mana guru, tenaga pendidik, dan siswa akan terbiasa dengan kehidupan sosial melalui shalat berjama'ah di masjid, atau mushala di lingkungan mereka.<sup>24</sup>

Dalam konsep Zakat, bisa ditanamkan nilai agama yang sangat strategis sebagai pembangunan modal sosial. Karena, dalam aktifitas zakat terdapat sumbangsih yang nyata dalam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa zakat merupakan nilai keagamaan dan nilai sosial yang integratif yang mampu menopang kemajuan peradaban. Nilai integratif inilah yang menjadi titik khas Islam dan sekaligus menjadikannya lebih unggul dibanding agama lain.

Zakat merupakan instrumen religius yang sarat dengan dimensi humanis. Zakat bukan merupakan pengganti skema pembiayaan mandiri sebagaimana yang dibuat dalam masyarakat modern dengan membangun *social we fare* untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial terhadap pengangguran, kecelakaan, usia tua maupun kesehatan, melalui pengurangan gaji pegawai, dan kontribusi orang yang memberikan pekerjaan.<sup>25</sup> Bahkan, konsep Islam tentang kewajiban zakat atas kekayaan, seperti ternak, perdagangan dan uang, jauh lebih dahulu ada dan lebih crisinil daripada konsep kaum sosialis mengenai pemungutan pajak atas kekayaan.<sup>26</sup> Beberapa pandangan di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen luhur dan orisinil dari ajaran Islam yang mempunyai nilai keunggulan dalam konteks beragama maupun bermasyarakat.

Selama ini, MI Istiqomah Sambas baru melaksanakan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah yang dilaksanakan pada setiap bulan Ramadhan. Namun kedepan, pimpinan

---

24 Wawancara dengan Ikhwandi Arifin, Kepala Madrasah, pada tanggal 15 April 2014.

25 M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Amdiar dkk. (Jakarta: SEBI, 2001), 333.

26 Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Jilid 2, 1027.

madrasah telah berencana untuk mendirikan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di MI Istiqomah Sambas yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat mal yang dibebankan kepada seluruh guru dan karyawan sebesar 2,5% setiap bulan.<sup>27</sup>

Sedangkan Puasa (Ramadhan), dalam konteks norma sosial, dapat dideskripsikan sebagai realisasi norma sosial di bidang keagamaan yang sangat menonjol, di mana pada setiap bulan Ramadhan MI Istiqomah Sambas selalu melaksanakan Pekan Ramadhan MI Istiqomah. Kegiatan tersebut diselenggarakan 1 tahun sekali dan melibatkan tidak hanya unsur madrasah tetapi juga masyarakat di sekitar MI Istiqomah Sambas.

Dalam kegiatan Pekan Ramadhan, MI Istiqomah Sambas biasanya mengadakan Bazar Murah Sembako, Pakaian Bekas Layak Pakai, Kue Lebaran, dan lain-lain. Berbagai kegiatan keagamaan yang diramaikan dengan aktifitas sosial sangat berdampak terhadap keluhuran lembaga pendidikan agama. Bahkan, kegiatan ini dapat menggerakkan kegairahan ekonomi dan antusiasme masyarakat. Oleh karenanya, Pekan Ramadhan di Madrasah yang selama ini berjalannya dibuat sedemikian rupa dengan berbagai kegiatan yang banyak melibatkan masyarakat sekitar madrasah.

Di setiap bulan Ramadhan, MI Istiqomah Sambas juga menyelenggarakan "Pelatihan Dai Kecil". Pengurus MI Istiqomah Sambas menyadari bahwa dakwah adalah kewajiban bagi setiap individu untuk melakukan perbaikan dan pencerahan kepada diri maupun masyarakat di sekitarnya. Dalam upaya mencetak kader-kader dakwah masa depan, MI Istiqomah Sambas menyelenggarakan pelatihan dai kecil yang hasilnya ditampilkan di berbagai acara pengajian, baik di masyarakat maupun disiarkan melalui radio yang ada di Purbalingga setiap bulan Ramadhan.<sup>28</sup>

Penanaman norma keagamaan sebagai bagian dari norma sosial juga diberikan kepada para alumni MI Istiqomah Sambas. Sebelum lulus, mereka dibekali pemahaman untuk menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki nilai sosial sekaligus

27 Gagasan pendirian UPZ masih dalam proses sosialisasi.

28 Wawancara dengan Enok Rohayati, salah satu guru agama, tanggal 15 April 2014.

keyakinan agama. Pemahaman ini tidak hanya berhenti di level teoritis tetapi harus diwujudkan dalam perilaku praktis.

Siswa dan lulusan dari MI Istiqomah merupakan ujung tombak dalam mewujudkan modal sosial di bidang norma sosial. Tingkat keberhasilan siswa dan alumni MI Istiqomah dalam mengetahui dan mempraktikkan aspek-aspek nilai-nilai keagamaan diharapkan akan menciptakan modal sosial lainnya, yaitu *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap keberadaan MI Istiqomah Sambas.

#### b. *Norma Kesusilaan*

Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan suatu aktifitas (perbuatan, perkataan, atau sikap) yang dianggap baik dan buruk. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat berakibat sanksi pengucilan secara fisik (dipenjara, diusir) ataupun batin (dijauhi). Dengan begitu, perbedaan mendasar antara norma keagamaan dengan norma sosial adalah terletak pada filosofi perumusannya dan akibat yang ditimbulkannya. Jika norma keagamaan bersumber dari wahyu Tuhan dan dampaknya juga ditentukan oleh teks-teks keagamaan, maka norma sosial (kesusilaan) dirumuskan dan ditentukan akibatnya oleh kesepakatan antar-masyarakat.

Terkait dengan hal di atas, ada beberapa norma kesusilaan yang dibangun oleh MI Istiqomah Sambas, yaitu:

- 1) Norma Kesusilaan antar-pelaksana pendidikan;
- 2) Norma Kesusilaan pelaksana pendidikan dengan peserta didik;
- 3) Kesusilaan antara unsur-unsur madrasah dengan unsur-unsur wali siswa, dan *stakeholder*; dan
- 4) Pemahaman siswa tentang eksistensi laki-laki dan perempuan

#### c. *Norma Kesopanan*

Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti berkata yang halus dengan orang yang lebih tua, buang air besar di toilet, dan lain-lain.

MI Istiqomah Sambas dalam norma kesopanan ditekankan pada tiga perilaku sosial, yaitu: kesopanan dalam berucap, kesopanan dalam bersikap, serta kesopanan dalam berbusana.

### 1) Kesopanan dalam Berucap

MI Istiqomah menanamkan nilai standar dari norma kesopanan dalam berucap dengan mengucapkan salam kepada sesama muslim dalam setiap pertemuan di pagi hari dan menjelang pulang sekolah, ucapan salam juga diikuti dengan berjabat tangan.

Di dalam kelas, kesopanan dalam berucap dipraktikkan melalui ucapan berdoa bagi murid dan guru yang diucapkan secara bersama-sama untuk memulai aktifitas belajar mengajar.

MI Istiqomah juga menanamkan norma kejujuran kepada seluruh unsur di madrasah, terutama pada murid-murid MI Istiqomah. Contoh yang sering diberikan adalah jika menemukan alat-alat sekolah atau barang-barang yang berharga lainnya yang ditemukan di lingkungan madrasah, diwajibkan untuk menyerahkan ke pihak sekolah untuk diumumkan atau diserahkan kepada pemiliknya.<sup>29</sup>

### 2) Kesopanan dalam Bersikap

Kesopanan dalam bersikap yang ditanamkan bagi murid-murid MI Istiqomah Sambas salah satunya dicontohkan dalam bentuk cium tangan ke orang tua ketika mau berangkat sekolah dan ketika pulang dijemput orang tua. Ketika bertemu guru di madrasah, murid-murid MI Istiqomah juga diajarkan untuk bersikap sopan dengan menunduk atau mencium tangan ibu atau bapak gurunya, minimal di lingkungan madrasah.

### 3) Kesopanan dalam Berbusana

Menurut Ikhwandi Arifin, MI Istiqomah Sambas sangat menekankan kepada seluruh unsur yang ada di dalam MI Istiqomah agar memakai busana yang Islami. Bagi ibu-ibu dilarang untuk memakai celana panjang, tapi menggunakan rok panjang. Demikian juga bagi murid-murid MI Istiqomah dari kelas I sampai kelas VI sangat dipantau dalam hal kesopanan

---

29 Untuk mendukung penanaman nilai kejujuran ini, madrasah menyediakan papan pengumuman khusus tentang kehilangan barang.

berbusana. Seperti, meskipun murid perempuan sudah memakai rok panjang, tetapi mereka juga harus memakai celana panjang dalam (celana *luggin*) untuk menghindari terlihatnya aurat.

d. *Norma Kebiasaan*

Norma kebiasaan adalah peraturan-peraturan sosial yang dijadikan sebagai norma yang didasarkan pada perilaku sosial yang dilakukan oleh banyak individu dan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan di dalam suatu masyarakat. Kebiasaan ini kemudian dijadikan sebagai acuan norma yang apabila dilanggar, maka pelaku pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Hanya saja sanksi yang diberikan tidak seberat pelanggaran terhadap norma agama, kesusilaan, atau kesopanan.

MI Istiqomah membangun norma kebiasaan melalui beberapa aktifitas yang difokuskan pada dua tradisi besar, yaitu: a) tradisi Islami melalui Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan b) tradisi umum melalui kegiatan masyarakat yang bersifat umum seperti peringatan hari kemerdekaan RI atau yang lain.

1) Tradisi Islami melalui Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Terdapat dua tradisi Islami yang senantiasa dibiasakan oleh MI Istiqomah dan dipandang strategis untuk membangun hubungan sosial dengan masyarakat, yaitu:

a) *Halal bi Halal* Keluarga Besar MI Istiqomah Sambas dengan masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan Syawal, dengan maksud agar tercipta kebersamaan antara MI Istiqomah Sambas dengan masyarakat. Dampak lebih jauh dari kebersamaan ini adanya dukungan dari masyarakat terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh MI Istiqomah Sambas. Hal ini tercermin dari aparat desa, kecamatan, pemerintah daerah, maupun Kemenag yang hadir dalam acara tersebut dan memberikan apresiasi positif MI Istiqomah Sambas.

b) Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Qurban di Madrasah.

Perayaan Idul Adha, selain menjadi ritual penting bagi umat Islam, juga menjadi bagian dari norma kebiasaan

yang ditanamkan oleh MI Istiqomah Sambas. Kegiatan perayaan biasanya dilakukan dengan menyelenggarakan pemotongan hewan qurban di madrasah. Kegiatan ini, meskipun dari sisi jumlah belum maksimal, namun dari sisi pembangunan norma sosial sangat strategis. Paling tidak, dari sisi antusiasme masyarakat (terutama anak-anak) yang melihat proses penyembelihan hewan qurban, bisa dijadikan bukti bahwa kegiatan tersebut cukup efektif untuk membangun norma sosial.

## 2) Tradisi Umum

MI Istiqomah Sambas memperingati hari jadinya (mifad), setiap tanggal 20 April. Peringatan mifad biasanya diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat umum seperti jalan sehat, pasar murah, bagi-bagi sembako atau yang lainnya. Tujuan dilaksanakannya berbagai kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan kebersamaan dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat umum.

Sebagaimana dipaparkan di bab sebelumnya, masyarakat Purbalingga terdiri atas kelompok individu yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Perbedaan tersebut mulai dari status sosial, pendidikan, afiliasi politik, ekonomi, adat kebiasaan, profesi, pemahaman keagamaan dan lainnya. Heterogenitas latar belakang masyarakat tersebut meniscayakan adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut. Fenomena ini terjadi di hampir semua kelompok masyarakat. Kenyataan seperti ini harus dipersepsikan dan dianggap sebagai potensi, modal sosial, yang dapat dimanaj dan dikembangkan, bukan sebaliknya sebagai sesuatu yang mengancam.

Nilai-nilai yang eksis di dalam masyarakat akan senantiasa dianut oleh seluruh anggota masyarakat, dan mereka akan selalu menjaga kemurniannya. Upaya yang berkaitan dengan hal ini terjadi manakala satu anggota masyarakat melanggar nilai yang disepakati, atau ada kelompok masyarakat lain merasa terusik terhadap nilai yang dianutnya. Dinamika dalam satu kelompok masyarakat atau antarkeompok masyarakat ini terjadi karena adanya interaksi atau hubungan di antara mereka.

Potensi keragaman nilai yang ada di masyarakat tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam bentuk yang lebih operasional yang kemudian disebut norma. Sifat norma ini adalah mengikat, sehingga harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Norma, baik tertulis maupun tidak, biasanya merupakan kesepakatan yang dibuat bersama-sama masyarakat dan sifatnya tidak *top down*.<sup>30</sup>

Norma yang dibangun bersama dan kemudian dilaksanakan secara konsekuen akan melahirkan partisipasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat terhadap lembaga madrasah bergantung pada bagaimana norma tersebut dapat dijaga dan difestarkan. Semakin tinggi komitmen terhadap norma yang berlaku atau disepakati, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat. Apalagi jika norma tersebut diturunkan dari nilai-nilai agama, ia mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap partisipasi masyarakat.

Namun, oprasionalisasi dari norma yang berlaku di sebuah lembaga membutuhkan langkah-langkah manajerial yang mapan. Kaitannya dengan konteks ini, MI Istiqmah Sambas Purbalingga dalam membangun, mengelola dan menjaga norma telah menggunakan manajemen yang terstandar. Untuk norma yang bersifat kelembagaan diterapkanlah norma disiplin, etos kerja, pengawasan dan evaluasi. Sedangkan norma agama dan sosial difaksanakan melalui pembiasaan dan keteladanan.

\*\*\*\*

---

30 Fukuyama F, *ibid*

# DAFTAR PUSTAKA



- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Ali, Mohammad. 1987. *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*. Bandung: Penerbit Angkasa
- Asrofah, Hanun. 1999. *Sjarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Al-Attas, Muhammad an-Naquib. 1984. *Konsep Pendidikan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Al-Hufy, Ahmad Muhammad. 1978. *Min Akhlagin Nabi*. Terj.: Masdar Helmy dan Abd. Khalik Anwar. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bertens, K. 1999. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Boechari, Sidi Ibrahim. 1981. *Pengaruh Timbal Balik Antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau*. Jakarta: Gunung Tiga.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen, Sari K. 1982. *Qualitatif Research for Education An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Burt, R.S. 2009. *Structure Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge, MA and London: Harvard University.
- Castiglione, Dario. 2008. (et.al). *The Handbook of Social Capital*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Chandra, Robby I. 1995. *Etika Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Coleman, James S. 1999. *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard University Press.

- , 2003. "Religious Social Capital: Its Nature, Social Location, and Limits", *Religion as Social Capital*, (Waco: Baylor University Press).
- , 2009. "Social Capital In The Creation of Human Capital", dalam *American Journal of Sociology*, 94 Supplement: S95-S120.
- Cox, Eva. 2009. *A True Civil Society*. Sidney: ABC Book.
- Crowther, Jonathan (ed.). 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford University Press.
- Daufay, Haidar Putra. 1991. "Pesantren, Sekolah dan Madrasah (Tinjauan dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam)." *Disertasi*. Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Departemen Agama. 2003. *Pondok Pesantren dan Madrasah Dinjyah*. Jakarta: tnp.
- Djamaluddin dan Aly, Abdulfah. 1999. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Dudwick, Nora, et al. 2006. *Analyzing Social Capital In Context: A Guide to Using Qualitative Methods and Data*. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Durkheim, Emile. 1969. *The Elementary Forms of the Religious Life*. Terj: Joseph W. Swain, New York: the Free Press.
- Faffaele, Joseph A. 1971. *The Economic Development of Nations*. New Random House.
- Fajar, H. A. Malik. 1998. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta, LP3NI.
- Fajar, Abdulfah. 1961. *Peradaban dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Faruqi, M. 1987. *The Development of the Institutions of Madrasa and the Nizamnya (of Bagdad, Islamic Studies*, Musim Gugur.
- Field, John. 2005. *Social Capital And Lifelong Learning*. Bristol, UK: The Policy Press University of Bristol.
- , 2011. *Modal Sosial*. Terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Freire, Paulo. 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*. Terj.: Alois A. Nugroho. Jakarta: Gramedia.

- Fukuyama, Francis. 1992. *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Terj. Mohammad Husein Amrullah. Yogyakarta: Qalam.
- . 1995. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Terj. Rustani. Yogyakarta: Qalam.
- . 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Geertz, Clifford. 2002. *Kebudayaan dan Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Grootaert, Cristiaan dan Bastelaer, Thierry van (ed.). 2012. *Understanding and Measuring Social Capital*. Washington, USA: The World Bank.
- Habibie, Bacharuddin Jusuf. 2006. *Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Hakim, Ahmad Junaidi. 2005. "Strategi Pengembangan Madrasah Aliyah Swasta dalam Era Otonomi Daerah". Tesis. Semarang: IAIN Walisongo.
- Hall, T. William (ed.). 1978. *Introduction of the Study of Religion*. San Fransisco: Harper & Row.
- Halpern, David. 2005. *Social Capital*. Cambridge: Polity.
- Hasbullah, Joisairi. 2006. *Sosial Kapital: Menuju Keberhasilan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press.
- Helliwell, John F. dan Robert D. Putnam. 1999. "Education and Social Capital", *NBER Working Paper Series*, Cambridge.
- Huda, Nurul. 2000. "Madrasah: Sebuah Perjalanan Eksis", dalam Ismail dkk. (ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Ihsan, Fuad. 1997. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail, Faisal. 1997. *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Jurnhur dan Danasuparta. 1981. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Ilmu.
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kavina, Ba'arvah. 2011. "Kapital Sosial Pada Lembaga Madrasah (Studi Kasus Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta)". Skripsi. Jakarta UIN Syarif Hidayatullah.

- Kharir, M. 2013. "Integrasi Metode Bandongan dan Sorogan dalam Peningkatan Keaktifan Belajar Santri di Ponpes Aswaja-Nusantara Mlangi, Sleman, Yogyakarta. *Skrpsi*. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kleden, Ignas. 1995. "Kebangkitan Agama dalam Tiga Dimensi". *Kompas*.
- Koentjaraningrat (ed.). 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- . *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Larsen, Larissa, et.al. 2004. "Bonding and Bridging, Understanding the Relationship between Social Capital and Civic Action". *Journal of Planning Education and Research*. Association of Collegiate Schools of Planning.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, et.al. 1991. *Penelitian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Maksum. 1999. *Madrasah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Makdisi, George. 1981. *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*, Edenburh University Press.
- Manaf, Mudjahid Abdul. *Ilmu Perbandingan Agama*. Semarang: Badan Penerbitan IAIN Wali Songo Press, tt.
- Marimba, Ahmad D. 1980. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2002. *Format Pendidikan Nonakotomik*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Miller, M. Peter. 2011. "Community-Based Education and Social Capital in an Urban After-School Program", *Journal, Wisconsin*.
- Moloeng, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moyers, Carlos German Palafox, et.al. 2014. "The Social Capital as an Element of Development". *International Journal of Cperations and Legistics Management*.
- Muhaimin. 2003. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: PSAPM dan Pustaka Pelajar.

- Muhajir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muda, Ahmad Anoni K. 2003. *Kamus Lengkap Ekonomi*. ttp.: Gitamedia Press.
- Nakosteen, Mehdi. 1996. *Kontribusi Islam atas Dunia Islam Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keenam Islam, Edisi Bahasa Indonesia*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. 2004. *Sosiologi Teks Perantara dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution. 1996. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Burni Aksara.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- . 1993. (ed.). *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Depag RI.
- Nawawi, Handari. 1995. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nizar, Samsul. 2007. *Sejarah Pendidikan Islam (Menelusuri Sejak Sejarah Pendidikan Islam Sejak Rasulullah Sampai Indonesia)*. Jakarta: Kencana.
- Noer, Deliar. 1995. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Odden, Allan (ed.). 1994. *School Based Management: Organizing For High Performance*. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
- Philipus, Ng. dan Aini, Nurul. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pramatya, Ichsan. 2013. "Modal Sosial Pedagang Kaki Lima Di Jalan Gambir Tanjungpinang (Studi PKL Sayur-sayuran)". *Skripsi*. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Prusak L, S. Cohen. 2001. *In Good Company: How Social Capital Makes Organization Work*. London: Havard Bussiness Press.
- Putnam, Robert D. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life". *The American Prospect*. No. 13, Spring, 1993, <http://epn.org>
- . 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Rais, Rahmat. 2007. "Modal Sosial Sebagai Pengembangan Madrasah (Studi Pengembangan Pada Madrasah 1 Surakarta)". *Disertasi*. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Richards, J. C. (Ed.). 1983. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood Press.
- Riyanto, Bambang. 1997. *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Rusf, Michael dan Philip Althof. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Samaan, Khalil I. (ed.) 1980. *Islam and the Medieval West: Aspects of Intercultural Relations*. Albany: State University of New York Press.
- Santosa, Purwo. 2002. *Merubah Watak Negara*, Yogyakarta: LAPPERA Pustaka Utama.
- Sastrapratedja, M. 2013. *Penaidikan Sebagai Humanisasi*. Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila.
- Satori, Jaman dan Suryana, Asep. 2013. "Peningkatan Kualitas Kerja Melalui Pola Pembinaan (Capacity Building) Dosen Muda Pada Program Studi Administrasi Pendidikan SPS UPI". *Jurnal Penelitian Pendidikan*.
- Sayafaruddin. 2005. *Manajemen Lembaga Penaidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Simanjuntak, IP. 1972. *Perkembangan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sindhunata. 2002. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Somad, Burlian. 1981. *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soeratno dan Arsyad, Lincoln. 1993. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Soyomukti, Nurani. 2008. *Pendidikan Berpektif Globalisasi*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Spencer, Metta dan Alex, Inkeles. 1982. *Foundations of Modern Sociology*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

- Stanton, Charles Michael. 1994. *Pendidikan Tinggi dalam Islam*. Terj.: Afandi dan Hasan Asari, Jakarta: Logos.
- Strauss, Anseim I. 1987. *Qualitative Analysis or Social Scientist*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta: LPES.
- Stephenson, Max dan Ebrahim, Alnoor. 2004. "Trust, Social Capital, and Organizational Effectiveness". *Makalah*. Virginia: The Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto dan Abbas, MS. 2001. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Syafa'at. 1965. *Melampaui Anda Beragama Islam*. Jakarta: Wijaya.
- Syalabi, Ahmad. 1954. *History of Muslim Education*. Beirut: Dar al-Kashshaf.
- . 1973. *Sjarah Pendidikan Islam*. Terj. Mukhtar Yahya dan Sanusi Latief. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syaukani. 2002. *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Tiller, L. Kent and Gregory R. Weiher. 2011. "General Social Capital, Education-Related Social Capital, and Choosing Charter School", *The Policy Studies Journal*.
- Tim Penulis Rosda. 1995. *Kamus Filosofat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Pendis Depag. 2008. *Sjarah Madrasah*, Jakarta: Penda.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Torche, Florencia dan Valenzuela, Eduardo. "Trust and Reciprocity: A Theoretical Distinction Of The Sources Of Social Capital". *European Journal of Social Theory (online)*, <https://files.nyu.edu>
- Umar, Husein. 2000. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia.
- Usa, Muslih (ed.) 1991. *Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Wach, Joachim. 1958. *The Comparative Study of Religion*. New York: Columbia University Press.
- Wajdi, Muhammad Farid. 1971. *Dirāsāt al-Ma'ār f*. Beirut: Dar al-Mâ'arif.
- Widjaja, Albert. 1982. *Budya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Wijaya, David. 2009. "Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Penabur*. Vol. 8, ed. ke- 13, Tahun ke-8.
- Williams, Kate dan Durrance, Joan C. 2008. "Social Networks and Social Capital: Rethinking Theory in Community Informatics". *The Journal of Community Informatics*. Volume 4, Nomor 3.
- Woolcock, Michael. 1998. *Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework: Theory and Society*. Netherlands Kluwer Academic Publishers.
- Yunus, Mahmud. 1995. *Sjarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Zubaidi. 2002. *Strategi dan Program Pengembangan Madrasah dalam Era Otonomi Daerah*. Semarang: Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo.
- Zuhairini. et.al. 1993. *Metologi Pendidikan Agama*. Solo: Ramadhani.

\*\*\*\*\*

## BIODATA PENULIS



**Dr. Munjin, M.Pd.I.**, dilahirkan di Semarang, 5 Maret 1961. Menyelesaikan studi S.1 dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Tarbiyah Bidang Studi Tadris Bahasa Inggris (1989). Setelah itu, studi S.2 dirampungkannya dari Universitas Islam Malang Jurusan Pendidikan Islam (2002), dan studi Doktornya (S.3) diperoleh dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009, konsentrasi Pendidikan Islam.

Banyak karya tulisnya terdokumentasikan di jurnal ilmiah, di antaranya: *'The Blend of Formal and Non-formal Education'*, *Insania* (1997), *'The Factors Influencing The Teaching English As A Foreign Language'*, *Teologia* (2000), *'Ragam Bahasa Inggris'*, *Teologia* (2001), *'Teaching English for Special Purposes at University'*, *Insania* (2002), *'Krisis Pendidikan Islam'*, *Insania* (2003), *'Internalisasi Nilai-Nilai Budi Pekerti pada Anak'*, *Kommunika* (2008), *'Penguasaan Bahasa Inggris Melalui Extensive Reading Purpose'*, *Insania* (2008), *'Ekspresi Bahasa dan Gender: sebuah Analisis Sociolinguistiks'*, *Yi yang* (2008), *'British And American English : A Comparative Study Related To The Teaching English At Stain Purwokerto'*, *JIA* (2008), *'Puisi sebagai Metode Alternatif Pembelajaran Bahasa Inggris'*, *Insania* (2008), *'The Causal Factors Influencing The Diversi'y In Islam'*, *Sosireligia* (2008), *'Minoritas Muslim di Australia dan Wacana Gender'*, *Yi yang* (2009).

Selain itu, ia juga aktif melakukan penelitian ilmiah dalam berbagai bidang kajian, khususnya pada bidang pendidikan, di antaranya: *Tingkat Keberagaman Sepir Argentan Kota di Purwokerto*, Depag (1999), *Kesiapan STAIN Salatiga dalam Menghadapi Otonomi Daerah*, Depag (2002), *Peta Keagamaan Masyarakat Banyumas*, Tesis (2004), *American and British English*

*A Comparative Study Related to Teaching English at STAIN Purwokerto*)  
*Peta Keagamaan Masyarakat Banyumas*, DIPA STAIN (2005), *Budaya Organisasi pada Gerakan Gender di Perguruan Tinggi se-Purwokerto : Studi pada PSG STAIN, UNWIKU, dan Puslitwan UNSOED*, DIPA STAIN (2006), *Analisis Kesalahan Gramatika pada Abstrak Jurnal Insania STAIN Purwokerto*, DIPA STAIN (2008), *Kemampuan Menejemahkan Noun Phrase pada Mahasiswa STAIN Purwokerto*, DIPA STAIN (2009), *Teaching Translation in Islamic Higher Education*, DIPA STAIN (2010), *Konfigurasi Kurikulum Prodi Kependidikan Islam STAIN Purwokerto*, DIPA STAIN (2011), *Perjaminan Mutu MI Istigomah Sambas PBG*, DIPA STAIN (2014).

Di samping itu, untuk memperdalam sekaligus memperluas keilmuannya, beberapa forum ilmiah semacam konferensi, seminar, lokakarya, ataupun simposium diikutinya, seperti: *Seminar Ekonomi Islam*, STAIN Purwokerto (2004), *Workshop on Turn-around Strategy, Strategies Planning and Quality Assurance*, STAIN Purwokerto (2004), *One-day Journy (Bahasia Membangun Kecerdasan Emosi and Spiritual)*, UNSOED (2004), *Workshop Sensitivitas Gender*, STAIN Purwokerto (2006), *Seminar Revitalisasi PTAI di Era Pasar Bebas*, STAIN Purwokerto (2004), *Workshop Pembelajaran Bahasa Inggris*, STAIN Purwokerto dan UNSOED (2007), *Strategi Pembelajaran Bahasa Asing*, STAIN Purwokerto dan CTSD (2008), *Workshop Konseling*, STAIN Purwokerto (2008), *Urgensi Program Kualifikasi S1 bagi Guru Agama Islam*, STAIN Purwokerto (2010), *International Seminar on 21<sup>st</sup> Century in Higher Education Role Models*, STAIN Salatiga (2011), *Seminar Deradikalisasi Agama melalui Pendidikan Karakter*, STAIN Purwokerto (2011), *TOT Nasional Kurtilas di Jakarta*, Kemenag Pusat (2014). Beberapa organisasi profesi/ ilmiah juga diikutinya, antara lain: Anggota LSM Cycle Purwokerto, 2004 – sekarang, anggota redaktur Jurnal *Insania* STAIN Purwokerto, 1999 – 2005, IETS STAIN Purwokerto, 2006 – sekarang.

Saat ini, aktivitas sehari-harinya sebagai Dosen IAIN Purwokerto dan sekaligus menjabat Wakil Rektor 1 yang beralamat di Jl. A. Yani, No. 40 A, Purwokerto, Telepon: 0281 - 635624. Adapun alamat tempat tinggalnya di Jl. Martadireja II Rt 02/7, Mersi, Purwokerto Timur. Email: munjinstain@gmail.com.

\*\*\*\*\*

# PENGEMBANGAN MADRASAH BERBASIS MODAL SOSIAL

Pengembangan madrasah seharusnya tidak hanya tergantung pada modal finansial yang meliputi fasilitas sarana prasarana saja. Ada variabel lain yang mempunyai andil lebih penting, yaitu modal sosial. Jika dua variabel tersebut

digunakan secara maksimal, madrasah akan bisa berkembang dengan pesat, apa lagi jika madrasah tersebut secara genealogi mempunyai basis massa yang besar. Modal sosial yang merupakan faktor utama perkembangan komunitas, baik lokal maupun nasional, dalam hal ini, patut pula dicermati. Meski partisipasi Institusi formal mengalami penurunan, namun upaya untuk meningkatkan demokratisasi kaitannya dengan hubungan dan *trust*, baik dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat sangatlah penting. Dalam hal ini, faktor yang tidak kalah urgen adalah sikap terbuka terhadap perkembangan dan kecenderungan pada inovasi baru. Sikap terbuka terhadap perubahan politik dan kemasyarakatan ini merupakan unsur utama kemajuan dan stabilitas demokrasi.

Pada sisi itu, ditemukan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dan *trust*. Orang akan lebih percaya kepada orang lain yang tingkat pendidikannya sama atau lebih tinggi, bahkan disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, akan semakin tinggi pula *trust*-nya kepada orang lain. Perlu diketahui bahwa *trust* merupakan variabel penting untuk mengukur modal sosial.

Konsep yang digunakan dalam buku ini tidak bisa dilepaskan dari usaha untuk mendeskripsikan tentang modal sosial sebagai strategi pengembangan madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas Purbalingga. Modal sosial sebagai strategi pengembangan madrasah tersebut adalah suatu konteks yang sifatnya alamiah, yaitu suatu konteks kebulatan menyeluruh yang tidak bisa dipahami dengan membuat isolasi atau eliminasi sehingga terlepas dari konteksnya. Pendekatan kualitatif-idiografik dipandang cocok karena berifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah penelitian, yaitu modal sosial sebagai strategi pengembangan madrasah dengan kekhasannya.



J.L.A. Yani No. 40-A, Puncokerto  
Telp. (0281) 638 624, Fax. (0281) 628 280  
E-mail : support@stainpress.com  
stainpress2008@gmail.com  
Website : <http://www.stainpress.com>  
[www.lainpuncokerto.ac.id](http://www.lainpuncokerto.ac.id)

ISBN | 978-602-50771-3-5



9 786025 077135 >